LAPORAN TAHUNAN
2025

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
2026

LAPORAN TAHUNAN
2025

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

2026

Laporan Tahunan 2025

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

PENANGGUNG JAWAB

Rima Purnamayani

DISUSUN OLEH

Tim Balai Perakitan Dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian

PENYUNTING

Adang Hamdani
Heri Wibowo
Husna Alfiani

REDAKTUR PELAKSANA

Risqa Nurkhaida
Muhammad Adrian Munaf Karim
Gina Maulana Kurnia
Naadaa Rachmawati
Edi Susanto

DITERBITKAN OLEH:

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2025
Jl. Tentara Pelajar 1A Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Bogor 16111 Indonesia
Telp: +62-0251-8312760
Faks: +62-0251-8323909
E-mail: brmp.agroklimat@pertanian.go.id
Website: https://agroklimat.brmp.pertanian.go.id
ISSN :1693-6043

KATA PENGANTAR

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian. Dalam tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian; pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian; pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan agroklimat dan hidrologi pertanian; pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian; pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia agroklimat dan hidrologi pertanian dan penilaian kesesuaian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun anggaran 2025 difokuskan pada kegiatan teknis dan manajemen (RKTM). Kegiatan teknis Tahun 2025 menghasilkan Dokumen Standar Nasional Indonesia dengan judul "Tata cara pengamatan dan pengelolaan data iklim untuk pertanian".

Laporan tahunan ini juga menginformasikan profil Balai yang memuat tentang sumberdaya manusia, struktur organisasi, anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Peran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian didukung oleh sumber daya yang memadai (SDM, pendanaan, dan sarana-prasarana). Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah SDM Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebanyak 44 orang ASN terdiri dari 39 orang PNS dan 5 orang PPPK. Rincian pegawai terdiri dari 2 orang PNS Struktural dan 39 orang PNS kelompok fungsional (Fungsional Analis PSP Ahli Muda 1 orang, Analis PSP Ahli Pertama 4 orang, Analis Standarisasi Ahli Muda 1 orang, Analis Standarisasi Ahli Pertama 5 orang), Teknisi Litkayasa Penyelia sebanyak 1 orang, Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula sebanyak 2 orang, Teknisi Litkayasa Terampil sebanyak 4 orang, arsiparis Terampil 2 orang, Pengadministrasian Perkantoran 5 orang, Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 3 orang, Pengolah Data dan Informasi 1 orang, Pranata komputer ahli pertama 2 orang, Pengelola Layanan Operasional 1 orang, Operator layanan operasional 3 orang. Selain itu juga dibantu oleh tenaga PPPK Paruh Waktu terdiri dari 3 orang Penata Layanoan Opersional, 13 orang Operator Layanan Operasional dan 5 orang Pengelola Umum Operasional.

Laporan Tahunan ini diterbitkan sebagai media informasi rancangan perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran TA 2025. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Januari 2026

Kepala Balai,

Rima Purnamayani, SP, MSi
NIP. 19760613 200312 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
I. PENDAHULUAN 1
II. PROFIL BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN 4
2.1. Struktur Organisasi 4
2.2. Sumber Daya Manusia 4
2.2.1. Petugas Belajar dan Ijin Belajar 5
2.2.2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 6
2.2.3. CPNS 6
2.2.4. Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) 7
2.2.5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 7
2.2.6. Sarana dan Prasarana 8
2.2.7. Barang Tidak Bergerak 11
2.2.8. Fasilitas 11
2.2.9. Anggaran 12
2.2.10. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 12
2.2.11. Kegiatan Kerjasama 12
III. PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 13
3.1. Tahap Perencanaan 13
3.2. Pelaksanaan 14
3.3. Pelaporan 14
3.4. Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) 15
3.5. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian 23
3.6. Kerjasama dengan Stakeholders 29
IV. PELAYANAN HUMAS DAN PENGELOLAAN INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN 37
4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 37
4.2. SPKP dan SPAK 44
4.3. Magang 47
4.4. Pengelolaan WBS 49
4.5. Laporan PPID 50
4.6. Konten Media Sosial dan Website Agroklimat 55
4.7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) 60
4.8. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 62
4.9. Self Assessment Questionnaire (SAQ) 66
4.10. Public Hearing 67
V. MANAJEMEN BALAI 71
5.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan 71
5.1.1. Realisasi Anggaran 72
5.1.2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 73
5.1.3. SIMAK-BMN 74
5.2. Manajemen Kepegawaian Rumah Tangga dan Sistem Manajemen Mutu 78
5.2.1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 80
5.2.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 98
5.2.3. Zona Integritas (ZI) 101
5.2.4. Rumah Tangga 101

5.2.5. Survei Kepuasan Layanan Internal BRMP Agroklimat 105
5.3. Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga 106
5.4. Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran..... 121
5.5. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 135
5.5.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 135
5.5.2. Kesesuaian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dengan Perjanjian Kinerja 136
5.5.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Tujuan 137
5.5.4. Evaluasi Kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) TA 2025..... 140
5.5.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapang..... 141
5.5.6. Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Online..... 143
5.5.7. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi 146
5.5.8. Pelaksanaan SPIP..... 148
5.5.9. Pengendalian Lingkungan SATKER..... 148
5.5.10. Pemantauan dan Evaluasi 149
5.5.11. Keandalan Pelaporan Keuangan 150
5.5.12. Keamanan Aset Negara 152
5.5.13. Ketaatan terhadap Perundang-undangan 153
5.5.14. Informasi dan Komunikasi..... 153
5.6. Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet..... 154
5.6.1. Bagian Pemantauan dan Pengamatan Iklim dan Hidrologi Pertanian ... 154
5.6.2. Bagian Identifikasi Sumberdaya Iklim dan Air 160
5.6.3. Bagian Pelayanan Peminjaman Alat Laboratorium 162
VI. KESIMPULAN..... 164
DAFTAR PUSTAKA..... 165

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Desember 2025 5
Tabel 2. Data petugas belajar dan ijin belajar BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 5
Tabel 3. Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 6
Tabel 4. Daftar CPNS 2025 6
Tabel 5. Daftar Daftar PPPK Paruh Waktu 2025 7
Tabel 6. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025 7
Tabel 7. Rincian Tenaga Berdasarkan Golongan 2025 8
Tabel 8. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional 2025 8
Tabel 9. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional Pelaksana 2025 8
Tabel 10. Alat Transportasi 12
Tabel 11. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Januari – Desember 2025 38
Tabel 12. Analisa Nilai Indeks SPKP dan SPAK Tahun 2025 46
Tabel 13. Komponen Nilai Maksimum dan Minimum Survei SPKP dan SPAK Tahun 2025 46
Tabel 14. Daftar Universitas Peserta Magang Tahun 2025 48
Tabel 15. Daftar Jurusan Peserta Magang Tahun 2025 48
Tabel 16. Daftar Sekolah Peserta Magang Tahun 2025 48
Tabel 17. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing System (WBS) 50
Tabel 18. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Januari 51
Tabel 19. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Februari 52
Tabel 20. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Maret 52
Tabel 21. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan April 52
Tabel 22. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Mei 52
Tabel 23. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Juni 53
Tabel 24. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Juli 53
Tabel 25. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Agustus 53
Tabel 26. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan September 53
Tabel 27. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Oktober 54
Tabel 28. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan November 54
Tabel 29. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Desember 54
Tabel 30. Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik 55
Tabel 31. Rekapitulasi Unggahan Media Sosial dan Website BRMP Agroklimat per Bulan Tahun 2025 58
Tabel 32. Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 61
Tabel 33. Pengaduan Masyarakat Bulan Februari 61
Tabel 34. Pengaduan Masyarakat Bulan Maret 61
Tabel 35. Pengaduan Masyarakat Bulan April 61
Tabel 36. Pengaduan Masyarakat Bulan Mei 61
Tabel 37. Pengaduan Masyarakat Bulan Juni 61
Tabel 38. Pengaduan Masyarakat Bulan Juli 61
Tabel 39. Pengaduan Masyarakat Bulan Agustus 61
Tabel 40. Pengaduan Masyarakat Bulan September 62
Tabel 41. Pengaduan Masyarakat Bulan Oktober 62
Tabel 42. Pengaduan Masyarakat Bulan November 62
Tabel 43. Pengaduan Masyarakat Bulan Desember 62
Tabel 44. Sebaran Media Pengaduan Masyarakat 62
Tabel 45. Daftar Informasi Publik 64
Tabel 46. Hasil monitoring dan evaluasi SAQ 67
Tabel 47. Alokasi anggaran dan realisasi program dukungan manajemen Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 73
Tabel 48. Target dan realisasi PNBP 2025 73

Tabel 49. Rincian Persediaan Per Desember TA 2025 dan 2024 74
Tabel 50. Hasil Sensus BMN Elektronik BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025 76
Tabel 51. Hasil Sensus BMN Non Elektronik BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025 77
Tabel 52. Pagu dan realisasi anggaran pengelolaan keuangan dan perlengkapan tahun 2025 78
Tabel 53. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025 81
Tabel 54. Rincian Tenaga Berdasarkan Golongan 2025 81
Tabel 55. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional 2025 81
Tabel 56. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional Pelaksana 2025 81
Tabel 57. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) 82
Tabel 58. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 83
Tabel 59. Daftar Daftar PPPK Paruh Waktu 2025 83
Tabel 60. Daftar Kenaikan Pangkat BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025 84
Tabel 61. Monitoring Petugas Belajar dan Ijin Belajar 84
Tabel 62. Pencantuman gelar pegawai 85
Tabel 63. Peserta uji kompetensi jabatan fungsional 2025 85
Tabel 64. Usulan jabatan baru 85
Tabel 65. Pelantikan jabatan fungsional 86
Tabel 66. Perubahan pejabat struktural dan Mutasi eksternal BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 86
Tabel 67. Daftar Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyetaraan Kenaikan Pangkat BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025 87
Tabel 68. Peta jabatan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 88
Tabel 69. Penerima Satyalancana Karya Satya 90
Tabel 70. Penerima Satyalancana Karya Satya 2025 90
Tabel 71. Kesesuaian jabatan dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 91
Tabel 72. Peserta pelatihan pelayanan prima Kementan dari BRMP Agroklimat 94
Tabel 73. Peserta pelatihan dasar-dasar pemetaan BRMP SDLP 2025 95
Tabel 74. Peserta pelatihan ToT AWS 2025 95
Tabel 75. Peserta pelatihan Drone 2025 97
Tabel 76. Daftar Kegiatan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2025 123
Tabel 77. Realisasi Keuangan sampai akhir bulan Desember 2025 125
Tabel 78. Progres Capaian Kinerja Indikator Sasaran bulan Desember 125
Tabel 79. Rekap perubahan revisi anggaran TA 2025 128
Tabel 80. Renja TA 2026 (pagu alokasi) 130
Tabel 71. Indikator kinerja kegiatan TA 2026 131
Tabel 82 . Realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan Desember 2025 138
Tabel 83. Rekapitulasi Pelaporan Mandiri Pemberian Gratifikasi Lingkup BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 147
Tabel 84. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan Desember 2025 (berdasarkan realisasi pada spanint kemenkeu) 150
Tabel 85. Kondisi instrumentasi di stasiun lingkup Bogor-Sukabumi-Cianjur berdasarkan catatan bulan Januari-Desember 2025 156
Tabel 86. Rencana dan realisasi kalibrasi tahun 2025 160
Tabel 87. Daftar alat tidak berfungsi 161
Tabel 88. Komponen Penunjang alat lapang 162

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai 4
Gambar 2. Komposisi SDM Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Desember 2025 5
Gambar 3. Hasil renovasi toilet Pria dan pool kendaraan BRMP Agroklimat 9
Gambar 4. Pemeliharaan gedung perkantoran serta halaman perkantoran 10
Gambar 5. Perawatan kendaraan dan pemasangan CCTV 11
Gambar 6. Dinamika LTT Kabupaten Musi Banyuasin 15
Gambar 7. LTT Kabupaten Katingan 16
Gambar 8. Dokumentasi rapat koordinasi 18
Gambar 9. Rapat koordinasi LTT Kabupaten Katingan 18
Gambar 10. Monitoring lapang LTT di Kecamatan Katingan Kuala 19
Gambar 11. Monitoring lapang di Pulau Malau dan TS Garing 20
Gambar 12. Hasil tanam benih biosalin di Desa Jaya Makmur 21
Gambar 13. Serah terima alsintan di DKPP Katingan 22
Gambar 14. Mobilisasi alsintan 22
Gambar 15. Koordinasi dan perencanaan kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi 23
Gambar 16. Pelaksanaan bimtek Kabupaten Sukabumi 24
Gambar 17. Grafik peningkatan pengetahuan peserta bimtek 24
Gambar 18. Pelaksanaan bimtek Kabupaten Muba 26
Gambar 19. Grafik persentase peningkatan pengetahuan peserta bimtek Muba 26
Gambar 20. Laporan pelaksanaan bimtek Kabupaten Katingan 28
Gambar 21. Grafik persentase peningkatan pengetahuan peserta bimtek Kabupaten Katingan 28
Gambar 22. Pemantauan tanaman energi dan kopi di Sukabumi, Jawa Barat pada Juli 2025 30
Gambar 23. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Bulan Desember 2025 31
Gambar 24. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Lampung Selatan pada bulan Desember 2025 31
Gambar 25. Harmonisasi RSNI Data Agroklimat bersama BMKG dan Kementerian Pekerjaan Umum 32
Gambar 26. Rapat teknis RSNI Data Agroklimat 34
Gambar 27. Diskusi dan kunjungan lapang dengan BMKG 35
Gambar 28. Diskusi pendampingan teknologi 35
Gambar 29. Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat 38
Gambar 30. Diagram Analisis IKM Bulan Januari – Februari 2025 40
Gambar 31. Diagram Analisis IKM Bulan Maret 2025 40
Gambar 32. Diagram Analisis IKM Bulan April 2025 40
Gambar 33. Diagram Analisis IKM Bulan Mei 2025 41
Gambar 34. Diagram Analisis IKM Bulan Juni 2025 41
Gambar 35. Diagram Analisis IKM Bulan Juli 2025 41
Gambar 36. Diagram Analisis IKM Bulan Agustus 2025 42
Gambar 37. Diagram Analisis IKM Bulan September 2025 42
Gambar 38. Diagram Analisis IKM Bulan Oktober 2025 42
Gambar 39. Diagram Analisis IKM Bulan November 2025 43
Gambar 40. Diagram Analisis IKM Bulan Desember 2025 43
Gambar 41. Bukti Tindak Lanjut Hasil SKM 44
Gambar 42. Kuisioner SPKP dan SPAK 45
Gambar 43. Data Response dan Hasil Survei 45

Gambar 44. Tampilan website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 56
Gambar 45. Koordinasi Pengelolaan Sistem Website..... 56
Gambar 46. Berita Website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian..... 57
Gambar 47. Media Sosial BRMP Agroklimat..... 58
Gambar 48. Rekapitulasi Unggahan Media Sosial BRMP Agroklimat..... 59
Gambar 49. Jadwal Publikasi Media Sosial 59
Gambar 50. Penandatangan Komitmen KIP 63
Gambar 51. Kuisioner SAQ..... 66
Gambar 52. Public Hearing BRMP Agroklimat 2025..... 69
Gambar 53. Berita Acara Public Hearing BRMP Agroklimat 70
Gambar 54. Grafik realisasi anggaran BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian..... 78
Gambar 55. Pelantikan pejabat fungsional..... 86
Gambar 56. Pelantikan ketua tim kerja..... 92
Gambar 57. Pegawai purna tugas..... 93
Gambar 58. Sertifikat pelatihan 94
Gambar 59. Pelatihan ToT AWS 2025 96
Gambar 60. Pelatihan pelayanan prima 98
Gambar 61. Dokumentasi pelaksanaan surveilen tahun 2025 100
Gambar 62. Hasil renovasi toilet Pria dan pool kendaraan BRMP Agroklimat 102
Gambar 63. Pemeliharaan gedung perkantoran serta halaman perkantoran 103
Gambar 64. Perawatan kendaraan dan pemasangan CCTV 104
Gambar 65. Pengadaan seragam tahun 2025 104
Gambar 61. Pemeriksaan kesehatan pegawai 105
Gambar 67. Survey kepuasan internal..... 106
Gambar 68. Pembahasan Revisi Permentan Tentang BRMP..... 107
Gambar 69. Koordinasi Kerjasama BRMP dengan PLN Kegiatan SPT2E..... 108
Gambar 70. Pembahasan National Determined Contribution (NDC)..... 109
Gambar 71. Penyusunan National Adaptation Plan 110
Gambar 72. Pembahasan PP Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon..... 111
Gambar 73. Kegiatan Hands-on Workshop on Co-development of Functions for an Integrated National Agrometeorological Services System for the Agriculture Sector in Indonesia 112
Gambar 74. Lokakarya Inovasi Pembiayaan Hijau untuk Pertanian Cerdas Iklim 113
Gambar 75. Diskusi antara BMKG dan Kementerian Pertanian terkait Operasi Modifikasi Cuaca 114
Gambar 76. Workshop Perumusan Integrasi EbA dalam Penyusunan NAP Indonesia.... 115
Gambar 77. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Gratifikasi 116
Gambar 78. Kegiatan Pertemuan Strategis Peluncuran Innovation Technology Fund (ITF) 117
Gambar 79. Kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggaran 2026 118
Gambar 80. Peta Desain Rencana Jaringan Irigasi di KP Muara 119
Gambar 81. Dokumentasi Perencanaan Jaringan Irigasi di KP Muara 119
Gambar 82. Penyebarluasan Teknologi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada Kegiatan APEC 2025 di Korea Selatan 121
Gambar 83. Proses Pemantapan dan Evaluasi Proposal TA 2025 123
Gambar 84. Dashboard SMART DJA Sampai Akhir Desember 2025 124
Gambar 85. Dashboard monev IKPA Sampai Akhir Desember 2025 124
Gambar 86. Dokumentasi Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja..... 126
Gambar 87. Contoh Dokumen PK 2025 (1)..... 126
Gambar 88. Contoh Dokumen PK 2025 (2)..... 127
Gambar 89. Contoh Dokumen PK 2025 (3)..... 127

Gambar 90. Arahan dan pembukaan Sekretaris Badan BRMP 129
Gambar 91. Revieu APIP BRMP AHP oleh tim APIP Itjen Kementan 130
Gambar 92. Workshop pengukuran indikator kinerja, Hotel Savero Depok..... 134
Gambar 93. Proposal dan laporan monitoring dan evaluasi yang telah disusun 135
Gambar 94. Hasil penilaian Zona Integritas Lingkup BRMP..... 137
Gambar 95. Tangkapan layar nilai pelaksanaan kinerja anggaran per Desember 2025. 137
Gambar 96. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Tengah TA. 2025 140
Gambar 97. Cover Laporan Kinerja TA 2024 141
Gambar 98. Pelaksanaan Monev Kegiatan Pendampingan Program Strategis di BPP Warung Kiara, Sukabumi 142
Gambar 99. Pelaksanaan Monev Kegiatan Laboratorium (AWS) di KP Pakuwon, BRMPTRI, Sukabumi 142
Gambar 100. Penyampaian dan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi lapang..... 143
Gambar 101. Tangkapan layar Dashboard MONEV – KEMENKEU..... 143
Gambar 102. Nilai indikator pelaksanaan anggaran BRMP Agroklimat hingga bulan Desember 2025 144
Gambar 103. Tangkapan layar Dashboard (OM-SPAN) 144
Gambar 104. Tangkapan layar nilai indikator pelaksanaan anggaran pada MONEVPA.... 145
Gambar 105. Tangkapan layar tools revisi DIPA pada SatuDJA 145
Gambar 106. Tangkapan layar dashboard E-Monev Bappenas..... 145
Gambar 107. Tangkapan layar dashboard E-SAKIP Kementerian Pertanian 146
Gambar 108. Sosialisasi Hasil SPI, WBK, WBBM Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pegawai BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian..... 149
Gambar 109. Pelaksanaan Monev Kegiatan Semester I TA. 2025..... 150
Gambar 110. Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi MONEVPA 151
Gambar 111. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja pada SPANINT KEMENKEU 152
Gambar 112. Website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 153
Gambar 114. Pengecekan AWS Cimanggu pada bulan Januari-Desember 2025 156
Gambar 115. Pengecekan AWS di Pakuwon,Sukabumi bulan Januari-Desember 2025 .. 156
Gambar 116. Pengecekan AWS Muara, Kab.Bogor bulan Januari-Desember 2025 157
Gambar 117. Pengecekan AWS Pacet,Cianjur bulan Januari-Desember 2025 157
Gambar 118. Proses pindah tanam 158
Gambar 119. Pemasangan tali ajir 158
Gambar 120. Kutu Aphids (Aphis gossypii Glover) 159
Gambar 121. Panen Melon pada bulan September 2025 159
Gambar 122. Kalibrasi Instrumentasi Teodolite 160
Gambar 123. Sistem Pengelolaan Alat Laboratorium 162
Gambar 124. Kegiatan penataan alat-alat laboratorium 163
Gambar 125. Rekapitulasi pelaporan peminjaman dan riwayat pemakaian alat 163

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi. Perekayasaan modernisasi untuk agroklimat dan hidrologi pertanian memiliki signifikansi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian.

Berdasarkan hasil perumusan rancangan standar nasional tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah menghasilkan dokumen SNI. Melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 737/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9415:2025 Tata Cara Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim Untuk Pertanian. Dokumen SNI tersebut dirumuskan pada tahun 2025 melalui Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian.

Untuk meningkatkan kinerja institusi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transparansi pelaporan keuangan, perlu dukungan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian serta keuangan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif. Pada TA 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melakukan peningkatan sistem kinerja melalui kegiatan manajemen.

Kepuasan pelayanan Pelayanan Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan Humas dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID) yang berfungsi mempublikasikan dan mendokumentasikan informasi sumberdaya iklim dan air serta kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian kepada pengguna melalui publikasi tercetak, mengkomunikasikan melalui kegiatan pameran, taman display teknologi, website, media sosial dan melakukan kerja sama serta melaksanakan pelayanan prima keberbagai pihak.

Kegiatan PPID merupakan kegiatan rutin yang menunjang tugas dan fungsi Balai. Tujuan kegiatan ini menyebarluaskan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi sumberdaya iklim dan air agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat dan pengguna.

Kerjasama dengan stakeholders merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data dan informasi dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Melalui kemitraan BRMP Agroklimat mendorong penguatan sistem perencanaan tanam, peringatan dini, pengelolaan sumber daya air dan energi, dan penerapan inovasi berbasis data agroklimat. Kerja sama tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui kemitraan tematik dengan berbagai instansi serta kegiatan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah maupun perguruan tinggi.

Dengan demikian, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terus berperan penting dalam menyediakan teknologi agroklimat dan hidrologi yang diperlukan untuk pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Semoga laporan ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak terkait.

I. PENDAHULUAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) lahir dari transformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP Agroklimat) terbentuk melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Sebagai Unit Kerja Eselon III di bawah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, BRMP Agroklimat memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi.

Perekayasaan modernisasi untuk agroklimat dan hidrologi pertanian memiliki signifikansi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Dengan menerapan modernisasi, petani dapat mengumpulkan data akurat mengenai kondisi iklim dan sumber daya air di lahan mereka. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai waktu tanam, irigasi, dan perlindungan tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.

Agenda prioritas Kabinet Kerja "NAWACITA" mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian.

Rencana Strategis (Renstra) BRMP 2025-2029 mengacu kepada (a) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (b) Program Kerja Kabinet 2025-2029, (c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, (d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, (e) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, dan (f) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

Dalam mendukung arah dan sasaran strategis pembangunan pertanian lima tahun ke depan (2025-2029), peran BRMP sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk. BRMP dapat berperan dalam menyediakan fasiltas layanan yang dapat memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar Internasional.

Dalam upaya mewujudkan visi Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045, Kementerian Pertanian membangun rumah strategi dengan delapan pilar. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP adalah Pilar ke-6 yakni pemanfaatan teknologi pertanian modern Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen.

Berdasarkan hasil perumusan rancangan standar nasional, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah menghasilkan dokumen SNI. Melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 737/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9415:2025 Tata Cara Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim Untuk Pertanian. Dokumen SNI tersebut dirumuskan pada tahun 2025 melalui Komite Teknis 65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian.

Untuk TA 2025 sesuai tusi perakitan dan modernisasi, capaian kinerja kegiatan mentargetkan tersedianya teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian namun belum tersedia karena tidak ada alokasi anggaran baru di tahun 2026. Sedangkan dukungan kegiatan manajemen terdiri dari (1) Layanan Dukungan Manajemen Internal; (2) Layanan Sarana Internal; (3) Layanan SDM; (4) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Selain kegiatan yang dibiayai DIPA APBN juga terdapat kegiatan Kerjasama. Pada tahun 2025 terdapat kegiatan kerjasama antara Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui Kerjasama Kemitraan Kompetitif (KREATIF) Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE). Pada tahun anggaran 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melakukan penyebaran hasil capaian kegiatan. Penyebaran hasil tersebut dikemas dalam berbagai bentuk penerbitan publikasi ilmiah semi popular seperti: Laporan Tahunan Balai, Buletin Hasil Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Info Agroklimat dan Hidrologi, Petunjuk Teknis, dan Leafet, Pameran dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Publikasi tercetak berupa tulisan ilmiah populer atau laporan hasil kegiatan yang merupakan media yang efektif untuk penyebarluasan informasi hasil. Oleh sebab itu, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dituntut untuk senantiasa mengembangkan cara penyajian dan teknik penulisan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pengguna.

Laporan tahunan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang kegiatan dan pencapaian Balai Perakitan dan Pengujian selama tahun terakhir. Melalui analisis menyeluruh, kami akan mengeksplorasi bagaimana implementasi standar telah memengaruhi berbagai sektor ekonomi, menjadikan mereka lebih kompetitif dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, laporan ini akan mencerminkan upaya Balai Perakitan dan Pengujian dalam memajukan inovasi, keberlanjutan, dan daya saing global.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi antara satu dan lainnya. Dalam upaya mewujudkan kesinambungan dan efektivitas program nasional, Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian menjadi langkah awal yang strategis dan sebagai bagian dari dukungan teknis terhadap percepatan produksi pangan dan penguatan swasembada melalui pengawalan capaian Luas Tambah Tanam (LTT), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan koordinasi lintas kelembagaan di wilayah sasaran menjadi inti dari inisiatif ini, meneguhkan komitmen untuk mengakselerasi pencapaian swasembada pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian membuka pintu bagi adopsi standar yang lebih luas dalam sektor pertanian, mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas. Pelayanan Humas dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak. Dalam kerangka manajemen Balai, profil Balai Perakitan dan

Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menjadi landasan untuk pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, kompetensi, dan pencapaian lembaga. Dengan demikian, keseluruhan struktur ini menciptakan fondasi kokoh untuk menghadirkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian di tingkat nasional.

II. PROFIL BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

2.1. Struktur Organisasi

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) lahir dari transformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP Agroklimat) terbentuk melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Sebagai Unit Kerja Eselon III di bawah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, BRMP Agroklimat memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi.

Perekayasaan modernisasi untuk agroklimat dan hidrologi pertanian memiliki signifikansi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Dengan menerapan modernisasi, petani dapat mengumpulkan data akurat mengenai kondisi iklim dan sumber daya air di lahan mereka. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai waktu tanam, irigasi, dan perlindungan tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kerugian akibat cuaca ekstrem. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai

2.2. Sumber Daya Manusia

Peran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian didukung oleh sumber daya yang memadai (SDM, pendanaan, dan sarana-prasarana). Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah SDM Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebanyak 43 orang ASN terdiri dari 38 orang PNS dan 5 orang PPPK. Rincian pegawai terdiri dari 2 orang PNS Struktural dan 36 orang PNS kelompok fungsional, Fungsional Analis PSP Ahli Muda 1 orang, Analis PSP Ahli Pertama 4 orang, Analis Standarisasi Ahli Muda 1 orang, Analis Standarisasi Ahli Pertama 5 orang, Teknisi Litkayasa Penyelia sebanyak 1 orang, Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula sebanyak 2

orang, Teknisi Litkayasa Terampil sebanyak 4 orang, arsiparis Terampil 2 orang, Pranata komputer pertama 2 orang, Perekayasa Ahli Pertama 1 orang, Analis SDMA Ahli Pertama 1 orang, Pranata Keuangan APBN Penyelia 1 orang, Perencana Ahli Pertama 1 Orang, Pengadministrasian Perkantoran 5 orang, Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 3 orang, Pengolah Data dan Informasi 1 orang, Pengelola Layanan Operasional 1 orang, Operator layanan operasional 3 orang. Selain itu juga dibantu oleh tenaga PPPK Paruh Waktu terdiri dari 3 orang Penata Layanan Opersional, 13 orang Operator Layanan Operasional dan 5 orang Pengelola Umum Operasional.

Tabel 1. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Desember 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	3
2.	S2	8
3.	S1	12
4.	SARJANA MUDA & D 3	8
5.	SLTA	12
J U M L A H		**43**

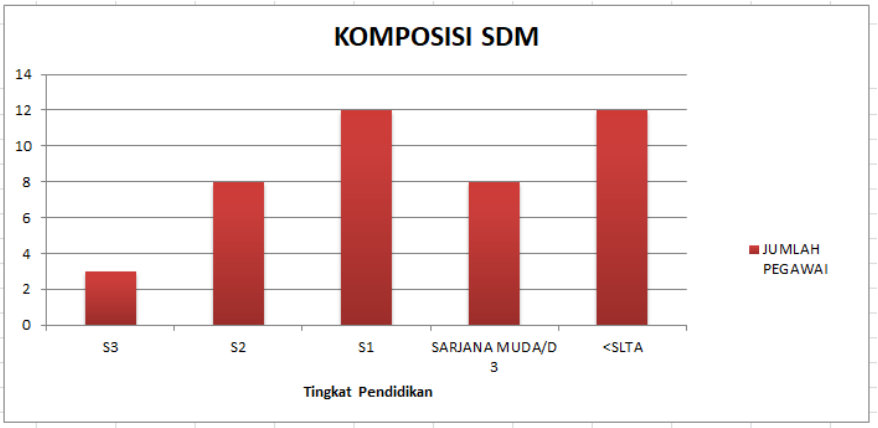

Gambar 2. Komposisi SDM Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Desember 2025

2.2.1. Petugas Belajar dan Ijin Belajar

Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah dua bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun keduanya bertujuan untuk memajukan karier PNS melalui pendidikan dan pelatihan, keduanya memiliki perbedaan dalam penerapannya. Ada satu petugas belajar di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan empat pegawai yang ijin belajar.

Tabel 2. Data petugas belajar dan ijin belajar BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

No	Nama	Status Belajar	Keterangan
1	Naadaa Rahmawati, A.Md	Ijin Belajar S1 Univ. Bakri	Lulus
2	Husna Alfiani, ST	Tubel S2 UI	Lulus
3	Risqa Nurkhaida R., STP	Ijin Belajar S2 IPB	*On the track*
4	Rima Purnamayani, SP., M.Si	Ijin Belajar S3 IPB	Lulus
5	Andrianus Herliyanto Wibowo, A.Md.	Ijin Belajar S1 UT	*On the track*

2.2.2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPPK direkrut untuk mengisi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya jabatan fungsional dan jabatan tertentu yang memerlukan keahlian dan kompetensi spesifik. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan publik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN.

Tabel 3. Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Septian Tri Putranto, SP	198509212025211016	Perencana Ahli Pertama
2	Andri Purna Irawan	197802272025211004	Pengadministrasi Perkantoran
3	Reagan Raymond	198103302025211007	Pengadministrasi Perkantoran

2.2.3. CPNS

BRMP Agroklimat dan Hidrologi telah menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai hasil dari proses seleksi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penerimaan CPNS ini merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam bidang perakitan dan modernisasi agroklimat.

CPNS yang diterima telah melalui seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi. Kehadiran CPNS baru di lingkungan BRMP Agroklimat diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kapasitas teknis dan administrasi, serta mendorong inovasi dalam mendukung program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pengembangan pertanian modern.

Dengan diterimanya CPNS tersebut, BRMP Agroklimat berkomitmen untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar CPNS dapat beradaptasi dengan budaya kerja organisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, serta memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran BRMP Agroklimat.

Tabel 4. Daftar CPNS 2025

No	Nama	Jabatan
1	Mahdiyah Ma Sumah, S.Si	Analis Standardisasi Ahli Pertama
2	Kharissa Nurmanita Kusuma, SP	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama
3	Muhammad Ibas, SAP	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
4	Devi Alvitasari, S.Pd., M.Si	Perekayasa Ahli Pertama
5	Amelia Candra Wati, S.Si	Analis Standardisasi Ahli Pertama
6	Ardane Swari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama

2.2.4. Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN)

Tahun 2025 Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian telah sebanyak 20 pegawai dan satu petugas kebun beralih menjadi PPPK Paruh Waktu yang bekerja sebagai staf administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pengemudi. Sedangkan 1 pegawai masih menunggu proses peralihan. Untuk Pertek dan SK PPPK Paruh Waktu sudah keluar pada Bulan November 2025 dengan TMT per 1 November 2025. Selanjutnya juga sudah ditandatangani perjanjian kinerja PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja 1 November 2025 sampai 31 Oktober 2026.

Tabel 5. Daftar Daftar PPPK Paruh Waktu 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Edi Susanto	198202062025211048	Penata Layanan Operasional
2	Moch Agustian	199608302025211041	Operator Layanan Operasional
3	Heri Irawan	199304222025211048	Pengelola Umum Operasional
4	Imam Susilo	197412082025211023	Operator Layanan Operasional
5	Mamat	198601102025211068	Pengelola Umum Operasional
6	Wahyu Eka Triyana	198210042025211040	Operator Layanan Operasional
7	Deky Gustaman	199012072025211078	Operator Layanan Operasional
8	Jamalludin	197108172025211046	Pengelola Umum Operasional
9	Heri Mashuri	198610282025211083	Operator Layanan Operasional
10	Yogi Buchori	198607092025211068	Operator Layanan Operasional
11	Lentik Mojang Triana	200006192025212029	Operator Layanan Operasional
12	Amirulloh	198310272025211049	Pengelola Umum Operasional
13	Daeng Muda Panglima	198909302025211069	Operator Layanan Operasional
14	Gina Maulana Kurnia	197802202025211030	Penata Layanan Operasional
15	Saepudin	197710202025211028	Operator Layanan Operasional
16	Ahmad Jaelani	198512072025211074	Pengelola Umum Operasional
17	Budi Permana	197905202025211053	Operator Layanan Operasional
18	Guntoro	198108212025211044	Operator Layanan Operasional
19	Iswadi Antriono	197808072025211048	Operator Layanan Operasional
20	Aspian Ihsan	198604032025211111	Operator Layanan Operasional
21	Eko Prasetyo	198407182025211098	Penata Layanan Operasional

2.2.5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Aplikasi SIMASN berbasis WEB menghasilkan keluaran-keluaran antara lain: (1) Daftar Nominatif, (2) Daftar Urut Kepangkatan (DUK), (3) Daftar Pegawai, (4) Daftar Pejabat, (5) Daftar SKP, (6) Laporan, dan (7) Rekapitulasi-rekapitulasi.

Tabel 6. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	3
2.	S2	8
3.	S1	12
4.	SARJANA MUDA & D 3	8
5.	SLTA	12
J U M L A H		**43**

Tabel 7. Rincian Tenaga Berdasarkan Golongan 2025

NO	GOLONGAN	BRMP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
1.	IV	1
2.	III	24
3.	II	9
4.	IX	1
5.	VII	1
J U M L A H		**36**

Tabel 8. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional 2025

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Teknisi Litkayasa Penyelia	1
2.	Teknisi Litkayasa Terampil	4
3.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	2
4.	Arsiparis Terampil	2
5.	ASTA Ahli Muda	1
6.	ASTA Ahli Pertama	5
7.	Analis PSP Ahli Muda	1
8.	Analis PSP Ahli Pertama	4
9.	Pranata komputer pertama	2
10.	Perekayasa Ahli Pertama	1
11.	Analis SDMA Ahli Pertama	1
12.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
13.	Perencana Ahli Pertama	1
JUMLAH		**26**

Tabel 9. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional Pelaksana 2025

NO	JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA	JUMLAH
1.	Operator Layanan Operasional	3
2.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	2
4.	Pengadministrasi Perkantoran	5
5.	Pengelola Layanan Operasional	1
6.	Pengolah Data dan Informasi	3
JUMLAH		**15**

2.2.6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan layanan perkantoran dengan mekanisme yang tertata dan sistematis maka perlu dibangun manajerial pada kegiatan layanan yang mengacu

pada peningkatan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan sarana prasarana, mengurus kantor/gedung serta mengelola perlengkapan Kantor. Tugas keruahtanggan yang diantaranya adalah merencanakan, menyiapkan dan memelihara perlengkapan peralatan kegiatan rumah tangga balai; merencanakan, memelihara, memperbaiki dan pengadaan alat-alat kelengkapan kendaraan dinas balai; menyiapkan layanan transportasi kegiatan balai; melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan kantor; menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, telah terlaksana dengan baik dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Beberapa sarana dan prasarana telah dilakukan perbaikan dan perawatan untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Diantaranya adalah perbaikan lanjutan sarana lobby, perbaikan ruang rapat Campbellstokes, perbaikan papan nama kantor, perbaikan pantry ruang PE.

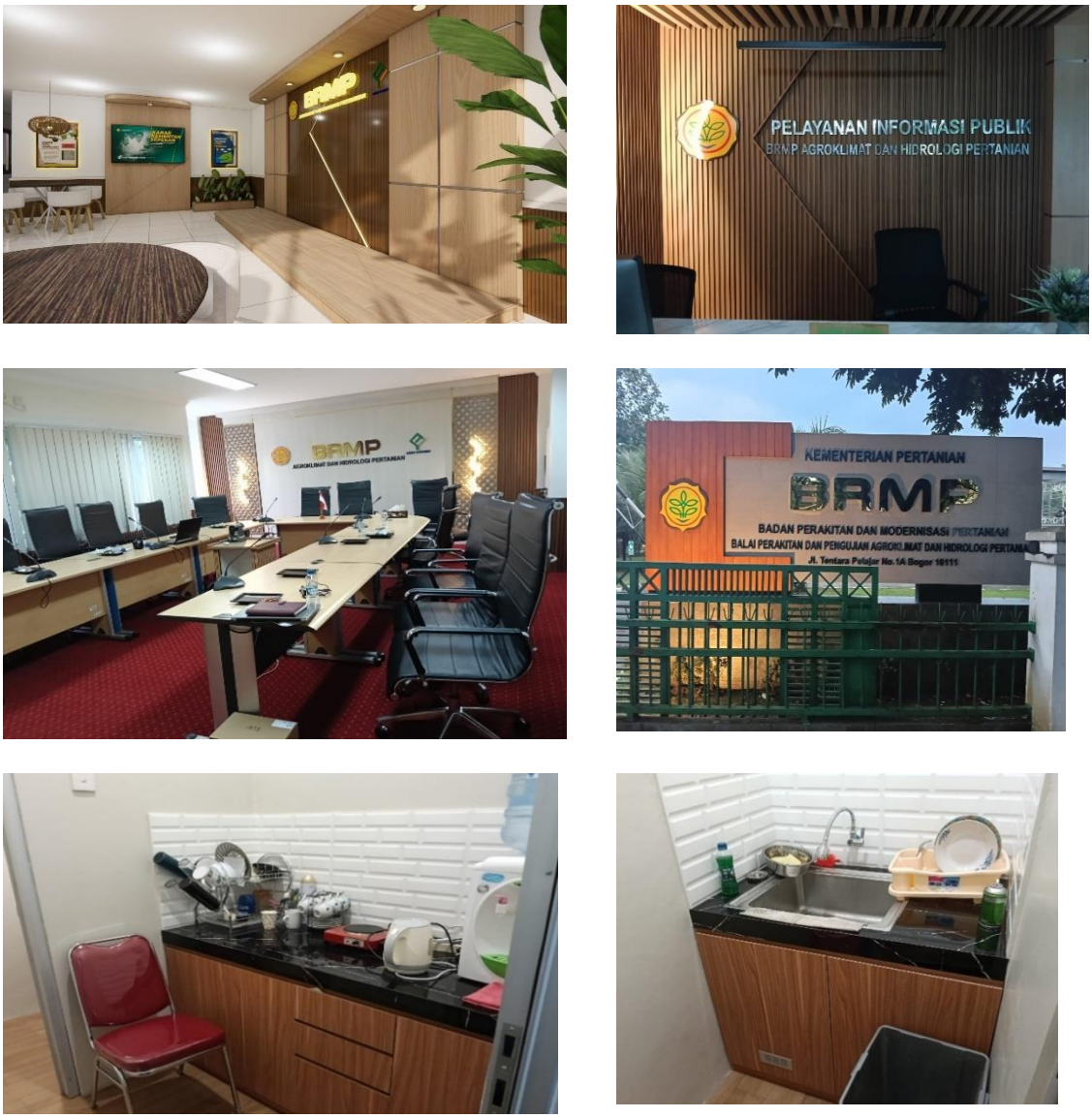

Gambar 3. Hasil renovasi toilet Pria dan pool kendaraan BRMP Agroklimat

Perbaikan lainnya antara lain adalah perluasan gudang BMN, melakukan pengecatan terakota, perbaikan kursi tamu, penggantian karpet ruang rapat

campbellstokes, sekretariat, dan mushola, pembuatan taman, pembuatan tempat pengomposan, serta kebun.

Gambar 4. Pemeliharaan gedung perkantoran serta halaman perkantoran

Selain perbaikan dilakukan perawatan rutin untuk memberikan pelayanan bagi pegawai secara optimal. Beberapa perawatan yang dilakukan antara lain adalah kendaraan dinas, komputer perkantoran, pemasangan CCTV, perbaikan genset dan sema sarana yang dipeliukan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Gambar 5. Perawatan kendaraan dan pemasangan CCTV

2.2.7. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan gedung kantor. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi berada di satu lingkup Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jalan Tentara Pelajar Nomor 1A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 16111. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tidak memiliki aset tetap berupa tanah. Tanah tempat Gedung dan Bangunan berdiri serta halaman yang digunakan masih berstatus pinjam pakai dari Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatika, tanah persil yang dipinjam oleh BRMP Agroklimat seluas 8.800 m^2. Barang inventaris tidak bergerak, yaitu bangunan perkantoran berasal dari eks Puslitbangbun seluas 500 m^2, transfer masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa gedung perkantoran 2 lantai seluas 1.400 m^2, bangunan laboratorium pengatur cuaca seluas 160 m^2 dan penambahan hasil renovasi TA 2013 lantai 2 diatas Mess Balitklimat seluas 312,65 m^2, sedangkan garasi mobil seluas 80 m^2 dan garasi motor seluas 24 m^2. Pada tahun 2014 dan 2015, Balitklimat melakukan renovasi dan perluasan bangunan laboratorium menjadi gedung *Multi Purpose* (Laboratorium, Perpustakaan, Arsip, dan Diseminasi) yang dibangun 2 lantai dengan masing-masing lantai seluas 411,6 m^2 dan sudah selesai 100% serta sudah difungsikan.

2.2.8. Fasilitas

Setiap tahun secara berangsur melalui DIPA SATKER Balitklimat juga mengadakan penambahan aset belanja modal berwujud peralatan laboratorium atau penunjangnya,

peralatan kantor dan penambahan nilai gedung berupa renovasi gedung utama dan gedung mess dan Gedung Laboratorium.

Fasilitas transportasi berupa kendaraan roda 2, 3, dan 4 yang telah dimiliki BRMP Agroklimat dan Hidrologi adalah seperti Tabel 10 dibawah.

Tabel 10. Alat Transportasi

No.	Nama alat	Baik	Total
1	Mini bus	5	5
2	Sepeda motor roda 2	3	3
3	Sepeda motor roda 3	1	1
3	Pick Up double cabin	1	1

2.2.9. Anggaran

Hingga Desember 2025, realisasi anggaran yang berhasil diserap oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebesar Rp. 6.716.470.013 atau mencapai 86,53 persen dari alokasi pagu total anggaran sebesar Rp. 7.501.558.000 atau mencapai 98,85% dari alokasi pagu efektif anggaran sebesar Rp. 6.794.298.000 dengan pagu blokir sebesar Rp. 707.260.000. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 77.827.987 atau 1,15%. Anggaran yang tidak terserap diantaranya di belanja gaji dan tunjangan, serta adanya blokir anggaran.

2.2.10. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Penerimaan Dana PNBP Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025 sebesar Rp. 18.600.000. Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 84.371.450 atau 453,61%. Penerimaan fungsional PNBP sebesar Rp. 19.300.000 dari target Rp. 13.800.000 (139,85%).

2.2.11. Kegiatan Kerjasama

Pada tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melakukan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja dengan BRMP melalui Kerjasama Kemitraan Kompetitif (KREATIF) *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE). Ada 2 (dua) judul kegiatan diantaranya; 1) Integrasi Sistem Informasi Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Perencanaan Dan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi, 2) Implementasi *Smart Irrigation* Terstandar Dalam Budidaya Kakao Untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Di Sulawesi Tenggara.

III. PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

Program strategis Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk mengakselerasi pencapaian swasembada pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mengawal implementasi program prioritas meliputi Luas Tambah Tanam (LTT), Optimasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat, dan pembentukan Brigade Pangan, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian. Kegiatan dilaksanakan di lokasi sentra produksi utama, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin, Katingan, dan Sukabumi, dengan metode pelaksanaan meliputi monitoring dan supervisi lapangan, Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif, serta koordinasi lintas sektor.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi teknologi dan pendampingan lapangan mampu membantu meningkatkan luas tambah tanam di lokasi pendampingan dengan kondisi lahan marginal. Introduksi varietas adaptif Biosalin 2 Agritan dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dapat mendukung percepatan tanam dan adaptasi petani terhadap kondisi lahan. Pada aspek peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis mengenai digitalisasi pertanian dan teknologi pertanian modern berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyuluh dan petani secara signifikan, yang ditandai dengan tingkat kelulusan pasca-pelatihan mencapai 100% di lokasi sasaran. Selain itu, sinergi dengan stakeholders strategis berhasil diperkuat, meliputi kolaborasi dengan PLN dalam pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SPT2E) dan kerjasama dengan BMKG dalam pengumpulan data dan penyusunan RSNI tata cara pengamatan data iklim pertanian. Disimpulkan bahwa pendampingan yang terintegrasi antara aspek teknis, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi kelembagaan merupakan kunci keberhasilan modernisasi pertanian dan pencapaian target swasembada pangan yang berkelanjutan.

3.1. Tahap Perencanaan

Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Tahap perencanaan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian diawali dengan koordinasi bersama dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota, serta PJ Provinsi, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, dan Pusdatin untuk memperoleh gambaran target dan capaian program, meliputi Luas Tambah Tanam (LTT), Optimasi Lahan, Cetak Sawah Rakyat, Brigade Pangan, dan Padi Gogo. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data, identifikasi permasalahan lapangan, serta potensi solusi yang mungkin dilakukan. Selanjutnya, disusun rencana kerja pendampingan yang mencakup metode monitoring dan pelaporan serta penyiapan alat dan bahan yang dibutuhkan.

Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Tahap perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian diawali dengan identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil monitoring lapangan dan diskusi dengan dinas pertanian dan penyuluh terkait mengenai permasalahan yang dihadapi penyuluh serta petani dalam pelaksanaan program, serta potensi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan tersebut, ditetapkan sasaran peserta dan materi bimtek. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan internal tim yang mencakup penyusunan jadwal kegiatan, pembagian tugas dan panitia, metode bimtek, dan pencarian narasumber.

Kerjasama Stakeholders

Tahap perencanaan kerja sama dan sinergi stakeholders dimulai dengan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis pertanian, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dinas pertanian, balai penyuluhan, kelompok

tani, serta lembaga pendukung teknis lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan peran dan fungsi masing-masing pihak serta penyelarasan kebutuhan data, dukungan kegiatan, dan ruang kolaborasi. Hasil proses tersebut kemudian dituangkan dalam rencana mekanisme koordinasi, integrasi data, dan tindak lanjut bersama.

3.2. Pelaksanaan

Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Tahap pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui koordinasi teknis dengan dinas, penyuluh, petugas lapangan, dan kelompok tani, dilanjutkan dengan monitoring secara daring maupun luring di lapangan pada lokasi sasaran program. Monitoring dan koordinasi daring dilakukan melalui zoom rapat koordinasi untuk memantau capaian, target, dan kendala program swasembada pangan. Sementara monitoring secara luring dilakukan melalui rapat koordinasi dan monitoring lapangan untuk memantau langsung kondisi lahan di tingkat tapak dan berdiskusi dengan dinas, petani, dan penyuluh. Dilakukan juga pemutakhiran data LTT yang dilakukan setiap hari melalui grup whatsApp dan aplikasi E-Pusluh.

Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Tahap pelaksanaan peningkatan kapasitas dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang diawali dengan laporan kegiatan, pengarahan umum mengenai kebijakan program strategis pertanian, dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis secara bertahap. Peserta diberikan pemahaman konseptual sekaligus praktik langsung mengenai materi yang disampaikan. Selama pelatihan, peserta memperoleh pendampingan teknis dan ruang diskusi untuk membahas kendala riil di lapangan. Pada pelaksanaan juga dilakukan pretest dan post-potest serta pengisian formulir evaluasi oleh peserta untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan evaluasi yang didapatkan oleh peserta setelah bimtek berlangsung.

Kerjasama Stakeholders

Pada tahap pelaksanaan, kerjasama stakeholders diwujudkan melalui pertemuan koordinasi teknis, sinkronisasi data program dan peta lahan, serta kolaborasi dalam kegiatan pendampingan dan supervisi lapangan. Sinergi ini turut mendukung penguatan peran BUMN, kementerian/lembaga, penyuluh dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data capaian program, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi, data spasial, data iklim, dan sistem pelaporan digital secara lebih terintegrasi. Melalui kerjasama lintas lembaga, pelaksanaan program strategis dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

3.3. Pelaporan

Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Tahap penyusunan laporan dilakukan melalui rekapitulasi hasil laporan harian dari penyuluh, data dari dinas pertanian, serta hasil monitoring kegiatan pendampingan. Laporan juga memuat pelaksanaan kegiatan, identifikasi permasalahan, pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan pendampingan, serta rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah dan unit terkait guna meningkatkan efektivitas pencapaian program strategis pertanian.

Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan kegiatan, laporan tengah tahun, dan laporan akhir tahun. Penyusunan laporan dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan dokumen pelaksanaan, seperti daftar hadir, dokumentasi, materi pelatihan, dan catatan

hasil diskusi. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah peserta, profil sasaran, serta evaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil kegiatan kemudian disajikan dalam bentuk laporan pelaksanaan bimtek yang memuat capaian, manfaat, serta rekomendasi penguatan kompetensi SDM pertanian pada kegiatan pendampingan berikutnya. Laporan tersebut juga disertakan dalam laporan tengah tahun dan akhir tahun.

Kerjasama Stakeholders

Tahap penyusunan laporan kerja sama dilakukan dengan menghimpun hasil koordinasi, kesepakatan tindak lanjut, serta capaian sinergi yang diperoleh selama kegiatan. Laporan mencakup analisis manfaat kolaborasi terhadap peningkatan kualitas data dan kinerja program, serta identifikasi peluang penguatan jejaring kemitraan di masa mendatang.

3.4. Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Percepatan LTT di lokasi pendampingan, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Katingan dilakukan melalui berbagai upaya seperti rapat koordinasi, pelaporan LTT, monitoring lapang, bantuan benih, dan pendampingan mobilisasi bantuan alsintan.

Laporan LTT

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/ Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan. BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian mendukung swasembada pangan Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin guna mendukung tercapainya target swasembada pangan BRMP SDLP. Berdasarkan Kepmentan tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki target capaian berupa 99.713 ha untuk keseluruhan LTT tahun 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Muba, capaian LTT pada bulan April - Agustus 2025 dapat dilihat pada gambar 6.

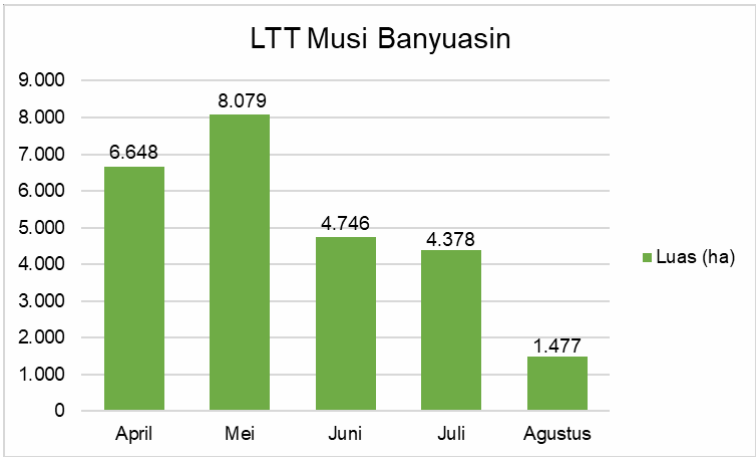

Gambar 6. Dinamika LTT Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat bahwa capaian LTT di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung rendah. Berdasarkan laporan LTT pada paruh tahun pertama 2025, target LTT Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada bulan Juli seluas 18.171 ha, sementara total capaian LTT untuk Kabupaten Muba baru tercapai sekitar 18,18% dari target. Rendahnya capaian LTT, terutama di Kabupaten Muba dapat disebabkan sebagian karena lahan sawah masih tergenang air (banjir) karena merupakan sawah rawa,

sehingga belum dapat ditanami padi. Selain itu, lambatnya pelaporan LTT maupun capaian program strategis Kementerian Pertanian seperti CSR dan OPLAH di Kabupaten Muba disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan. Masih terbatasnya kapasitas dan kemampuan petani dalam melakukan dan mengikuti digitalisasi pertanian merupakan salah satu kendala yang ada di Kabupaten Muba. Petani dan penyuluh masih belum sepenuhnya familiar dalam membaca peta maupun melakukan poligonisasi lahan sawah melalui aplikasi digital, sehingga proses identifikasi dan pemetaan lahan yang merupakan bahan pendukung dalam laporan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 808 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian No 109 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP Agroklimat) ditunjuk sebagai penanggungjawab program swasembada pangan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sejak September 2025, kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di BRMP Agroklimat berpindah lokasi ke Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan memiliki target LTT reguler seluas 19.038 ha, Oplah 2025 1.000 ha, Oplah 2024 4.384 ha, serta target brigade pangan (BP) sebanyak 22 pada tahun 2024 dan sebanyak 5 BP pada tahun 2025.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh penyuluh dan dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, luasan LTT selama September - Desember 2025 dapat dilihat pada gambar 7. Rendahnya capaian target LTT pada bulan September di Kabupaten Katingan disebabkan terbatasnya sumber air tawar di lahan saat musim kemarau, terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai yang memiliki yang merupakan lahan sawah terluas di Kabupaten Katingan.

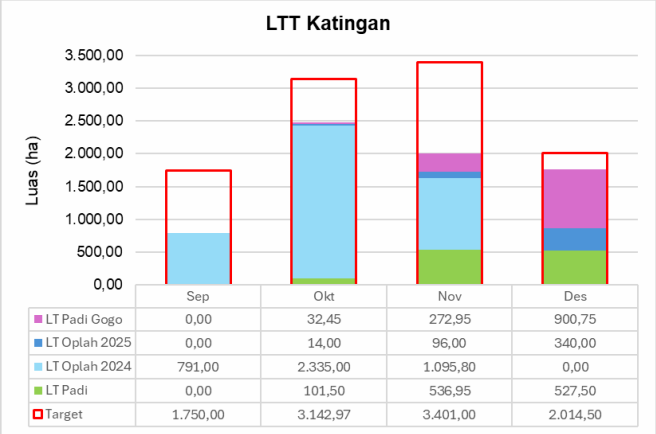

Gambar 7. LTT Kabupaten Katingan

Pada bulan Oktober terjadi peningkatan LTT yang cukup signifikan dibandingkan bulan September. Kenaikan tersebut terutama berasal dari LTT pada lahan OPLAH 2024 dan LTT reguler padi sawah, dengan tambahan kontribusi LTT dari padi gogo dalam luasan yang lebih kecil. Luasan LTT pada bulan Oktober telah mengalami peningkatan, realisasi LTT pada bulan Oktober mencapai 79,26% dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa proses percepatan tanam mulai berjalan, namun masih dipengaruhi oleh faktor kesiapan lahan dan penyesuaian waktu tanam oleh petani. Selain itu, tingginya luasan tanam pada bulan Oktober juga karena bersamaan dengan musim tanam I reguler di Kabupaten Katingan.

Pada bulan November, realisasi LTT kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Oktober yaitu sebesar 58% dari target. Sementara itu, pada bulan Desember, luas tambah tanam berkurang dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini

dapat disebabkan oleh beralihnya sebagian petani pada fase pemeliharaan tanaman serta berkurangnya aktivitas tanam baru menjelang akhir periode musim tanam. Luas tanam pada bulan Desember didominasi tanam padi gogo khususnya pada wilayah dengan tipe lahan tadah hujan dan lahan kering. Meski secara luasan rendah, namun persentase capaian luas tanam dengan target pada bulan Desember menjadi yang paling tinggi yaitu sebesar 86%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi pendampingan lapangan serta dukungan benih mulai memberikan dampak terhadap perluasan tanam, terutama pada wilayah yang sebelumnya terkendala ketersediaan air pada awal musim tanam.

Petani kabupaten Katingan masih dipengaruhi cara budidaya secara sosio kultural yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Varietas lokal dengan umur yang lebih lama dibanding varietas unggul masih dipertahankan. Apabila varietas unggul berumur 90-120 HST, varietas lokal dapat berumur sampai 6 bulan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosio-historis untuk budidaya padi secara berdampingan antara varietas lokal dan varietas unggul, tentu juga disertai sentuhan modernisasi pertanian melalui mekanisasi, teknologi pengelolaan air yang tepat dan pendampingan secara kontinyu.

Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan untuk melaporkan progres dan evaluasi capaian LTT. Rapat pada umumnya membahas capaian LTT yang diperoleh dibandingkan pada target pada bulan tersebut, kendala, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai target program strategis kementerian pertanian mendukung swasembada pangan. Rapat koordinasi dilakukan setiap minggu secara daring melalui zoom meeting yang menghadirkan Tenaga Ahli Menteri, Ketua dan Wakil Koordinator Pelaksana Satgas Swasembada Pangan (SSP), Ditjen LIP, Ditjen TP, Ditjen PSP, PJ Provinsi, PJ Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Selain itu, rapat juga dilakukan secara langsung untuk lingkup capaian LTT Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada tanggal 9 - 10 Oktober 2025. Pada rapat dibahas mengenai Evaluasi dan Pemantapan Data Capaian Realisasi LTT (Lahan Tambah Tanam) yang merupakan merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian dalam percepatan pertanaman padi di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Pembentukan Brigade Pangan. Pembahasan kegiatan turut menyoroti pemanfaatan aplikasi laporan utama Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) sebagai rujukan laporan luas tambah tanam (LTT) harian, di mana Penanggung Jawab Swasembada kabupaten bersama dinas terkait melakukan koordinasi rutin untuk memastikan kesesuaian data antara rekapitulasi aplikasi dan rekap bulanan, serta melakukan verifikasi dan perbaikan atas setiap selisih data yang ditemukan.

Selain itu, disampaikan perkembangan pelaksanaan konstruksi Cetak Sawah Rakyat (CSR) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan target 71.041 ha dan adendum kontrak sebesar 66.198,69 ha, yang menjadi dasar dalam penyiapan pembentukan Brigade Pangan (BP) serta perencanaan kebutuhan alat dan mesin pertanian pada lokasi CSR, termasuk pendataan jumlah brigade, personel, dan pemenuhan persyaratan administratif. Pada kesempatan yang sama, dilaporkan pula progres konstruksi Optimasi Lahan (OPLAH) Kabupaten Katingan hingga 25 September 2025 yang telah mencapai 51 persen, yang diikuti dengan penginputan realisasi harian LTT reguler sejak Oktober 2024 melalui aplikasi laporan utama.

Gambar 8. Dokumentasi rapat koordinasi

Rapat koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dan Penyuluh melalui rapat koordinasi (rakor). Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Katingan. Pada rakor ini dibahas strategi untuk mencapai target LTT pada bulan Desember di enam kecamatan Kabupaten Katingan, yaitu Mendawai, Katingan Kuala, T.S Garing, Katingan Tengah, Tasik Payawan, dan Pulau Malan. Pada bulan Desember, Kab. Katingan memiliki target LTT sebesar 2.500,55 ha. Rakor ini juga bertujuan untuk menyelaraskan data laporan LTT penyuluh dan DKPP yang dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Pada rakor juga disampaikan kendala utama dalam rekap data luasan LTT adalah kurangnya SDM yang bisa menggunakan teknologi atau aplikasi pelaporan data yang ada, sehingga laporan kerap kali terhambat dan kurang terdokumentasi dengan baik.

Gambar 9. Rapat koordinasi LTT Kabupaten Katingan

Monitoring Lapang

Monitoring lapang dilakukan sebanyak tiga kali selama periode September - Desember 2025. Monitoring lapang pertama dilakukan pada tanggal 15 – 18 Oktober 2025 yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kendala pelaksanaan LTT dan program strategis Kementerian Pertanian di Kabupaten Katingan. Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan (DKPP) dan KODIM 1019 Katingan dilakukan di Kantor DKPP Katingan pada tanggal 15 Oktober 2025. Pada koordinasi itu dilaporkan bahwa lokasi OPLAH 2024 terfokus di Kecamatan Katingan Kuala sekitar seluas 3000 ha, sedangkan OPLAH 2025 lokasi lahan tersebar di 3 kecamatan lain di Kabupaten Katingan.

Salah satu kendala LTT di Kabupaten Katingan adalah faktor sosial-budaya Masyarakat, terutama masyarakat lokal Kabupaten Katingan yang hanya menanam padi sekali setahun dengan varietas lokal. Masyarakat belum merasakan urgensi maupun keuntungan dari menanam padi di luar masa tanam yang biasanya dilakukan. Rendahnya harga gabah yang dibeli oleh Bulog juga menjadi penyebab petani lokal tidak merasa kurang adanya keuntungan menanam padi varietas genjah dibanding padi lokal.

Masyarakat pendatang/transmigran lebih terbuka terhadap arahan LTT, terutama di Katingan Kuala.

Selain faktor sosial-ekonomi, faktor alam juga menjadi salah satu kendala untuk mencapai target LTT di Kabupaten Katingan. Masa tanam regular pada umumnya terjadi pada bulan Oktober – Maret bersamaan dengan musim hujan. Sedangkan, pada musim kemarau, petani cenderung sulit melakukan pertanaman karena minimnya curah hujan sehingga air asin masuk ke saluran, akibatnya air pada saluran tidak dapat digunakan untuk budidaya padi karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanah dan tanaman. Di Kecamatan Katingan Kuala, sudah ada pintu air otomatis dari BBWS melalui program SIMURP namun belum optimal menahan air asin karena adanya kerusakan pada pintu. Selain itu, belum adanya pintu air pada saluran tersier juga menambah kemungkinan intrusi air asin ke lahan sawah. Selain itu, banjir akibat air pasang juga sempat terjadi di lahan OPLAH 2025 di Kecamatan Bendahara yang menyebabkan tidak bisa tanam.

Penanaman yang tidak serentak juga memicu adanya serangan hama tikus pada tanaman padi. Keterbatasan alsintan juga menyebabkan pertanaman terhambat karena harus bergiliran dengan yang lain. Kendala juga muncul dari sektor pelaporan LTT, kurang jelasnya mekanisme perhitungan dan pelaporan LTT juga menjadi kendala lambatnya pelaporan dan perbedaan data yang diberikan, sehingga perlu adanya sinkronisasi data

Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring lapang LTT di Kecamatan Katingan Kuala sebagai kecamatan dengan LBS terluas di Kabupaten Katingan. Monitoring diawali dengan diskusi bersama penyuluh, babinsa, dan perwakilan brigade pangan di UPTD Pegatan. Pada diskusi tersebut disampaikan kondisi BP yang ada di Kecamatan Katingan Kuala. Pada tahun 2025 akan dibentuk 2 brigade pangan (BP) tambahan di Kuala Katingan, yaitu di Kampung Tengah dan Kampung Keramat dari 24 BP yang sudah ada. Target BP tahun 2024 adanya peningkatan IP menjadi IP 3 dan produksi tetapi belum berhasil karena kondisi alam dan sosial-budaya petani. Selain itu, diperlukan adanya payung hukum dan badan hukum untuk pelaksanaan dan pembentukan BP. Belum adanya badan hukum untuk BP, sehingga kepastian hukum untuk pelaksanaan program tersebut belum ada. Dibutuhkan alsintan yang dapat digunakan untuk mengolah lahan dengan genangan tinggi, karena lahan sawah di Katingan Kuala merupakan sawah pasang surut.

Kunjungan lapang dilakukan di lahan sawah Katingan 1, Kampung Tengah, dan Kampung Kramat yang merupakan representasi lahan sawah yang melakukan pertanaman pada MT 3 dan OPLAH 2024, Lokasi pertanaman pada MT 1, serta Lokasi OPLAH 2025. Masalah utama di Katingan Kuala adalah kondisi pasang surut yang menyebabkan intrusi air asin masuk ke lahan. Lahan sawah di Katingan Kuala terkendala adanya intrusi air asin dan tidak adanya sumber air tawar saat musim kemarau sehingga tidak dapat dilakukan pertanaman. Belum adanya biaya untuk membangun sumur dalam sebagai sumber air tawar untuk budidaya padi pada musim kemarau. Diperkirakan butuh sekitar 50 juta untuk satu sumur.

Gambar 10. Monitoring lapang LTT di Kecamatan Katingan Kuala

Monitoring lapang kedua dilakukan di Kecamatan Pulau Malan dan TS Garing pada tanggal 19 November 2025. Monitoring dilakukan oleh tim BRMP Agroklimat dan tim DKPP Kab. Katingan, terutama pada lahan padi gogo di kedua kecamatan tersebut. Pada saat observasi Lapang di desa Manduing Taheta, Kecamatan Pulau Malan telah dilakukan tanam padi Gogo seluas 2 Ha dengan sistem tugal. Dengan benih disemai di tempat terpisah dari ladang. Berdasarkan data panen tahun 2024, hasil panen mencapai 5 ton/ha. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan land clearing dan levelling lahan. Sehingga budidaya dapat optimal, selain itu peralatan semprot untuk pupuk sekaligus pestisida digunakan untuk memudahkan dalam penangan hama dan kesuburan. Kemudian diperlukan adanya penambahan tanggul lahan secara keliling untuk mengantisipasi banjir yang meluap ke lahan, karena ketinggian maksimum muka air tergenang sampai 1.2meter dari lahan sekarang, mengingat lahan ini juga sangat dekat dengan Sungai Katingan.

Lokasi kedua observasi lapang berada di desa Pendahara, Kecamatan. Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan yang merupakan daerah irigasi dari BBWS Kalimantan I serta merupakan lahan yang mendapat bantuan Optimasi lahan tahun 2025. Lokasi ini sudah dilengkapi sarana prasarana irigasi dan drainase. pada saat observasi telah dibangun sumur bor dengan sistem pompa tenaga surya dengan 4 sumur bor dibangun untuk melayani potensi sawah sekitar 200 Ha. Adanya prasarana ini sangat berpotensi meningkatkan indeks pertanaman menjadi IP 300.

Gambar 11. Monitoring lapang di Pulau Malau dan TS Garing

Monitoring ketiga dilakukan di Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala pada tanggal 15 - 16 Desember 2025. BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian didampingi Penyuluh Pertanian Lapang, Babinsa dan Brigade Pangan melakukan Monitoring dan Evaluasi Lapangan untuk mengidentifikasi kendala yang dapat menghambat LTT baik dari segi realisasi ataupun laporan data di lapangan. Monitoring di Kecamatan Mendawai dilakukan di lahan OPLAH 2025 yang dikelola BP Tani Sejahtera. Dari luasan sekitar 175 ha, sebanyak 20 ha sudah mulai tanam sedangkan sebagian sisanya sudah proses olah tanah. Beberapa kendala yang ada di lahan OPLAH 2025 yaitu kurangnya ketersediaan alsintan sehingga memperlambat proses olah tanah. Sementara itu, lahan LTT Oplah dan reguler di Katingan Kuala sudah tanam semua dan diperkirakan akan panen pada akhir Januari 2026.

Bantuan Benih Biosalin

Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring, BRMP Agroklimat memberikan bantuan benih Biosalin 2 Agritan kepada petani di Kecamatan Katingan Kuala sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap kondisi lahan pesisir dan lahan pasang surut dengan salinitas yang cukup tinggi. Selain tahan salinitas, benih biosalin juga tahan terhadap wereng dan hawar daun dengan masa panen genjah (105 - 107 hari) dan potensi hasil tinggi yang dapat mencapai hingga 9 ton/ha GKG. Bantuan benih yang diberikan berjumlah 20 kg yang merupakan benih STock Seed (SS) label ungu hasil pengembangan BB Padi di Sukamandi.

Benih tersebut kemudian diuji cobakan untuk ditanam di lahan sawah di Katingan Kuala. Sebanyak 10 kg benih ditanam di lahan milik Pak Rasiyam dari Poktan Sumber Rejeki di Desa Jaya Makmur, Katingan Kuala. Benih biosalin 2 agritan ditanam di lahan seluas 0,5 ha dengan metode tabela (tanam benih langsung) pada tanggal 3 November 2025. Gambar 6, menunjukan gambar foto kondisi lahan ketika benih baru saja ditanam (a), berumur 24 HST (b), dan 42 HST (c). Benih Biosalin 2 AGritan baru pertama kali ditanam di Katingan Kuala dan pertumbuhan dilaporkan berjalan normal dan padi dinilai dapat beradaptasi dengan baik.

Gambar 12. Hasil tanam benih biosalin di Desa Jaya Makmur

Pendampingan Mobilisasi Alsintan

Kegiatan mobilisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan capaian program Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025 di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mobilisasi alsintan diarahkan kepada Brigade Pangan di wilayah Katingan Kuala sebagai salah satu sentra produksi padi yang memiliki peranan strategis dalam peningkatan realisasi tanam. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11–13 Desember 2025 dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kabupaten Katingan, serta perwakilan Brigade Pangan.

Tujuan utama kegiatan adalah memastikan pemanfaatan alsintan secara efektif dan efisien guna mempercepat proses olah tanah, tanam, dan panen, sekaligus memperkuat dukungan operasional Brigade Pangan di tingkat lapangan. Dalam

pelaksanaan kegiatan, juga disampaikan arahan kepada pengelola Brigade Pangan agar alsintan digunakan secara terjadwal, berbagi pakai, serta diprioritaskan pada kawasan berpotensi tanam untuk mendukung peningkatan realisasi LTT.

Gambar 13. Serah terima alsintan di DKPP Katingan

Melalui kegiatan ini, dilakukan distribusi dan penyerahan alsintan kepada beberapa Brigade Pangan di Kecamatan Katingan Kuala. Jenis alsintan yang dimobilisasi meliputi: Drone (2 unit), Power Thresher (20 unit), Traktor Roda 4 (24 unit), serta Wheeled Crawler Tractor / XCT-110 (32 unit) yang dialokasikan pada sejumlah desa dan kelompok Brigade Pangan sesuai kebutuhan lapangan dan kapasitas pengelolaan (Lampiran 1). Pendataan distribusi dilengkapi dengan identitas unit, nama manager brigade, serta nomor rangka dan nomor mesin untuk memastikan tertib administrasi dan kejelasan penanggung jawab sarana.

Mobilisasi dilakukan dari DKPP Katingan menggunakan truk derek (tow truck) ke Pelabuhan Kasongan dan dilanjutkan menggunakan LCT (Landing Craft Transport) ke dermaga Katingan Kuala. Secara umum, kegiatan mobilisasi alsintan ini berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pengelola Brigade Pangan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa keberadaan alsintan mampu meningkatkan kesiapan sarana mekanisasi di wilayah Katingan Kuala, mempercepat proses pengolahan lahan dan tanam, serta memperkuat dukungan operasional program LTT di Kabupaten Katingan. Ke depan, diperlukan pendampingan teknis lanjutan terkait jadwal operasi, pemeliharaan, dan monitoring pemanfaatan alsintan agar kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian dapat optimal.

Gambar 14. Mobilisasi alsintan

3.5. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian merupakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tani, terutama petani dan penyuluh melalui bimbingan teknis (bimtek) untuk dapat meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani mendukung swasembada pangan nasional. Pada tahun 2025, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melakukan tiga kegiatan bimtek, yang dilaksanakan di Sukabumi, Musi Banyuasin, dan Katingan.

Bimtek Sukabumi

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Kabupaten Sukabumi diawali dengan tahap pra-pelaksanaan melalui koordinasi teknis dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Juli 2025. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tema, kebutuhan materi, serta dukungan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kondisi lapangan dan prioritas program strategis Kementerian Pertanian di wilayah Sukabumi. Pada pertemuan tersebut, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan Dinas Pertanian membahas kondisi capaian LTT, tantangan keterbatasan sumber daya air terutama di wilayah selatan Sukabumi, serta urgensi penguatan kapasitas penyuluh dan petani melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pertemuan pra-pelaksanaan juga diikuti dengan survey lokasi kegiatan di Auditorium Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi untuk memastikan kesiapan tempat, sarana, dan teknis penyelenggaraan kegiatan.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa tema yang diambil yaitu Optimasi Luas Tambah Tanam Padi Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian Modern Mendukung Swasembada Pangan. Kemudian materi bimtek difokuskan pada tiga topik utama, yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Adaptif untuk Perencanaan Tanam (SIAP TANAM), identifikasi dan pemanfaatan sumber daya air untuk budidaya tanaman, serta teknologi irigasi Alternate Wetting and Drying (AWD) sebagai strategi efisiensi pemanfaatan air pada budidaya padi. Pemilihan materi ini didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, khususnya keterbatasan air dan kerentanan lahan terhadap perubahan iklim, sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target LTT di Kabupaten Sukabumi.

Gambar 15. Koordinasi dan perencanaan kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Kegiatan bimtek dilaksanakan pada 31 Juli 2025 di Auditorium Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, yang diikuti 69 peserta yang terdiri atas penyuluh, petani, dan aparat teknis di lingkup UPTD Pertanian Wilayah IV yang mencakup kecamatan Warungkiara, Bantargadung, Simpenan, Pelabuhanratu, Cikakak, dan Cisolok. Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh Rima Purnamayani, S.P., M.Si. selaku kepala BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan dilanjutkan pembukaan dan pengarahan oleh

Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi yaitu Sri Hastuti Harahap, SP., MSE., MA. Acara dilanjutkan dengan sesi pre-test, dan penyampaian tiga materi utama oleh narasumber. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Tanam Berbasis Data Agroklimat dan Hidrologi melalui SIAP TANAM dengan narasumber Adang Hamdani, S.P., M.Si. dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi
2. Irigasi Alternate Wetting and Drying (AWD): Strategi Efisiensi Sumber Daya Air untuk Budidaya Padi Berkelanjutan dengan narasumber Iman Muhardiono, MPSDA dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi
3. Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Budidaya Tanaman dengan narasumber DR. Budi Kartiwa, CESA dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN

Gambar 16. Pelaksanaan bimtek Kabupaten Sukabumi

Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi diskusi dengan peserta dan post- test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan, dengan persentase kelulusan meningkat dari 58% pada pre-test menjadi 76% pada post-test, terutama pada materi AWD. Evaluasi kepuasan peserta juga menunjukkan penilaian baik hingga sangat baik pada aspek penyelenggaraan, narasumber, dan materi dengan persentase 88–90%.

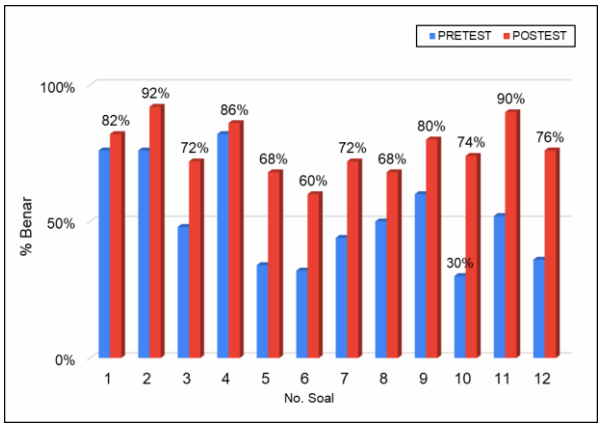

Gambar 17. Grafik peningkatan pengetahuan peserta bimtek

Beberapa kendala yang muncul antara lain keterlambatan waktu kegiatan, kendala teknis audio, serta kesulitan sebagian peserta dalam pengisian pre-test dan post-test, yang diatasi melalui penyesuaian teknis dan pendampingan langsung. Peserta juga menyampaikan kebutuhan sesi praktik lapang agar materi lebih aplikatif, yang direkomendasikan sebagai penguatan pada pelaksanaan Bimtek berikutnya.

Bimtek Musi Banyuasin

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin diawali dengan koordinasi pra-pelaksanaan antara Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan tema kegiatan, tujuan pelaksanaan, pemilihan materi yang relevan dengan kebutuhan lapangan, penentuan narasumber, sasaran peserta, serta pengaturan teknis dan persiapan perangkat pendukung penyelenggaraan kegiatan agar pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Kerja sama antar-lembaga ini menjadi dasar pelaksanaan bimtek yang diarahkan untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui pemanfaatan digitalisasi pertanian, khususnya dalam memperbaiki kualitas pelaporan dan meningkatkan efektivitas pencapaian target program di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bimtek dilaksanakan pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di Auditorium Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dinas kabupaten, koordinator penyuluh pertanian, penyuluh pertanian, serta perwakilan petani dari Kecamatan Sekayu, Lais, Babat Toman, dan Lawang Wetan. Komposisi peserta tersebut mewakili pelaku utama dan pendamping lapangan yang secara langsung terlibat dalam perencanaan tanam, pelaporan LTT, dan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian di tingkat wilayah. Tema bimtek yang diambil yaitu mengenai, "Peningkatan Kapasitas SD Pertanian Melalui Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian". Materi Bimtek disampaikan oleh tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, meliputi:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Tanam berbasis data agroklimat dan hidrologi melalui SIAP TANAM dengan narasumber Dariin Firda, S.Si, M.Sc dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
2. Pengenalan Teknologi Data Spasial untuk Digitalisasi Lahan Pertanian sebagai penguatan kemampuan pemetaan LTT dan poligonisasi lahan dengan narasumber M. Adrian Munaf Karim, MPSDA dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
3. Mekanisme Pelaporan LTT melalui aplikasi e-Pusluh serta penumbuhkembangan Brigade Pangan di lokasi Cetak Sawah Rakyat yang dibawakan oleh Antaria Marsega, S.P dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketiga materi tersebut dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi daerah, yaitu keterlambatan pelaporan, kesenjangan data LTT, serta terbatasnya kemampuan peserta dalam membaca peta digital dan melakukan pelaporan berbasis sistem. Pelaksanaan Bimtek diawali oleh laporan kegiatan oleh Rima Purnamayani, S.P., M.Si. selaku Kepala BRMP Agroklimat dan Hidrologi dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dengan sesi pembukaan, dilanjutkan pemaparan materi inti dan diskusi interaktif.

Gambar 18. Pelaksanaan bimtek Kabupaten Muba

Dari pengolahan data hasil pre-test peserta kegiatan di Kabupaten Muba menunjukan peserta yang lulus pretest sebanyak 72%. Hasil pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam terkait materi meningkatkan pemahaman peserta bimtek dan menghasilkan peserta lulus post-test sebanyak 82%, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan. Berdasarkan grafik pada gambar 13, hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap ketiga materi yang diberikan, khususnya terkait penggunaan SIAP TANAM untuk perencanaan tanam adaptif iklim dan pengenalan pemetaan spasial untuk penentuan LTT. Evaluasi kepuasan peserta juga memperlihatkan bahwa materi, metode penyampaian, dan relevansi topik dinilai baik hingga sangat baik, terutama karena materi dianggap sesuai dengan kebutuhan lapangan dan membantu penyederhanaan proses pelaporan program strategis.

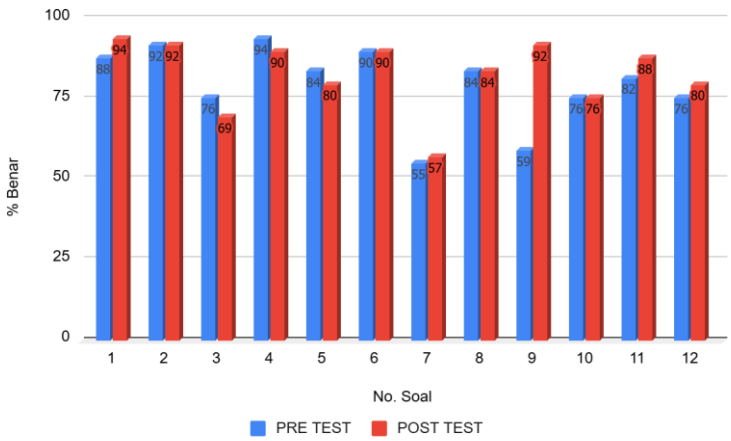

Gambar 19. Grafik persentase peningkatan pengetahuan peserta bimtek Muba

Selain peningkatan pemahaman teknis, evaluasi juga mencatat beberapa kendala yang muncul selama pelaksanaan, antara lain sebagian peserta masih memerlukan pendampingan dalam membaca peta di Avenza Maps dan melakukan poligonisasi lahan, serta masih adanya kesulitan dalam pengisian dan sinkronisasi pelaporan LTT melalui e-Pusluh. Kendala tersebut direspons melalui pendampingan langsung oleh narasumber dan tim teknis, penjelasan bertahap, serta simulasi sederhana agar peserta dapat mengikuti proses penggunaan aplikasi secara lebih praktis.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, direkomendasikan adanya sesi pelatihan lanjutan dengan fokus praktik lapangan untuk pemetaan spasial dan pelaporan LTT digital, serta pendampingan intensif kepada penyuluh dan operator kecamatan agar proses pelaporan LTT menjadi lebih cepat, akurat, dan selaras dengan data dinas. Melalui kegiatan ini, Bimtek di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu berkontribusi terhadap percepatan capaian target LTT sekaligus memperkuat implementasi digitalisasi informasi pertanian dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian.

Bimtek Katingan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Kabupaten Katingan mengambil tema Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian. Melalui Teknologi Pertanian Modern Mendukung Swasembada Pangan Kegiatan ini diawali melalui rangkaian pra-pelaksanaan yang meliputi koordinasi teknis dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan, persiapan administrasi, penentuan sasaran peserta, serta penyelarasan tujuan kegiatan terhadap kebutuhan program strategis Kementerian Pertanian di wilayah setempat. Tahapan koordinasi ini juga membahas kondisi lapangan, khususnya terkait dinamika LTT, pemanfaatan alsintan, serta kebutuhan penguatan kapasitas penyuluh dan Babinsa dalam mendukung percepatan program Kementerian Pertanian di tingkat tapak.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 18 November di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan. Peserta kegiatan terdiri atas penyuluh pertanian, dan Babinsa dari sembilan kecamatan sasaran, yaitu Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, T.S. Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, dan Sanaman Mantikei. Komposisi peserta tersebut dipilih untuk memastikan kebermanfaatan kegiatan bagi pelaku lapangan yang secara langsung terlibat dalam proses pendampingan program, pengelolaan kegiatan budidaya, dan pelaporan capaian LTT di tingkat kecamatan dan desa. Materi bimtek mencakup tiga fokus utama, yaitu:

1. Penguatan pemanfaatan SIAP TANAM sebagai sistem informasi perencanaan tanam berbasis iklim dan ketersediaan air dengan narasumber Dr. Wahyu Trinugroho dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
2. Pengenalan dan praktik awal poligonisasi lahan serta pemetaan spasial untuk mendukung ketepatan data LTT yang dibawakan oleh Budi Rahayu dari BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
3. Pemeliharaan dan operasional alsintan guna mendukung peningkatan efisiensi usaha tani dan produktivitas lahan dengan narasumber dari PT. Corin.

Penyusunan materi diarahkan untuk menjawab permasalahan lapangan, baik terkait adaptasi terhadap kondisi agroklimat maupun peningkatan ketertelusuran data kegiatan pertanian. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sesi pembukaan, dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber secara bertahap melalui paparan, tanya jawab, serta diskusi teknis terkait pengalaman peserta di lapangan. Peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terutama pada sesi yang berkaitan dengan pemetaan lahan dan penerapan rekomendasi teknis budidaya berbasis kondisi iklim setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum berbagi pengetahuan dan penguatan koordinasi antar-stakeholder pertanian di Kabupaten Katingan.

Gambar 20. Laporan pelaksanaan bimtek Kabupaten Katingan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, diperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, yang ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test serta umpan balik peserta. Dari pengolahan data hasil pre-test peserta kegiatan di Kabupaten Katingan menunjukan peserta yang lulus pre-test sebanyak 87%, sementara peserta lulus post-test sebanyak 100%, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan. Berdasarkan grafik pada Gambar 21, terdapat peningkatan persentase jawaban benar pada hasil post-test dibandingkan hasil pre-test di semua soal yang diberikan. Hal tersebut dapat menunjukan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah materi bimtek diberikan. Peningkatan pengetahuan yang paling signifikan adalah dari materi Pemeliharaan Alsintan, dengan hasil pre-test 56% dan post-test menjadi 86%, atau terdapat peningkatan pengetahuan peserta sebesar 30%.

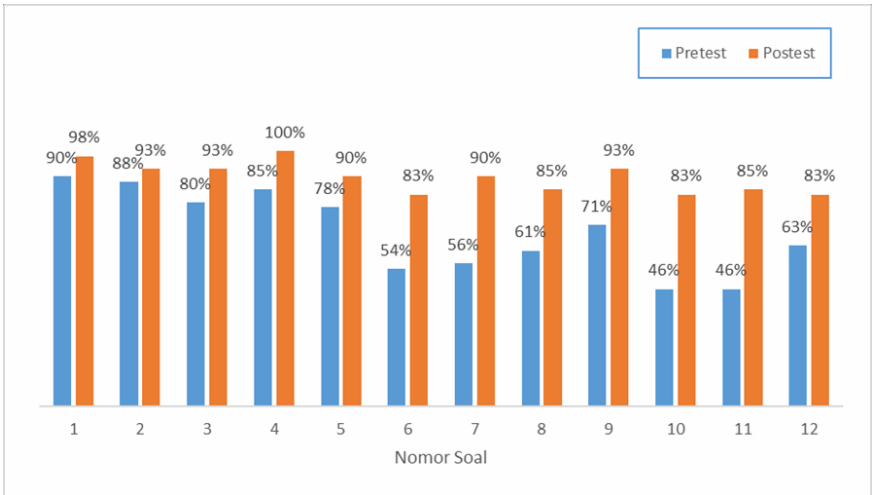

Gambar 21. Grafik persentase peningkatan pengetahuan peserta bimtek Kabupaten Katingan

Evaluasi kepuasan menunjukkan bahwa materi, metode penyampaian, dan relevansi kegiatan dinilai baik hingga sangat baik, khususnya karena dinilai mendukung pelaksanaan tugas pendampingan program strategis serta peningkatan kapasitas teknis penyuluh dan Babinsa di wilayah kerja masing-masing. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan peserta dalam penguasaan awal penggunaan aplikasi pemetaan spasial serta kebutuhan waktu praktik yang lebih panjang untuk penguatan kompetensi teknis. Sebagai solusi, dilakukan pendampingan langsung selama kegiatan, penjelasan ulang materi secara bertahap, serta rekomendasi tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan dan praktek lapang agar hasil bimtek dapat diimplementasikan secara lebih optimal di tingkat lapangan.

3.6. Kerjasama dengan Stakeholders

Kerjasama dengan stakeholders merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data dan informasi dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Melalui kemitraan BRMP Agroklimat mendorong penguatan sistem perencanaan tanam, peringatan dini, pengelolaan sumber daya air dan energi, dan penerapan inovasi berbasis data agroklimat. Kerja sama tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui kemitraan tematik dengan berbagai instansi serta kegiatan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah maupun perguruan tinggi.

SPT2E PLN

Sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden untuk mencapai swasembada energi sekaligus ketahanan pangan nasional, PLN bekerja sama dengan Kementerian Pertanian mencanangkan "Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi yang terintegrasi di dalam Ekosistem Co-firing Biomassa". Co-firing merupakan substitusi batubara dengan biomassa seperti wood pellet, cangkang sawit, sawdust (serbuk gergaji), dll. Upaya ini dilakukan karena swasembada energi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi energi, tetapi juga mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil seperti batubara menuju energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Mendukung pencapaiannya, sektor pertanian tidak saja berperan dalam mewujudkan pemenuhan pangan, namun juga menjadi tumpuan dalam mewujudkan keberlanjutan sistem pangan nasional sekaligus berkontribusi mengurangi kemiskinan, kekurangan gizi dan menjaga keseimbangan ekologis dan lingkungan. Potensi biomassa baik yang dihasilkan dari bidang pertanian maupun kehutanan sangat melimpah di Indonesia dan merupakan salah satu kekuatan ketahanan energi. Pemanfaatan biomassa sebagai energi dikembangkan PLN melalui konsep Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi. Pemanfaatan lahan suboptimal merupakan salah satu upaya mengatasi keterbatasan lahan pertanian, meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT), meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi emisi karbon, serta mengentaskan kemiskinan. Konsep ini menjadi kegiatan ekonomi baru dengan memberdayakan lahan suboptimal sebagai sumber penghasilan masyarakat melalui pemanfaatan ranting, daun, batang tanaman, dan hewan ternak. Sistem tanam yang dikembangkan PLN menggunakan sistem tumpang sari menggunakan tanaman pertanian yang ditanam bersama dengan tanaman energi yang juga dapat diintegrasikan dengan ternak serta memanfaatkan limbah agroforestri sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Setiap pihak yang berkepentingan harus menjalin kolaborasi agar terwujud ekosistem yang kokoh untuk dapat memanfaatkan potensi besar biomassa di tanah air. Sinergi Kementerian Pertanian dan PLN sangat signifikan dalam menyelaraskan dan mengakselerasi pengembangan konsep Sistem Pertanian Terpadu di seluruh Indonesia

sebagai wujud nyata mendukung ketahanan energi melalui pemenuhan kebutuhan biomassa untuk co-firing serta menggerakan ekonomi berbasis kerakyatan.

BRMP bersama dengan PLN melakukan pendampingan bersama dengan stakeholder terkait yakni petani, kelompok tani, desa, tani merdeka, dan juga dinas pertanian setempat. Diawali dengan pengenalan tanaman energi dan rantai pasok tanaman energi hingga sampai dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif PLTU setempat, Petani dan stakeholder lainnya yang terlibat memiliki kesepahaman yang sama dan menginisiasi penanaman tanaman energi di lahan yang ada.

BRMP membantu menyediakan benih tanaman sela yang merupakan pendamping tanaman energi yang menjamin keberlangsungan aktivitas lahan selama masa pertumbuhan tanaman energi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tanaman sela yang disediakan oleh BRMP antara lain jagung, kopi, dan serai wangi. Selain memanfaatkan tanaman sela untuk menunjang aktivitas perekonomian di lahan tanaman energi, daun dari tanaman energi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak di area lahan.

Selain penyediaan bibit tanaman, BRMP menugaskan Pegawainya untuk melakukan pendampingan dalam penanaman hingga pemeliharaan tanaman sela dan energi tersebut, dengan tujuan dapat berdampingan dan melengkapi kegunaan masing-masing. Seperti contoh, tanaman kopi merupakan tanaman yang membutuhkan naungan, yang dapat disediakan oleh tanaman energi seperti indigofera, kaliandra, dan gamal.

Sebagai upaya evaluasi kegiatan ini, BRMP bersama dengan PLN melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di beberapa lokasi pengembangan, diantaranya di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Lampung Selatan.

Monev di Kabupaten Sukabumi dilakukan di Kecamatan Cikidang dan Kecamatan Bojonggenteng. Monev dilakukan untuk memantau kondisi tanaman energi dan pangan kedua kecamatan tersebut. Tanaman indigofera dan gamal ditanam sebagai tanaman sela pada dua lahan pertanian kering di kedua kecamatan tersebut. Lahan milik Kelompok Tani Cipetir di Desa Cicareuh, Kecamatan Cikidang seluas 10 ha ditanami secara tumpangsari dengan tanaman kopi robusta. Sementara di Desa Barekah, Kecamatan Bojonggenteng dengan luas lahan 10 ha tanaman energi ditanam secara tumpangsari dengan tanaman singkong.

Gambar 22. Pemantauan tanaman energi dan kopi di Sukabumi, Jawa Barat pada Juli 2025

Gambar 23. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Bulan Desember 2025

Gambar 24. Kegiatan monitoring dan evaluasi di Lampung Selatan pada bulan Desember 2025

Kegiatan Monev di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan di Kecamatan Tanjung Sari dengan mengunjungi Koperasi Produksi Ternak (KPT) Maju Sejahtera yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan peternakan masyarakat. Pada kegiatan ini, ditekankan pentingnya penguatan terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SPT2E). Konsep ini menekankan pentingnya integrasi pertanian dan peternakan melalui pemanfaatan tanaman legum, khususnya indigofera, sebagai sumber pakan ternak. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani-ternak, menekan biaya produksi, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan.

Monev lapang juga dilakukan di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kawunganten. Hasil kegiatan monev menunjukkan bahwa pertanaman biomassa energi telah berjalan dan memberikan manfaat awal melalui integrasi tanaman sela jagung, dan juga bahan pakan ternak dari dedaunan tanaman energi. Tanaman energi yang ditanam adalah kaliandra, indigofera, dan gamal pada lahan seluas 10 ha. Namun keberhasilan pertumbuhan bibit masih menjadi isu utama akibat faktor musim kemarau, kualitas penanganan bibit, dan gangguan OPT. Penguatan aspek teknis budidaya, pemanfaatan residu biomassa, serta rencana pengembangan areal dan kelembagaan menjadi kunci untuk meningkatkan capaian indikator dan keberlanjutan program.

Di beberapa lokasi, Unit Biomassa telah berada dalam konteks program Hub Biomassa/BIODES. Namun kesiapan sebagai pemasok utama masih terbatas. Belum adanya offtaker dan belum terpenuhinya NIB (KBLI 46610) menjadi dua penghambat utama yang melemahkan posisi tawar. Struktur harga dan biaya yang tercatat menunjukkan operasional pengolahan berpotensi merugi apabila dijalankan tanpa penataan tata niaga dan efisiensi. Prioritas tindak lanjut adalah penguatan legalitas dan kepastian pasar, disertai peningkatan mutu agar BUMDes dapat naik kelas menjadi

pemasok utama. Sebagai perbaikan dan keberlangsungan dan pengembangan program Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SPT2E), perlu dilakukan intervensi rantai pasok oleh PLN agar hasil panen tanaman energi dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh petani dan stakeholder terkait.

BMKG

BMKG sebagai instansi yang berwenang dalam penyediaan data iklim nasional, merupakan mitra strategis BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam mendukung ketersediaan data agroklimat yang akurat dan berkesinambungan. Kerjasama yang terjalin meliputi diskusi mengenai berbagi pakai data iklim untuk keperluan analisis sektor pertanian, pelaksanaan pelatihan pengamatan dan pengoperasian instrumen ukur iklim bagi petugas lapangan, serta kolaborasi dalam penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) terkait tata cara pengamatan dan pengelolaan data iklim untuk pertanian.

Inisiatif tersebut merupakan langkah penguatan sistem data agroklimat terstandar yang diperlukan dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan, khususnya melalui pemanfaatan data iklim yang presisi, tertelusur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian. Kerja sama tersebut sekaligus sejalan dengan mandat kelembagaan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam penguatan basis data agroklimat nasional, yang salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi perumusan standar dan penyusunan dokumen teknis pengelolaan data iklim sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025.

Permentan Nomor 10 Tahun 2025 menyatakan bahwa pelaksanaan penyusunan Konsep Standar Nasional Indonesia menjadi salah satu fungsi BRMP AHP dalam mendukung modernisasi pertanian berbasis data agroklimat dan hidrologi pertanian yang presisi dan aplikatif. Standardisasi instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar instrument agroklimat dan hidrologi pertanian secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2025 mengamanatkan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian untuk merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) berjudul "Tata cara pengamatan dan pengelolaan data iklim untuk pertanian". RSNI ini penting untuk dirumuskan untuk memberikan prosedur pengamatan dan pengelolaan data agroklimat yang sistematis dan tertelusur dengan memperhatikan prinsip keseragaman dan keterbandingan data sesuai dengan kesepakatan World Meteorological Organization (WMO). Sebagai anggota WMO, Indonesia berkomitmen menjaga kualitas dan ketepatan data hasil pengamatan agroklimat.

Gambar 25. Harmonisasi RSNI Data Agroklimat bersama BMKG dan Kementerian Pekerjaan Umum

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian memulai kegiatan perumusan RSNI dengan menggelar kegiatan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait yaitu:

1. Kedeputian Bidang Klimatologi – BMKG,
2. Direktorat Informasi Perubahan Iklim – BMKG,
3. Direktorat Layanan Iklim Terapan – BMKG,
4. Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – BMKG,
5. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air – Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan harmonisasi RSNI Data Agroklimat dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 secara hybrid di Ruang Operasional KATAM BRMP AHP atau melalui meeting ID 862 1305 9132 dan passcode agroklimat. Tujuan kegiatan harmonisasi RSNI Data Agroklimat yaitu:

1. Menyamakan persepsi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan teknis tata laksana pengamatan dan pengelolaan data agroklimat
2. Meningkatkan wawasan tim konseptor dalam menyusun RSNI
3. Memperbaiki substansi teknis RSNI Data Agroklimat

Beberapa tanggapan terhadap dokumen RSNI Data Agroklimat pada kegiatan harmonisasi, sebagai berikut:

1. Kedeputian Bidang Klimatologi – BMKG
   - Agar RSNI ini tidak akan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna.
2. Direktorat Informasi Perubahan Iklim – BMKG
   - Pada draft RSNI yang disampaikan sudah mengakomodir Peraturan Kepala BMKG Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamatan dan Pengolahan Data Iklim.
   - Jika dianggap perlu untuk memuat tata cara perawatan dan pemeliharaan peralatan pengamatan data iklim, maka dapat menggunakan rujukan peraturan Kepala BMKG dengan seri yang sesuai.
   - Data iklim yang dihasilkan oleh BMKG apakah belum sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya sektor pertanian? Jika sudah sesuai maka tidak masalah jika tata cara pengamatan dan pengelolaan data iklim sesuai pada Perka tersebut diadopsi oleh RSNI ini.
3. Direktorat Layanan Iklim Terapan – BMKG
   - Direktorat layanan iklim terapan merupakan penyedia data iklim sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tertentu termasuk sektor pertanian.
   - Untuk penyusunan RSNI ini sebaiknya bekerjasama dengan kedeputian klimatologi karena berkaitan dengan teknis bagaimana cara menggunakan alat pengamatan data iklim dan membaca data tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – BMKG
   - Dengan adanya SNI ini apakah akan ada pihak-pihak lain yang akan melakukan pengamatan iklim di luar dari BMKG?
   - Pihak mana yang akan melakukan pemasangan dan pemeliharaan alat pengamatan data iklim?
   - RSNI ini mempunyai 2 pembahasan yang berbeda yaitu alat pengamatan dan metoda pengamatannya, apakah tidak terlalu luas?
   - Pemeliharaan alat pengamatan data iklim serta kalibrasi alatnya akan dilakukan oleh siapa?
5. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air – Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
   - Direktorat Bina Teknis Sumber Daya Air juga melakukan pengamatan beberapa unsur iklim dan mempunyai beberapa titik stasiun iklim.

- Unsur iklim yang diamati yaitu curah hujan, kelembaban udara, dan suhu udara.
- Stasiun iklim yang dimiliki Direktorat Bina Teknik SDA pada umumnya berada di sekitar hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan stasiun iklim BMKG umumnya berada di sekitar Lokasi Lapangan Penerbangan.
- Cara pengamatan dan pengelolaan data hasil pengamatan untuk unsur iklim yang diamati oleh Direktorat Bina Teknis SDA sudah sesuai dengan yang ada di dokumen RSNI.
- Direktorat Bina Teknis SDA mendukung adanya RSNI ini agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Tahapan perumusan RSNI dilanjutkan dengan membahas dokumen RSNI pada Rapat Teknis 1 yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2025 di ruang Rapat Lantai 2 BRMP SDLP. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komtek 65-23 Dr. Ir. Rahmawati, M.M dan dihadiri oleh perwakilan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari unsur pemerintah, produsen, konsumen, dan akademisi/pakar. Rapat Teknis 1 menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui perbaikan dokumen RSNI Tata Laksana Pengamatan dan Pengelolaan Data Agroklimat untuk selanjutnya dibahas kembali pada Rapat Teknis 2.

Pelaksanaan Rapat Teknis 2 dipimpin oleh Ketua Komtek 65-23 Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc. secara hybrid pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 BRMP SDLP atau melalui link zoom dengan meeting ID 893 1088 5905 dan passcode 356232. Rapat Teknis 2 ini menghasilkan kesepakatan bahwa RSNI ini dapat disetujui dengan perbaikan dan perlu adanya uji implementasi di lapang sebelum dibahas pada Rapat Konsensus. Uji implementasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan tata cara yang tertulis pada dokumen RSNI.

Uji implementasi dilakukan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan pertimbangan ketersediaan peralatan pengamatan data klimatologi untuk pertanian yang lengkap. Dari hasil uji implementasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025, memperoleh hasil bahwa RSNI ini mendapat nilai kepatuhan sebesar 96,15 dengan kategori "sesuai" yang artinya dokumen RSNI ini dapat diimplementasikan secara baik di lapangan.

Perumusan RSNI diakhiri dengan pembahasan dokumen pada Rapat Konsensus yang dilaksanakan 3 November 2025. Rapat dihadiri oleh seluruh tim konseptor, anggota Komite Teknis 65-23 Sumber Daya Lahan Pertanian, dan PIC dari Direktorat Pengembangan Standar Mekanika Energi Infrastruktur dan Teknologi Informasi (MEETII) Badan Standardisasi Nasional. Rapat konsensus dipimpin oleh Ketua Komite Teknis 65-23 dan diperoleh hasil kesepakatan untuk menjadikan RSNI ini dilanjutkan menuju tahapan Jajak Pendapat yang dikelola oleh BSN.

Gambar 26. Rapat teknis RSNI Data Agroklimat

Sejalan dengan penyusunan RSNI tersebut, dilakukan juga kunjungan lapang dan pelatihan penggunaan dan perawatan alat ukur iklim. Kunjungan lapang dilakukan ke stasiun iklim Dramaga milik BMKG untuk studi banding pengamatan iklim. Sementara pelatihan dilakukan menggunakan alat ukur yang dimiliki oleh BRMP Agroklimat, yaitu automatic weather station (AWS) dan sangkar meteorologi.

Gambar 27. Diskusi dan kunjungan lapang dengan BMKG

Pendampingan Teknologi

Pendampingan teknologi yang dilakukan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berperan strategis dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi teknis lintas pemangku kepentingan. Pada kegiatan pendampingan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BRMP memberikan asistensi teknis terkait adaptasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman pangan, antara lain melalui pengembangan SIAP TANAM sebagai sistem prediksi waktu tanam berbasis iklim, perhitungan neraca air untuk efisiensi penggunaan air irigasi, optimasi produksi, validasi pertumbuhan tanaman melalui standing crop berbasis citra, serta implementasi infrastruktur panen air dan teknologi irigasi hemat air AWD yang telah diuji di Patokbeusi, Subang. Melalui forum diskusi teknis, BRMP mendorong penguatan kolaborasi antara dinas perlindungan tanaman, BMKG, WFP, dan Ditlin Tanaman Pangan dalam pengembangan sistem peringatan dini (EWS), pemetaan genangan, kajian salinitas, serta rumusan kebutuhan teknologi budidaya adaptif di lahan rawa, pasang surut, dan kawasan rawan banjir. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi teknis, namun juga membangun jejaring kerja sama untuk integrasi sistem informasi iklim, OPT, dan banjir secara bertahap menuju skala nasional.

Gambar 28. Diskusi pendampingan teknologi

Selain itu, BRMP juga menjalankan pendampingan teknologi berbasis edukasi dan penguatan literasi agroklimat melalui kegiatan field trip mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Dalam kegiatan tersebut, BRMP memaparkan peran teknologi pengelolaan air, tantangan distribusi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta penerapan teknologi irigasi dan konservasi air yang mendukung keberlanjutan produksi pangan. Diskusi interaktif mencakup pengelolaan tata air di lahan rawan salinitas, pemanfaatan data agroklimat, hingga pengembangan peta infrastruktur panen air. Melalui kegiatan ini, BRMP tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga menyiapkan calon SDM pertanian yang memahami isu agroklimat modern serta membuka peluang kerjasama magang dan penelitian aplikatif di bidang swasembada pangan. Pendampingan teknologi yang dilakukan secara simultan pada ranah kebijakan, operasional lapangan, dan pengembangan kapasitas ini menjadi pondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan adaptasi sistem produksi pangan terhadap perubahan iklim, serta memperkuat keberlanjutan program strategis Kementerian Pertanian.

IV. PELAYANAN HUMAS DAN PENGELOLAAN INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Pelayanan Humas dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian merupakan kegiatan untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan informasi sumberdaya iklim dan air serta kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian kepada pengguna melalui publikasi tercetak, mengkomunikasikan melalui kegiatan pameran, taman display teknologi, website, media sosial dan melakukan kerja sama serta melaksanakan pelayanan prima keberbagai pihak.

Kegiatan PPID Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian merupakan kegiatan rutin yang menunjang tugas dan fungsi Balai. Tujuan kegiatan adalah menyebarluaskan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi sumberdaya iklim dan air agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat dan pengguna.

4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa, barang, dan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 19, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kerja masing-masing. Standar ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kualitas pelayanan belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaduan dari masyarakat maupun dunia usaha terkait beberapa aspek layanan, seperti:

1. Prosedur yang berbelit-belit dan kurang transparan;
2. Informasi yang kurang jelas dan tidak mudah diakses;
3. Fasilitas serta sarana dan prasarana yang masih terbatas;
4. Suasana lingkungan pelayanan yang kurang nyaman dan tidak menjamin kepastian hukum, waktu, serta biaya;
5. Adanya praktik diskriminatif dalam pemberian layanan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, diperlukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur guna menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi penyelenggara layanan publik. Indeks ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelemahan serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur mekanisme penyusunan IKM, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Mengacu pada dasar hukum tersebut, BRMP Agroklimat sebagai salah satu unit pelayanan publik di bawah Kementerian Pertanian turut melakukan survei IKM guna menilai kualitas layanan yang diberikan.

Link formular kuesioner seperti yang terdapat pada Gambar 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX9q313jwKPEpyq2gxBDQBygyKm9NhO7iW-O6S2Q2Uthc7tQ/viewform merupakan media resmi yang disediakan oleh BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian untuk pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Melalui formulir ini, masyarakat, mitra, maupun pengguna layanan dapat menyampaikan penilaian secara langsung terhadap kualitas layanan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

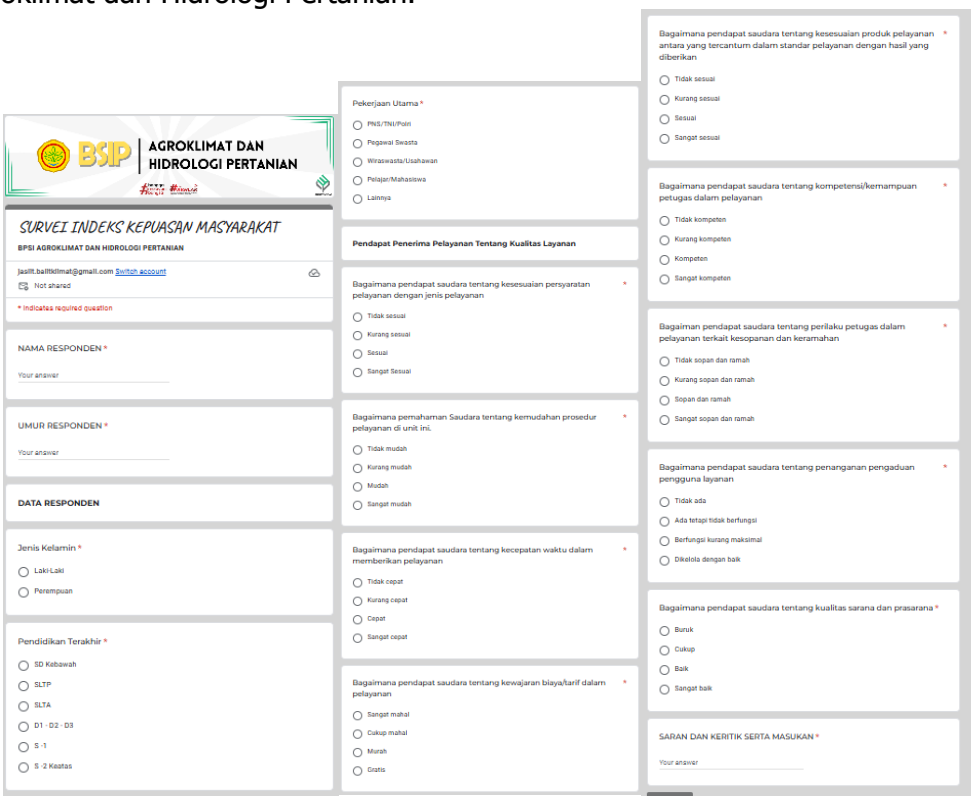

Gambar 29. Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat

Berikut adalah analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan unsur pelayanan pada tahun 2025 (Januari-Desember) di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian ditunjukan pada Tabel 11.

Tabel 11. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Januari – Desember 2025

Bulan	Indeks Kepuasan (%)								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Januari-Februari	82,26	83,06	82,26	87,10	81,45	82,26	83,87	94,35	84,68
Maret	79,55	77,27	79,55	90,91	79,55	79,55	81,82	93,18	81,82
April	82,14	78,57	82,14	89,29	75,00	82,14	82,14	92,86	82,14

Bulan	Indeks Kepuasan (%)								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Mei	85,71	85,71	89,29	96,43	89,29	89,29	92,86	96,43	92,86
Juni	92,19	92,19	92,19	93,75	89,06	93,75	93,75	98,44	92,19
Juli	89,29	85,71	92,86	100,00	89,29	92,86	92,86	96,43	92,86
Agustus	83,94	83,76	83,03	92,15	84,49	85,22	84,67	93,98	83,03
September	93,62	94,68	87,23	100,00	86,17	87,23	89,36	100,00	93,62
Oktober	85.71	91.07	85.71	92.86	85.71	87.50	91.07	100.00	94.64
November	91.18	91.18	91.18	94.12	86.76	91.18	92.65	97.06	91.18
Desember	80.00	80.83	80.00	81.67	82.50	83.33	83.33	89.17	83.33

- Unsur dengan kepuasan tertinggi adalah U8 (Penanganan Pengaduan) dan U4 (Biaya/Tarif) dan dengan skor masing-masing 95.21% dan 93.54% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mencerminkan bahwa transparansi biaya serta kecepatan respon terhadap pengaduan masyarakat telah menjadi kekuatan utama unit layanan.
- Unsur terendah adalah U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)) dengan skor 84.19%, berada di kategori Baik, dimana masih banyak ruang untuk peningkatan.
- Rata-rata unsur lainnya konsisten berada di kisaran 86.92 (Baik), menunjukkan bahwa mayoritas aspek pelayanan telah berjalan dengan baik, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan, terutama di aspek sistem/prosedur dan kualitas produk pelayanan.
- NRR Tertimbang Unsur berada di angka 3.51 atau 87.74%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan yang diberikan sudah memuaskan, namun masih banyak ruang untuk peningkatan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan BRMP Agroklimat.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas unsur layanan berada dalam kategori baik hingga sangat baik, dengan potensi peningkatan untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih optimal. Adapun diagram analisis indeks kepuasan masyarakat selama tahun 2025 ditunjukan pada Gambar 30-40 berikut.

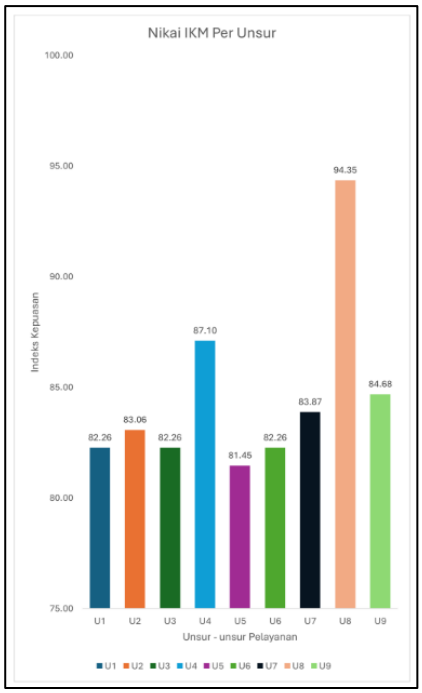

Gambar 30. Diagram Analisis IKM Bulan Januari – Februari 2025

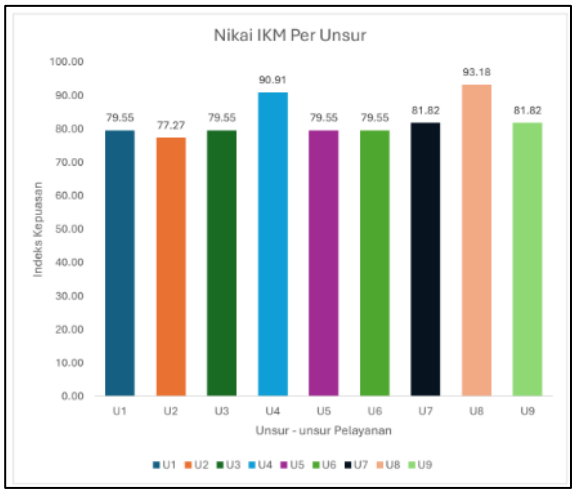

Gambar 31. Diagram Analisis IKM Bulan Maret 2025

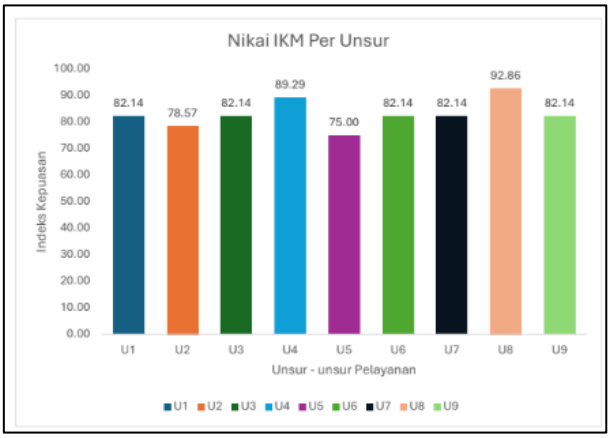

Gambar 32. Diagram Analisis IKM Bulan April 2025

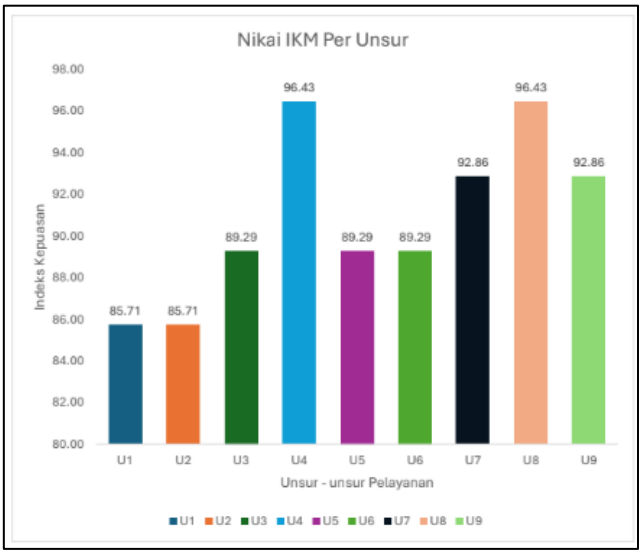

Gambar 33. Diagram Analisis IKM Bulan Mei 2025

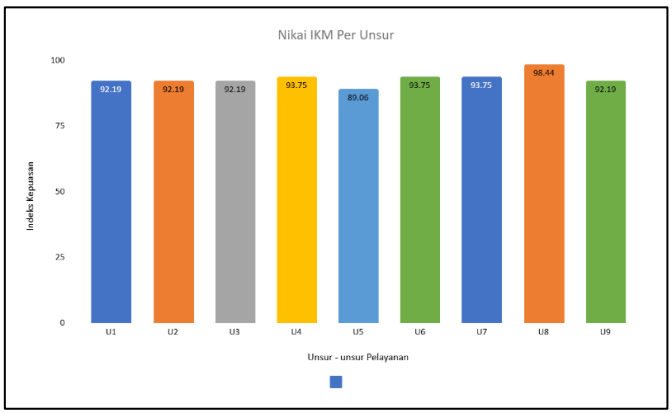

Gambar 34. Diagram Analisis IKM Bulan Juni 2025

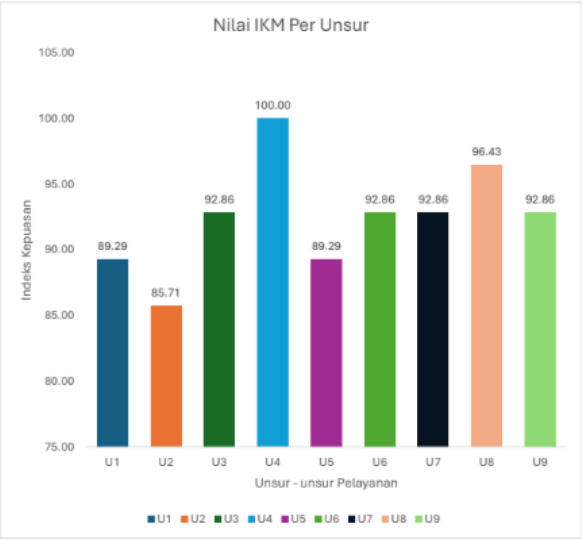

Gambar 35. Diagram Analisis IKM Bulan Juli 2025

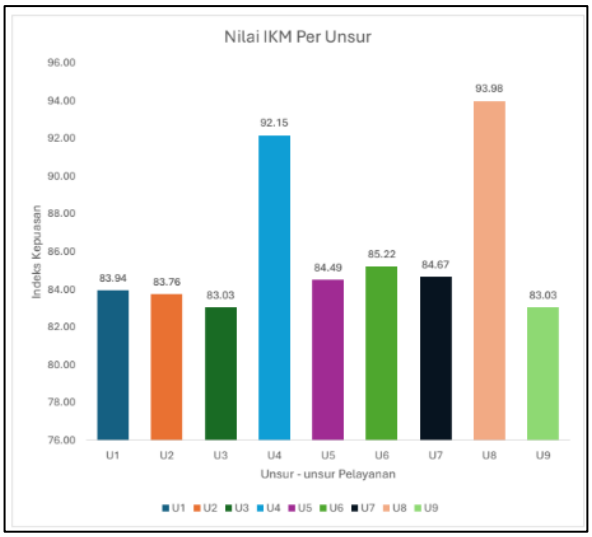

Gambar 36. Diagram Analisis IKM Bulan Agustus 2025

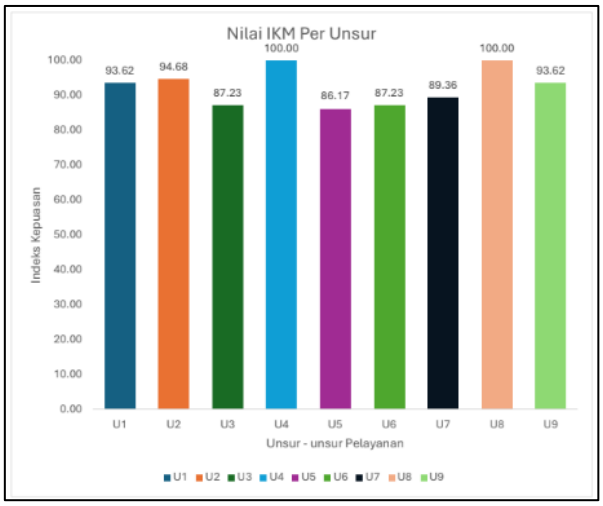

Gambar 37. Diagram Analisis IKM Bulan September 2025

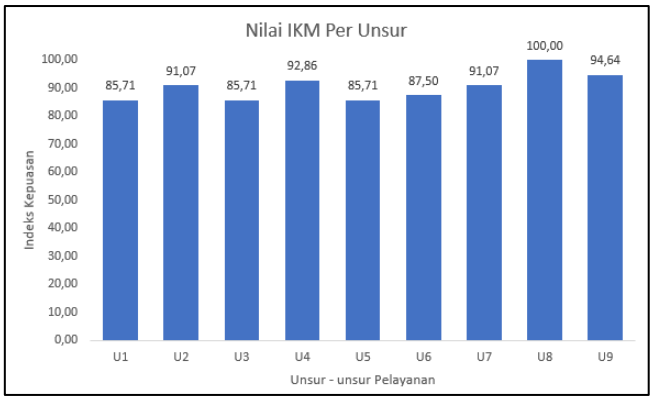

Gambar 38. Diagram Analisis IKM Bulan Oktober 2025

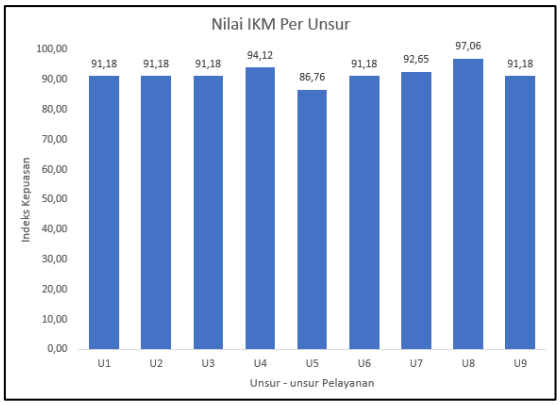

Gambar 39. Diagram Analisis IKM Bulan November 2025

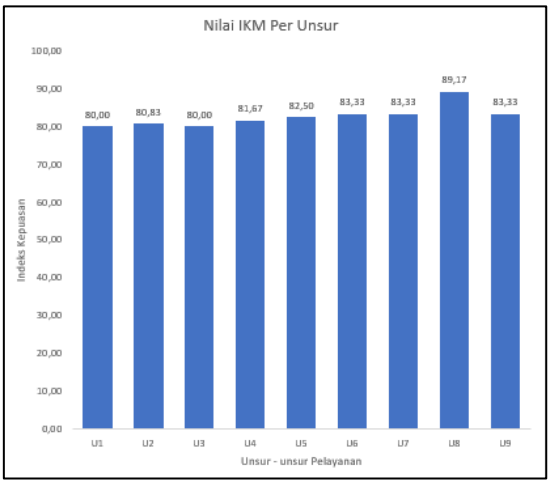

Gambar 40. Diagram Analisis IKM Bulan Desember 2025

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, BRMP Agroklimat telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan yang konkret dan terukur. Bukti pelaksanaan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip continuous improvement terhadap seluruh unsur pelayanan publik. Bukti-bukti tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyusunan dokumen dan panduan layanan, penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas dan pembenahan fasilitas, serta publikasi dan sosialisasi hasil tindak lanjut kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga kelompok bukti tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil SKM telah dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi pembenahan sistem, penguatan SDM, peningkatan fasilitas, serta keterbukaan informasi publik. Hal ini menjadi landasan penting bagi BRMP Agroklimat dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan publik menuju kategori "Sangat Baik" secara konsisten.

Gambar 41. Bukti Tindak Lanjut Hasil SKM

4.2. SPKP dan SPAK

Sebagai bagian dari komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian secara konsisten melaksanakan survei SPKP dan SPAK setiap triwulan. Kedua survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif dan kuantitatif terhadap kualitas layanan publik serta persepsi antikorupsi dari masyarakat pengguna layanan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional, yakni Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 04 Tahun 2023, serta ketentuan pelaporan internal lingkup BSIP Kementerian Pertanian. Selama tahun 2025 (Januari–Desember), responden berasal dari kalangan mahasiswa magang, mitra kerja, penyuluh pertanian, peneliti, dan pihak eksternal lainnya yang menggunakan atau menerima layanan dari BRMP Agroklimat.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan bebas dari korupsi, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian secara rutin melaksanakan survei evaluatif terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini bertujuan untuk menjaring umpan balik dari pengguna layanan terkait kualitas pelayanan maupun integritas penyelenggara layanan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan tata kelola kelembagaan. Dalam konteks ini, kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menjadi instrumen penting yang mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BRMP Agroklimat.

Link kuesioner https://bit.ly/SPAK-SPKPAgroklimat (Gambar 42) merupakan media resmi yang disediakan oleh BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian untuk pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP).

Melalui formulir ini, masyarakat, mitra, maupun pengguna layanan dapat menyampaikan penilaian secara langsung terhadap aspek kualitas layanan—seperti kejelasan prosedur, waktu layanan, dan sikap petugas—serta persepsi atas integritas dan transparansi penyelenggaraan layanan publik. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pemenuhan pelaporan reformasi birokrasi ke PPID Pusat Kementerian Pertanian. Data response dan hasil survei dapat dilihat pada Gambar 43.

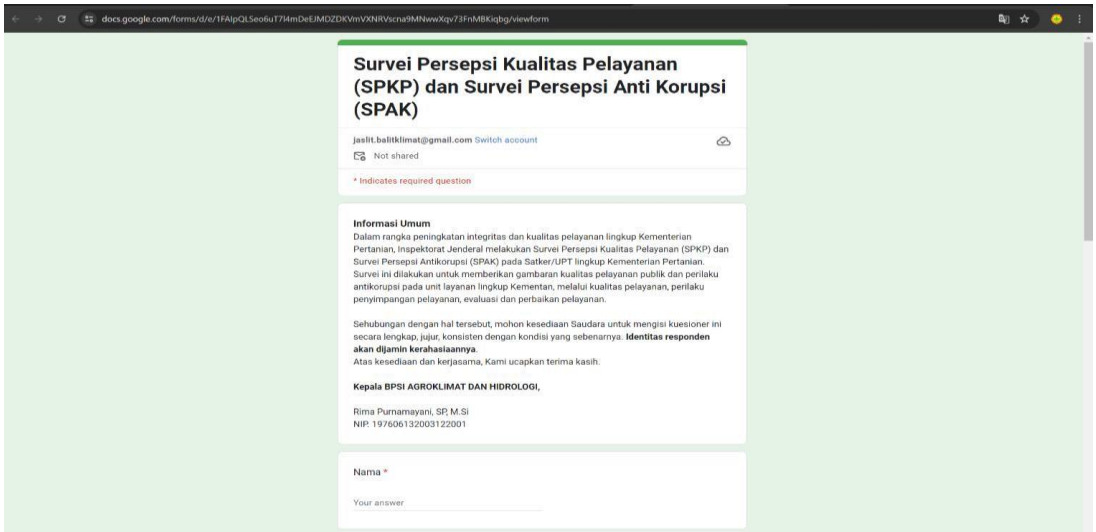

Gambar 42. Kuisioner SPKP dan SPAK

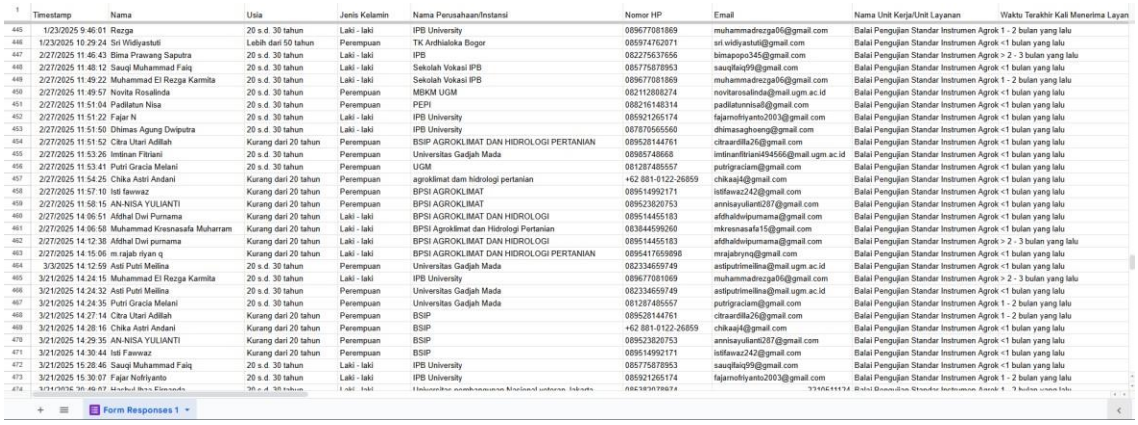

1	Timestamp	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Nama Perusahaan/Instansi	Nomor HP	Email	Nama Unit Kerja/Unit Layanan	Waktu Terakhir Kali Menerima Layan
445	1/23/2025 9:46:01	Rezga	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	089677081869	muhammadrezga06@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	1 - 2 bulan yang lalu
446	1/23/2025 10:29:24	Sri Widiyastuti	Lebih dari 50 tahun	Perempuan	TK Ardhialoka Bogor	085974762071	sri.widiyastuti@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
447	2/27/2025 11:46:43	Bima Prawang Saputra	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB	082275637656	bimapopo345@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	> 2 - 3 bulan yang lalu
448	2/27/2025 11:48:12	Sauqi Muhammad Faiq	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	Sekolah Vokasi IPB	085775878953	sauqifaiq99@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
449	2/27/2025 11:49:22	Muhammad El Rezga Karmita	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	Sekolah Vokasi IPB	089677081869	muhammadrezga06@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	1 - 2 bulan yang lalu
450	2/27/2025 11:49:57	Novita Rosalinda	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	MBKM UGM	082112808274	novitarosalinda@mail.ugm.ac.id	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
451	2/27/2025 11:51:04	Padilatun Nisa	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	PEPI	088216148314	padilatunnisa8@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
452	2/27/2025 11:51:22	Fajar N	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	085921265174	fajarnofriyanto2003@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
453	2/27/2025 11:51:50	Dhimas Agung Dwiputra	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	087870565560	dhimasaghoeng@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
454	2/27/2025 11:51:52	Citra Utari Adillah	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BSIP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	089528144761	citraardilla26@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
455	2/27/2025 11:53:26	Imtinan Fitriani	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	Universitas Gadjah Mada	08985748668	imtinanfitriani494566@mail.ugm.ac.id	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
456	2/27/2025 11:53:41	Putri Gracia Melani	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	UGM	081287485557	putrigraciam@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
457	2/27/2025 11:54:25	Chika Astri Andani	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	agroklimat dan hidrologi pertanian	+62 881-0122-26859	chikaaj4@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
458	2/27/2025 11:57:10	Isti fawwaz	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BPSI AGROKLIMAT	089514992171	istifawaz242@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
459	2/27/2025 11:58:15	AN-NISA YULIANTI	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BPSI AGROKLIMAT	089523820753	annisayulianti287@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
460	2/27/2025 14:06:51	Afdhal Dwi Purnama	Kurang dari 20 tahun	Laki - laki	BPSI AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI	089514455183	afdhaldwipurnama@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
461	2/27/2025 14:06:58	Muhammad Kresnasafa Muharram	Kurang dari 20 tahun	Laki - laki	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	083844599260	mkresnasafa15@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
462	2/27/2025 14:12:38	Afdhal Dwi purnama	Kurang dari 20 tahun	Laki - laki	BPSI AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI	089514455183	afdhaldwipurnama@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	> 2 - 3 bulan yang lalu
463	2/27/2025 14:15:06	m.rajab riyan q	Kurang dari 20 tahun	Laki - laki	BPSI AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	0895417659898	mrajabrynq@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
464	3/3/2025 14:12:59	Asti Putri Mellina	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	Universitas Gadjah Mada	082334659749	astiputrimellina@mail.ugm.ac.id	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
465	3/21/2025 14:24:15	Muhammad El Rezga Karmita	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	089677081069	muhammadrezga06@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	> 2 - 3 bulan yang lalu
466	3/21/2025 14:24:32	Asti Putri Mellina	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	Universitas Gadjah Mada	082334659749	astiputrimellina@mail.ugm.ac.id	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
467	3/21/2025 14:24:35	Putri Gracia Melani	20 s.d. 30 tahun	Perempuan	Universitas Gadjah Mada	081287485557	putrigraciam@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	1 - 2 bulan yang lalu
468	3/21/2025 14:27:14	Citra Utari Adillah	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BSIP	089528144761	citraardilla26@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	1 - 2 bulan yang lalu
469	3/21/2025 14:28:16	Chika Astri Andani	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BSIP	+62 881-0122-26859	chikaaj4@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
470	3/21/2025 14:29:35	AN-NISA YULIANTI	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BSIP	089523820753	annisayulianti287@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
471	3/21/2025 14:30:44	Isti Fawwaz	Kurang dari 20 tahun	Perempuan	BSIP	089514992171	istifawaz242@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
472	3/21/2025 15:28:46	Sauqi Muhammad Faiq	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	085775878953	sauqifaiq99@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	<1 bulan yang lalu
473	3/21/2025 15:30:07	Fajar Nofriyanto	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki	IPB University	085921265174	fajarnofriyanto2003@gmail.com	Balai Pengujian Standar Instrumen Agrok	1 - 2 bulan yang lalu

Form Responses 1

Gambar 43. Data Response dan Hasil Survei

Nilai indeks SPKP dan SPAK selama Tahun 2025 menunjukkan stabilitas kualitas layanan yang tinggi. IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan) dengan skor 3,65 dari skala 4, menandakan tingkat kepuasan yang sangat baik dari pengguna layanan terhadap kejelasan prosedur, kesesuaian waktu pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan sikap petugas. Sementara IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) menunjukkan skor 3.68, mencerminkan persepsi positif masyarakat atas integritas petugas dan pelayanan yang bersih dari pungutan liar dan praktek diskriminatif. Analisa nilai indeks SPKP dan SPAK ditunjukan pada Tabel 12.

Tabel 12. Analisa Nilai Indeks SPKP dan SPAK Tahun 2025

No	Bulan	Nilai Indeks	
		SPKP	SPKP
1	Januari	3,75	3,75
2	Februari	3,46	3,44
3	Maret	3,44	3,50
4	April	3,43	3,50
5	Mei	3,71	3,70
6	Juni	3,85	3,81
7	Juli	3,70	3,78
8	Agustus	3,64	3,65
9	September	3,61	3,62
10	Oktober	3,63	3,67
11	November	3,64	3,63
12	Desember	3,74	3,76

Hasil survei juga menunjukkan bahwa komponen dengan nilai tertinggi pada Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) adalah jangka waktu pelayanan dengan skor sebesar 5,7 (dari skala 6). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum publik menilai layanan BRMP Agroklimat telah dikelola dengan prosedur yang jelas, fasilitas pendukung yang memadai, serta tidak adanya beban biaya yang tidak wajar. Capaian ini menjadi indikator bahwa pelayanan teknis maupun administratif telah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ekspektasi pengguna.

Di sisi lain, komponen nilai dengan skor terendah dan tertinggi ditunjukan pada Tabel 3. Komponen dengan skor terendah pada SPKP adalah persyaratan layanan, yang memperoleh skor 5,0. Meski tetap berada dalam kategori "baik", aspek ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam penyederhanaan dokumen atau syarat administratif, serta perlunya optimalisasi penyampaian informasi layanan yang lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat, baik secara digital maupun fisik.

Untuk Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), komponen yang mendapat skor tertinggi juga sebesar 5,73, yakni pada penerimaan imbalan, pungutan liat, dan percaloan. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas layanan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik tidak etis. Namun demikian, komponen dengan nilai terendah, yaitu aspek pelayanan sesuai dengan prosedur (skor 5,12), mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi publik terkait standar integritas, komitmen antikorupsi institusi, serta penyampaian informasi yang lebih tegas dan terbuka tentang mekanisme pelaporan pelanggaran.

Tabel 13. Komponen Nilai Maksimum dan Minimum Survei SPKP dan SPAK Tahun 2025

Survei	**Komponen Tertinggi**	**Skor**	**Komponen Terendah**	**Skor**
SPKP	Jangka waktu pelayanan	5,7	Persyaratan layanan	5,00
SPAK	Penerimaan imbalan, Pungutan liar, dan Percaloan	5,56	Pelayanan Sesuai dengan Prosedur	5,12

Secara keseluruhan, hasil Survei SPKP dan SPAK Tahun 2025 menunjukkan bahwa BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah berhasil menjaga kualitas pelayanan publik serta integritas penyelenggaraan layanan dengan baik. Meskipun indeks yang dicapai

menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, hasil ini juga menjadi dasar penting untuk terus melakukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi, penyederhanaan persyaratan, dan edukasi publik terkait komitmen antikorupsi. Melalui upaya evaluatif ini, BRMP Agroklimat berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang prima, inklusif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pondasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

4.3. Magang

Program magang merupakan salah satu bentuk layanan kelembagaan yang diselenggarakan oleh BRMP Agroklimat dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas generasi muda di bidang pertanian, khususnya agroklimat dan hidrologi. Layanan ini terbuka bagi peserta dari berbagai jenjang pendidikan, baik dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan, yang memiliki ketertarikan dan latar belakang studi terkait. Kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis di lingkungan kerja profesional, tetapi juga memperkenalkan peserta pada dinamika riset, layanan teknis, dan tata kelola kelembagaan pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

Pelaksanaan magang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, dimulai dari proses pengajuan oleh institusi pendidikan melalui surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala BRMP Agroklimat. Surat permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh tim, kemudian diberikan balasan resmi berupa surat persetujuan atau penjadwalan kegiatan magang. Setelah peserta diterima, mereka akan mengikuti sesi pembukaan dan pengenalan kelembagaan, yang mencakup pemahaman tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi BRMP Agroklimat, serta ruang lingkup program kerja. Selanjutnya, peserta mengikuti materi pembekalan selama kurang lebih dua minggu, yang diisi oleh narasumber internal sesuai kompetensi teknis masing-masing bidang seperti klimatologi, hidrologi, sistem informasi geografis (SIG), hingga pengelolaan website dan pelayanan publik.

Setelah pembekalan, peserta diarahkan untuk menjalankan penelitian atau tugas praktik mandiri yang disesuaikan dengan latar belakang studi dan minat mereka. Masing-masing peserta akan mendapatkan pendampingan dari pembimbing teknis yang berasal dari pegawai BRMP Agroklimat yang berkompeten di bidang terkait. Penugasan mandiri ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan data, tetapi juga keterampilan analisis, penyusunan laporan ilmiah, serta pemanfaatan alat dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan teknis BRMP Agroklimat.

Pada akhir masa magang, peserta diwajibkan untuk menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil kegiatan mereka di hadapan pembimbing dan tim teknis BRMP Agroklimat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek pemahaman materi, keterlibatan aktif, kedisiplinan, serta kemampuan teknis peserta.

Dalam periode tahun 2025 (Januari–Desember), BRMP telah menerima sebanyak 51 peserta magang dari berbagai institusi pendidikan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan yang ditunjukan pada Tabel 14 sampai 16. Tercatat, Universitas Padjadjaran menyumbang peserta terbanyak dengan 9 orang, dan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebanyak 6 orang. Dari sisi program studi, peserta didominasi oleh jurusan Agroteknologi (12 orang), disusul oleh Teknologi Rekayasa Komputer (8 orang). Sementara itu, peserta dari tingkat SMK berasal dari SMK PGRI 1, SMK YKTB 2, dan SMK Insan Madani, dengan total keseluruhan 11 siswa.

Tabel 14. Daftar Universitas Peserta Magang Tahun 2025

Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
Universitas Padjadjaran	9
Universitas Gadjah Mada	5
Institut Teknologi Sumatera	3
IPB University	5
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan	6
Bina Sarana Informatika	1
UPN Veteran Jakarta	3
Institut Teknologi Bandung	1
Universitas Brawijaya	3
Universitas Lampung	1
Universitas Sam Ratulangi	1
Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	5

Tabel 15. Daftar Jurusan Peserta Magang Tahun 2025

Jurusan/Prodi	Jumlah Peserta
Agroteknologi	9
Ilmu Tanah	5
Teknologi Rekayasa Komputer	3
Perbankan dan Keuangan Digital	5
Sains, Atmosfer, dan Keplanetan	6
Sistem Informasi	1
Informatika	3
Teknik Mesin dan Biosistem	1
Manajemen Sumberdaya Lahan	3
Kehutanan	1
Tata Air Pertanian	1

Tabel 16. Daftar Sekolah Peserta Magang Tahun 2025

Sekolah	Jumlah Peserta
SMK PGRI 1	4
SMK YKTB 2	2
SMK Insan Madani	5

Sebagai bagian dari layanan kelembagaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, program magang di BRMP Agroklimat menjadi sarana penting dalam menjembatani dunia pendidikan dengan praktik profesional di bidang pertanian. Dengan pendekatan yang terstruktur, berbasis ilmu pengetahuan, dan didukung oleh pendampingan teknis yang kompeten, kegiatan magang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang adaptif terhadap tantangan teknologi dan perubahan iklim, serta berintegritas dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.

4.4. Pengelolaan WBS

Sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih dari praktik korupsi (*Clean Government*), BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS) secara konsisten dan terintegrasi. WBS dirancang sebagai sarana pelaporan yang memberikan akses dan perlindungan bagi pelapor yang ingin menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelaksanaan kegiatan teknis kelembagaan.

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melalui saluran pengaduan yang berupa:

1. *Website*
   Aplikasi Pelaporan Whistle Blowing System dalam website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian:
   https://agroklimat.brmp.pertanian.go.id/layanan/pengaduan-layanan-elektronik-dan-perpustakaan/pengaduan
2. Datang Langsung
   Pengadu dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, JI. Tentara Pelajar No. 1A, Cimanggu Kota Bogor16111
3. Surat
   Alamat surat ditujukan kepada BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian,
   JI. Tentara Pelajar No. 1A, Cimanggu Kota Bogor 16111
4. Email Alamat email: sekretariatbalitklimat@gmail.com
5. Telepon/Fax
   Telepon (0251) 8312760 / Faximile (0251) 8323909

Adapun pelapor pelanggaran (*whistleblower*) akan mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya, seperti:

1. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan;
4. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya dan mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan *Whistleblowing System* (WBS) ini, dilaksanakan setiap bulan, yang dilakukan oleh Kepala Balai dengan melibatkan seluruh tim yang tergabung dalam tim penanganan pengaduan

Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas pelaporan bulanan penerapan, hasil *Whistleblowing System* (WBS) di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian untuk tahun Januari – Desember 2025 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pada Tabel 17 diketahui berdasar hasil monitoring dan evaluasi penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada tahun 2025 bahwa tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat atau instansi di luar tentang adanya indikasi pelanggaran di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) di BRMP Agroklimat untuk periode Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelayanan WBS telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun pada periode ini tidak terdapat laporan pengaduan dari internal maupun eksternal, pelaksanaan sistem tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan internal serta tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap peraturan dan etika kerja di lingkungan BRMP Agroklimat. Evaluasi terhadap sistem dan mekanisme WBS menunjukkan bahwa struktur pelayanan pengaduan telah difungsikan secara optimal sesuai standar operasional yang berlaku. Sistem pelaporan dan penanganan aduan tersedia dengan jelas, baik melalui kanal daring pada website resmi lembaga maupun melalui jalur komunikasi alternatif seperti email, surat resmi, dan layanan tatap muka.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi, sosialisasi terhadap WBS terus ditingkatkan terutama pada aspek kanal- kanal pelaporan yang tersedia. Upaya ini dilakukan melalui penyebarluasan informasi pada media internal, papan pengumuman, serta pemanfaatan media sosial lembaga untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan keberadaan WBS, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai pentingnya budaya anti-korupsi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas institusi. Dengan demikian, BRMP Agroklimat terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel, berintegritas, dan terbuka terhadap pengawasan publik.

4.5. Laporan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan komponen strategis dalam struktur organisasi lembaga publik yang memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keberadaan PPID berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta

diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Komisi Informasi dan pedoman teknis di masing-masing instansi.

Sebagai bagian dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melaksanakan fungsi PPID untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Secara umum, tujuan pelaksanaan tugas PPID antara lain:

1. Memberikan layanan informasi secara transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan layanan publik;
3. Membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah;
4. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selama tahun 2025 (Januari hingga Desember), PPID BRMP Agroklimat telah menerima serta memproses beragam permohonan informasi publik yang disampaikan melalui berbagai media, seperti surat resmi, kunjungan langsung, maupun jalur komunikasi internal. Informasi yang diminta sebagian besar berkaitan dengan:

1. Permohonan magang dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari siswa/mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan sekolah kejuruan;
2. Permohonan peminjaman alat teknis seperti drone, RTK, dan perangkat monitoring iklim;
3. Permintaan data kegiatan kelembagaan, hasil pengujian, serta dokumen publik lainnya.

Seluruh permohonan informasi tersebut telah diproses dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam standar pelayanan. PPID juga secara berkelanjutan melakukan pembenahan internal, mencakup penataan dokumentasi informasi, pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi. Setiap permohonan yang masuk telah ditindaklanjuti dan dicatat dalam rekap bulanan, kemudian dilaporkan secara rutin kepada PPID Pusat Kementerian Pertanian sebagai bagian dari mekanisme pelaporan dan konsolidasi data layanan informasi publik di tingkat nasional. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut disajikan tabel laporan bulanan permohonan informasi publik dari bulan Januari hingga Desember 2025:

Tabel 18. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Januari

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Januari 2025

No.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Tindakl Lanjut	Waktu Pelayanan	Status
1	20 Januari 2025	Dr. Dyah Weni Respatie		UGM	Surat	Permohonan Izin MBKM BKP Magang	Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	20 Januari 2025	Hj. Nani Cahyani, Dra., M.Si		Institut Bisnis dan Informastika Kesatuan	Surat	Permohonan Izin Magang	Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
3	20 Januari 2025	Hj. Nani Cahyani, Dra., M.Si		Institut Bisnis dan Informastika Kesatuan	Surat	Permohonan Izin Magang	Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
4	22 Januari 2025	Andri Insan Perdana, S.Si., M.Si		President University	Surat	Internsip	Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
5	31 Januari 2025	Kusnadi, SE, SPd, M.Pd		SMK YKTB 3 Bogor	Surat	Permohonan Tempat PKL	Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 19. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Februari

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Februari 2025

No.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindaklanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	10 Februari 2025	Hj. Nany Cahyani, Dra, Msi		Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan	Surat	Permohonan Magang Mahasiswa		Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	10 Februari 2025	Supriyanto		Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Surat	Permohonan Magang Mahasiswa		Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
3	11 Februari 2025	Supriyanto		Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Surat	Permohonan Magang Mahasiswa		Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai
4	19 Februari 2025	Syandra Sari, M. Kom		Universitas Trisakti	Surat	Permohonan Magang Mahasiswa		Sudah di tindaklanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 20. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Maret

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Maret 2025

No.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindaklanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	17 Maret 2025	Agus Solihin, MPd		SMK Insan Madani	Surat	Permohonan PKL		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	25 Maret 2025	Dr. Ikah N.P. Permatasari, S.Si., M.Si		Institut Teknologi Sumatera	Surat	Permohonan PKL		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 21. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan April

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : April 2025

No.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindaklanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	8 April 2025	Prof. Dr. Ir. Purnomo, MS.		Universitas Lampung	Surat	Permohonan Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	22 April 2025	Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc		Pusat perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinzn Pertanian	Surat	Permohonan Peminjaman Alat Drone dan RTK		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 22. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Mei

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Mei 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	5/15/2025	Elisabeth Intan Berliana		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	5/15/2025	Muhammad Aqil Amran		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
3	5/16/2025	Gavina Tamar Sakti		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
4	5/21/2025	Indana Zulva Millaty		Universitas Padjadjaran	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 hari	Selesai
5	5/21/2025	Fatimah Az-Zahra		Universitas Padjadjaran	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 hari	Selesai

Tabel 23. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Juni

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Juni 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	5/15/2025	Elisabeth Intan Berliana		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	5/15/2025	Muhammad Aqil Amran		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
3	5/16/2025	Gavina Tamar Sakti		Universitas Brawijaya	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
4	5/21/2025	Indana Zulva Millaty		Universitas Padjadjaran	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 hari	Selesai
5	5/21/2025	Fatimah Az-Zahra		Universitas Padjadjaran	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 hari	Selesai

Tabel 24. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Juli

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Juli 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	16 Juli 2025	Aulya Widyanti dkk.		IPB	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
2	29 Juli 2025	Dimas Agung Dwiputra dkk.		Sekolah Vokasi IPB	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai
3	31 Juli 2025	Shandy Putra Fahrizal dkk.		IPB	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindaklanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 25. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Agustus

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Agustus 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	8/12/2025	Shandy Putra Fahrizal		IPB University	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
2	8/12/2025	Annaya Anggita Andriawan		IPB University	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
3	8/22/2025	Ade Adhitia Prihantoro		UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Whatsapp Layanan	Permohonan konsultasi		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Proses

Tabel 26. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan September

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : September 2025

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	08/09/2025	Yeni Nurhidayah	33	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat	Surat	Permohonan konsultasi		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
2	12/09/2025	Devrado Siwan Purba		Institut Pertanian Bogor	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
3	16/09/2025	Budi Prayogo		Institut Pertanian Bogor	Surat	Permohonan Izin Magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 27. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Oktober

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Oktober 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	13/10/2025	Shaleh el Maskatie Namlea		Dinas Pertanian Kabupaten Buru Provinsi Maluku	Whatsapp Layanan BRMP Agroklimat	Permohonan Kerjasama		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Masih dalam proses
2	20/10/2025	Anindya Putri		Universitas Brawijaya	Whatsapp Layanan BRMP Agroklimat	Permohonan data kalender musim tanam padi di kabupaten malang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
3	30/10/2025	Takdir Bela Pati		Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Whatsapp Layanan BRMP Agroklimat	Pemohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 28. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan November

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : November 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	01/11/2025	Muhamma d Rafi Ramdhani		Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Surat	Permohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai
2	18/11/2025	Prof. Ir. Bambang Hari Wibowo		Universitas Gadjah Mada	Surat	Permohonan data (Shapefile Zona Agroekologi)		Sudah ditindak lanjuti	1 Minggu	Selesai
3	28/11/2025	Suryani, SE		SMK Tri Dharma 4 Bogor	Surat	Pemohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Hari	Selesai

Tabel 29. Laporan Permohonan Informasi Publik Bulan Desember

Laporan Bulanan
Permohonan Informasi Publik
2025

Bulan : Desember 2025

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Usia	Pekerjaan/ Instansi	Saluran Permohon an	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	10/12/2025	Rhozeyhan Ghalih Wardhani		Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia	Surat	Permohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Minggu	Selesai
2	11/12/2025	Aulia Nazliani		Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia	Surat	Permohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Minggu	Selesai
3	11/12/2025	Meydyyana		Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia	Surat	Pemohonan magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Minggu	Selesai
4	16/12/2025	Karenina Aulia Putri		Universitas Negeri Jakarta	Surat	Permohonan Magang		Sudah ditindak lanjuti	1 Minggu	Selesai

Tabel di atas merupakan rekapitulasi laporan permohonan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian selama periode Januari hingga Desember 2025. Data yang disajikan mencakup jumlah permohonan yang diterima, jenis informasi yang diminta, saluran yang digunakan, serta status penanganan terhadap masing-masing permohonan. Rekapitulasi ini disusun secara terstruktur untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai perkembangan layanan informasi, kecepatan respons, serta kategori informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menjadi wujud komitmen BRMP Agroklimat dalam memenuhi kewajiban pelaporan rutin kepada PPID Pusat Kementerian Pertanian, sebagai bagian dari sistem pelaporan nasional terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementan.

Tabel 30. Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	5
Februari	4
Maret	2
April	2
Mei	5
Juni	5
Juli	3
Agustus	3
September	3
Oktober	3
November	3
Desember	4
Total	**39**

Jenis Informasi Publik	Jumlah Permohonan
Izin Magang / Surat Permohonan Magang	23
Izin MBKM / PKL / Internship	3
Permohonan Peminjaman Alat (Drone & RTK)	1
Permohonan data	2
Permohonan kerjasama	1

Rekapitulasi diatas juga mencerminkan kinerja layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian selama tahun 2025. Dengan total 39 permohonan yang berhasil ditangani, mayoritas di antaranya berkaitan dengan perizinan magang dan kegiatan MBKM, serta permintaan peminjaman alat teknis.

Pencapaian tersebut menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat, khususnya dari sektor pendidikan terhadap akses informasi serta layanan yang disediakan oleh BRMP Agroklimat. Di samping itu, kondisi ini sekaligus menjadi dorongan bagi PPID untuk terus memperkuat kualitas pelayanan agar lebih proaktif, efisien, dan responsif terhadap berbagai perkembangan kebutuhan publik.

4.6. Konten Media Sosial dan Website Agroklimat

Penyusunan dan publikasi konten informasi melalui berbagai kanal digital menunjukkan peningkatan baik dari segi intensitas publikasi maupun jangkauan audiens. Melalui pemanfaatan media sosial resmi dan situs web BRMP Agroklimat, komunikasi dua arah dengan masyarakat semakin mudah terfasilitasi, sehingga publik dapat memperoleh akses cepat terhadap berbagai hasil penelitian, pengujian, serta inovasi teknologi agroklimat dan hidrologi. Selain menjadi sarana penyampaian informasi, platform digital ini juga berperan penting sebagai wadah interaksi, tempat masyarakat memberikan apresiasi, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan masukan terkait layanan kelembagaan.

Gambar 44. Tampilan website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta memperkuat fondasi digital kelembagaan, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melaksanakan koordinasi pengelolaan website yang difokuskan pada penyeragaman tampilan serta peningkatan fungsi portal digital di seluruh unit BRMP. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi digital dan transformasi layanan publik yang memanfaatkan teknologi. Melalui kegiatan ini, konfigurasi sistem diselaraskan agar setiap konten dan fitur pada website lebih relevan dengan kebutuhan organisasi, mudah diakses masyarakat, serta sejalan dengan prinsip transparansi informasi.

Upaya penyeragaman tersebut mencakup sejumlah penyesuaian teknis, mulai dari pembaruan konfigurasi internal, penataan ulang struktur menu, penyesuaian tampilan pop-up dan slider informasi, hingga pemutakhiran data master dan informasi kelembagaan. Seluruh tahapan dikerjakan secara kolaboratif oleh pengelola website di tiap unit BRMP dengan panduan teknis yang terarah. Proses pembaruan ini tidak hanya memastikan konten selalu terkini, tetapi juga meningkatkan navigasi dan kemudahan penggunaan website agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Selain itu, data organisasi, struktur satuan kerja, dan informasi layanan BRMP diperbarui secara berkelanjutan untuk menjamin akurasi informasi pada laman resmi lembaga.

Gambar 45. Koordinasi Pengelolaan Sistem Website

Sebagai upaya memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, BRMP telah menambahkan Google Analytics pada situs resminya. Integrasi fitur ini memungkinkan pemantauan jumlah pengunjung, halaman yang paling banyak diakses, serta pola interaksi pengguna selama menjelajahi portal informasi. Data tersebut menjadi bahan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas konten dan performa teknis website. Untuk menunjang optimalisasi pengelolaan, BRMP juga melaksanakan bimbingan teknis bagi para pengelola website di lingkungan internal. Kegiatan ini memberikan pembekalan terkait manajemen konten, pemanfaatan media interaktif, hingga penerapan standar keamanan siber. Seluruh langkah ini menegaskan komitmen BRMP dalam mendorong digitalisasi layanan publik yang transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

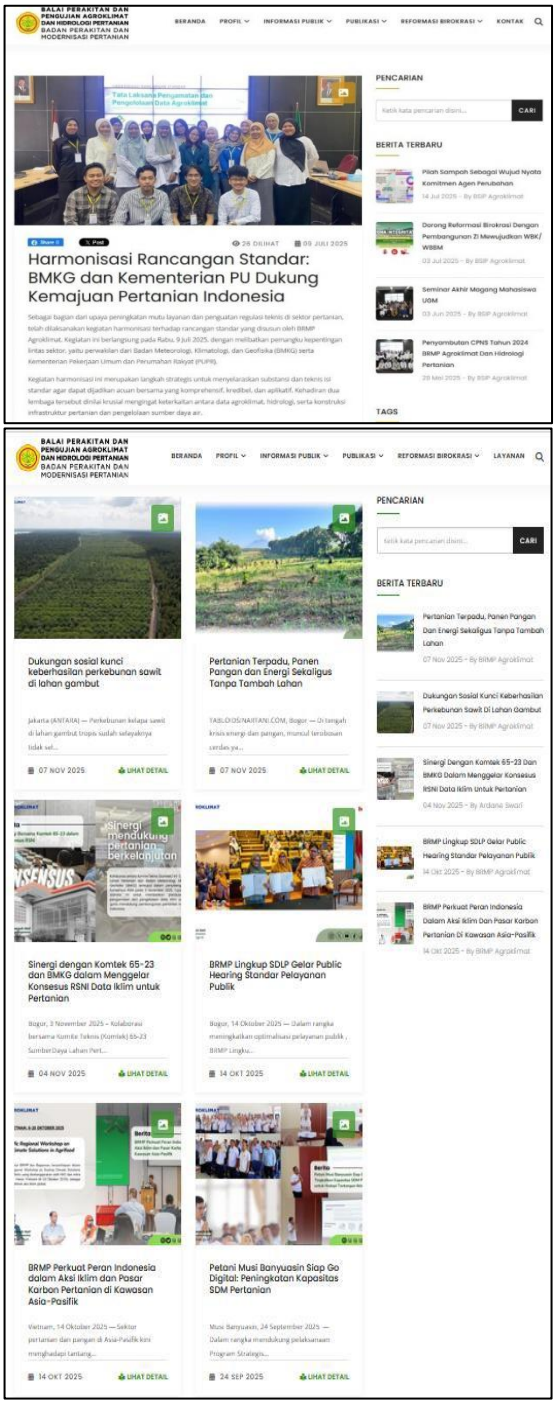

Gambar 46. Berita Website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Pada tabel berikut akan disajikan rekapitulasi jumlah unggahan pada setiap kanal media sosial BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berdasarkan publikasi bulanan sepanjang tahun 2025

Tabel 31. Rekapitulasi Unggahan Media Sosial dan Website BRMP Agroklimat per Bulan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Unggahan				
		Website	Instagram	Facebook	X (Twitter)	Youtube
1	Januari	0	7	7	1	1
2	Februari	1	11	11	5	2
3	Maret	2	21	21	13	1
4	April	2	25	26	17	2
5	Mei	5	23	23	10	3
6	Juni	1	15	14	7	2
7	Juli	7	19	16	6	1
8	Agustus	7	25	21	15	2
9	September	3	21	19	13	2
10	Oktober	2	24	23	13	3
11	November	3	19	15	5	5
12	Desember	5	18	13	6	1
Jumlah Total Unggahan		34	38	228	209	111

Dengan demikian, selama tahun 2025, telah dipublikasikan :

1. 38 berita resmi di website BRMP Agroklimat
2. *Instagram*: 228 unggahan
3. *Facebook*: 209 unggahan
4. X (*Twitter*): 111 unggahan
5. *YouTube*: 25 unggahan

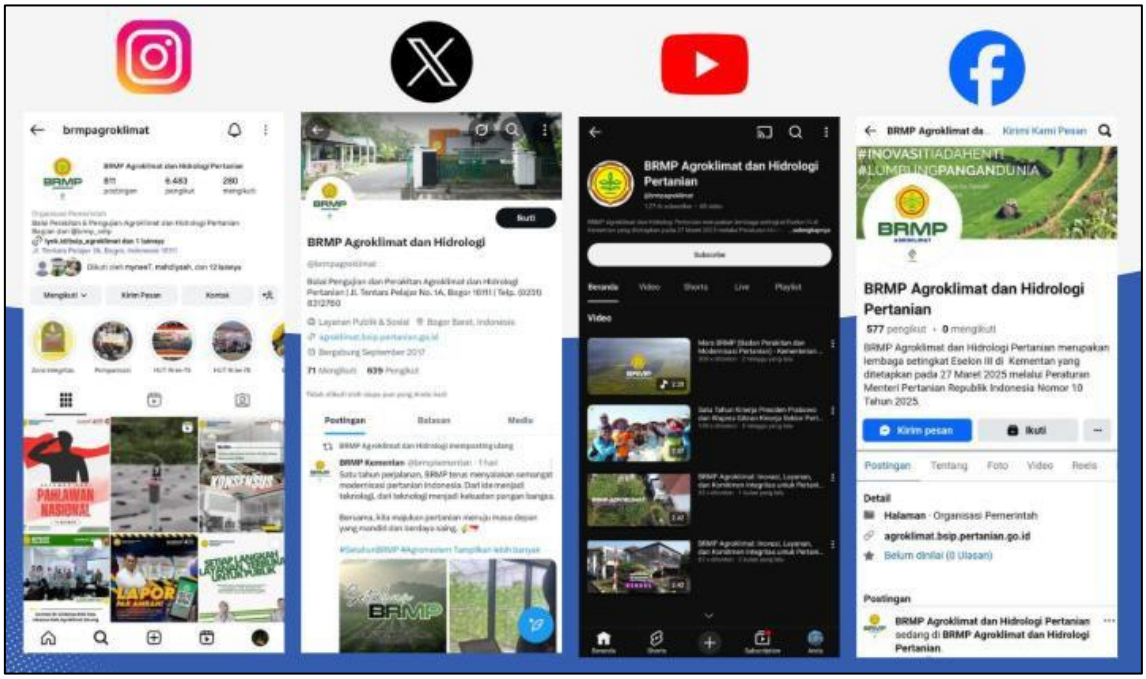

Gambar 47. Media Sosial BRMP Agroklimat

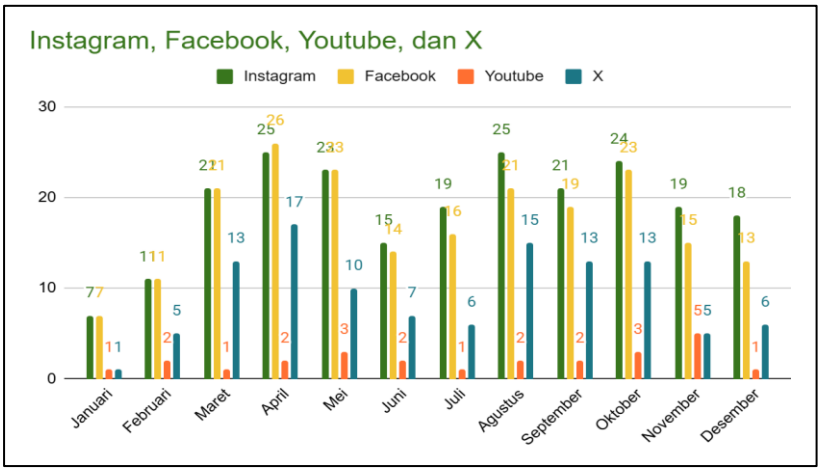

Gambar 48. Rekapitulasi Unggahan Media Sosial BRMP Agroklimat

Adapun konten yang dipublikasikan setiap bulannya meliputi beberapa kategori utama, yaitu:

1. Berita & Hari Nasional – dokumentasi kegiatan institusi dan peringatan nasional;
2. Poster Statistik & *Website* – publikasi data, infografis, serta pembaruan dari sistem digital;
3. Substansi Teknis – edukasi dan informasi dari pegawai dengan jabatan fungsional (JF);
4. Hiburan & Interaktif – konten ringan untuk meningkatkan *engagement audiens;*
5. *Repost* Kegiatan – unggahan ulang kegiatan mitra atau satuan kerja lainnya;
6. Rekap & Sekretariat – dukungan dokumentasi internal dan kearsipan digital;

Gambar 49. Jadwal Publikasi Media Sosial

Pada jadwal bulanan terlihat bahwa setiap minggu memiliki tema publikasi yang berbeda, dengan penugasan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Mekanisme ini tidak hanya mengoptimalkan pelaksanaan tugas, tetapi juga memperkuat koordinasi antar unit serta meningkatkan kompetensi komunikasi publik di seluruh organisasi.

Setiap bulan, umumnya terdapat 4 hingga 8 pegawai yang terlibat aktif sebagai penyumbang materi, baik dari jabatan fungsional maupun pelaksana. Bentuk kontribusi tersebut meliputi penyusunan materi konten, pembuatan data visual, dokumentasi kegiatan, dan penyampaian informasi program. Pola kerja ini mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif dan memperkuat rasa keterlibatan pegawai dalam mengelola komunikasi institusi di era digital.

4.7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal Pengelolaan Pengaduan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penanganan pengaduan masyarakat wajib diselesaikan secara cepat dan tuntas melalui pendekatan komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan bersinergi serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenang masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan.

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebagai salah satu UPT di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat, melalui penetapan Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Nomor 34/Kpts/OT.020/H.10.4/05/2025. BRMP Agroklimat menerima pengaduan masyarakat berupa:

1. Keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja di lingkup BRMP Agroklimat yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara.
2. Saran, kritik, gagasan yang membangun yang mengandung informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh publik dapat diterima melalui berbagai saluran yang telah disiapkan untuk memastikan setiap keluhan, masukan, maupun laporan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Mekanisme pengaduan tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung.

Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung dilakukan oleh Masyarakat dengan cara datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk). Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidak puasan dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, keluhan kepada BRMP Agroklimat atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabdian kewajiban oleh pegawai di lingkup BRMP Agroklimat. Untuk kemudian dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan Masyarakat.

Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan petugas yang berwenang dalam menangani pengaduan Masyarakat. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui; Telepon, E-mail, Whatsapp, atau Media Sosial.

Pada tahun 2025, Tim unit pengelola pengaduan masyarakat melaporkan bahwa terdapat empat (4) laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Pengaduan dan tidak lanjut penanganan pengaduan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Pengaduan Masyarakat Bulan Januari

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 33. Pengaduan Masyarakat Bulan Februari

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 34. Pengaduan Masyarakat Bulan Maret

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 35. Pengaduan Masyarakat Bulan April

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 36. Pengaduan Masyarakat Bulan Mei

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 37. Pengaduan Masyarakat Bulan Juni

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 38. Pengaduan Masyarakat Bulan Juli

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	7/3/2025	Tisu kamar mandi sering dan tidak diisi kembali	7/7/2025	Petugas terlambat melakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan (toilet)	Melakukan koordinasi dan evaluasi	selesai	Sudah ditindak lanjuti
2	7/3/2025	Tisu kamar mandi sering habis dan terlambat diisi kembali	7/7/2025	Petugas terlambat melakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan (toilet)	Melakukan koordinasi dan evaluasi	selesai	Sudah ditindak lanjuti
3	7/3/2025	Galon air minum sering habis	7/7/2025	Petugas terlambat melakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan (toilet)	Melakukan koordinasi dan evaluasi	selesai	Sudah ditindak lanjuti
4	7/3/2025	Sabun cuci toilet habis terlambat diisi	7/7/2025	Petugas terlambat melakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan (toilet)	Melakukan koordinasi dan evaluasi	selesai	Sudah ditindak lanjuti

Tabel 39. Pengaduan Masyarakat Bulan Agustus

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 40. Pengaduan Masyarakat Bulan September

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 41. Pengaduan Masyarakat Bulan Oktober

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 42. Pengaduan Masyarakat Bulan November

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 43. Pengaduan Masyarakat Bulan Desember

No	Tanggal Pengaduan	Perihal	Tanggal tindak lanjut	Akar masalah	Tindak lanjut/ Penanganan	Status Penyelesaian	
						Status	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Adapun sebaran media yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Sebaran Media Pengaduan Masyarakat

No	Bulan	Jumlah Pengaduan					
		Telepon	Email	Whatapp	Media Sosial	Website	Datang langsung
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	4	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengaduan		0	0	0	0	4	0

4.8. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan KIP oleh PPID bertujuan memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diakses, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Seluruh langkah pengelolaan informasi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan guna memperkuat transparansi dan pelayanan publik.

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, BRMP Agroklimat telah melaksanakan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara resmi. Kegiatan ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta regulasi pelaksananya. Melalui langkah tersebut, BRMP Agroklimat menegaskan upaya penguatan tata kelola layanan informasi publik yang lebih terbuka, responsif, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Gambar 50. Penandatangan Komitmen KIP

Gambar di atas merupakan dokumentasi visual dari kegiatan penandatanganan komitmen Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh pimpinan dan perwakilan pegawai BRMP Agroklimat, sebagai simbol dimulainya implementasi komitmen pelayanan informasi publik yang transparan. Ini sekaligus menunjukkan sinergi internal dalam mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdaya guna. Dokumen ini menyatakan kesiapan dan komitmen BRMP Agroklimat dalam memberikan layanan yang berkualitas sesuai standar informasi publik.

Penguatan komitmen BRMP Agroklimat terhadap Keterbukaan Informasi Publik diwujudkan melalui penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dilegalkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Nomor 57/Kpts/HM.130/H.10.4/05/2025. Melalui keputusan tersebut, ditetapkan 20 jenis informasi sebagai DIP yang dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari upaya menyediakan informasi secara transparan. Penetapan ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, relevan, serta mudah dijangkau.

Dua puluh jenis informasi yang tercantum dalam DIP mencakup berbagai elemen strategis kelembagaan, mulai dari rencana dan pelaksanaan program, output kegiatan perakitan serta pengujian teknologi agroklimat, informasi terkait pengelolaan anggaran, layanan penanganan aduan, hingga arsip kegiatan pelayanan publik. Setiap informasi telah disusun dan dikelompokkan sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup aspek frekuensi pemutakhiran, status keterbukaan informasi, serta media publikasinya. Kehadiran DIP tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa proses birokratis yang berlebihan.

Tabel 45. Daftar Informasi Publik

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/unit/satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab/ penerbit informasi	Waktu dan Tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi dokumen
					Softcopy/ link	Hard-copy		
1	Profil Balai	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2	Profil Singkat Pejabat	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Sub Bagian Tata Usaha	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
3	Informasi Layanan	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
4	Alur Permintaan data	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
5	SPP (Standar Pelayanan Publik)	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
6	Maklumat pelayanan	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
7	Komitmen Bersama	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/unit/satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab/ penerbit informasi	Waktu dan Tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi dokumen
					Softcopy/ link	Hard-copy		
8	Informasi Kegiatan BPSI Agroklimat dan Hidrologi	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
9	DIPA	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
10	RENSTRA	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/unit/satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab/ penerbit informasi	Waktu dan Tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi dokumen
					Softcopy/ link	Hard-copy		
11	LHKPN dan LHKASN	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Sub Bagian Tata Usaha	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
12	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
13	LAKIP	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
14	Capaian Kinerja	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Program, Evaluasi, Perakitan Modernisasi Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
15	Data Aset Instansi	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Sub Bagian Tata Usaha	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
16	Neraca SIMAK	BRMP Agroklimat dan Hidrologi	Sub Bagian Tata Usaha	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/unit/satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab/ penerbit informasi	Waktu dan Tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi dokumen
					Softcopy/ link	Hard-copy		
	BMN	Pertanian						
17	SK PPID	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
18	Laporan Tahunan Instansi	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
20	Laporan Tahunan PPID	BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala

Dengan DIP yang terstruktur dan ditetapkan secara resmi, BRMP Agroklimat tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, melainkan turut membangun mekanisme komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Informasi yang tersedia secara terbuka memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kinerja lembaga. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong terjadinya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

DIP yang disusun dan diimplementasikan juga sangat relevan dengan mandat utama BRMP Agroklimat, yakni sebagai unit pelaksana teknis dalam perekayasaan, perakitan, dan pengujian teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian. Informasi yang

tersedia secara publik mendukung proses diseminasi hasil inovasi teknologi, mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas, dan memperkuat posisi BRMP Agroklimat sebagai pusat keunggulan di bidang agroklimat pertanian modern.

4.9. Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Keterbukaan Informasi Publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menuntut setiap unit kerja untuk secara konsisten memastikan bahwa pengelolaan informasi publik dilakukan sesuai ketentuan perundang- undangan, serta mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, BRMP Agroklimat menerapkan Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai mekanisme evaluasi

mandiri. SAQ berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kelengkapan unsur- unsur pelayanan informasi publik yang telah dijalankan. Melalui instrumen ini, unit kerja dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan peningkatan, sehingga pengelolaan KIP dapat terus diperbaiki secara berkesinambungan. Pelaksanaan SAQ menjadi bagian integral dari komitmen BRMP Agroklimat dalam memastikan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hak masyarakat.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di BRMP Agroklimat dilaksanakan berfokus pada periode pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang dilaksanakan dan disubmit pada tanggal 27 September 2025. Dari pelaksanaan SAQ yang telah dilakukan, BRMP Agroklimat akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal untuk menilai efektivitas penerapan KIP di BRMP Agroklimat. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap kendala dan kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan SAQ, serta identifikasi poin-poin yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di BRMP Agroklimat. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan penguatan tata kelola informasi publik di tahun-tahun berikutnya. Pengisian SAQ dapat dilihat pada gambar berikut ini.

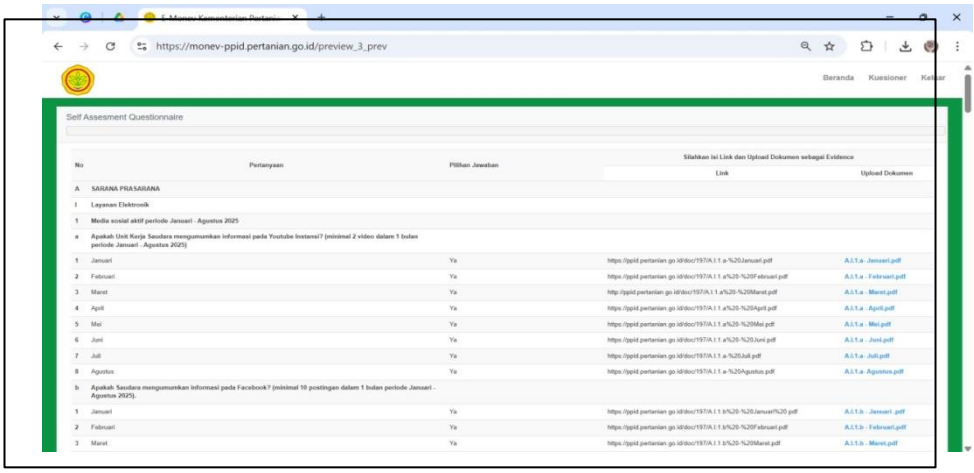

Gambar 51. Kuisioner SAQ

Dalam pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BRMP Agroklimat, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Hasil monitoring dan evaluasi SAQ

Uraian Tugas	Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penjadwalan Pengisian SAQ	
1. Identifikasi Timeline Monev KIP Kementan 2. Penjadwalan pengisian SAQ BRMP Agroklimat berdasarkan Timeline monev Kementan	1. Penentuan Timeline Monev KIP oleh kementan diharapkan dapat diinformasikan lebih awal, atau ditetapkan agar jadwal tidak berubah- ubah sehingga persiapan UK/UPT bisa dilakukan lebih maksimal 2. Sikronisasi Timeline BRMP Agroklimat terhadap jadwal Kementan telah dilaksanakan dengan baik, stakeholder memberikan jadwal dan arahan pengisian secara detail.
Pembagian Tugas	
1. Koordinasi stakeholder internal 2. Pembentukan Tim SAQ 3. Pembagian tugas aggota	1. Dalam pembentukan Tim dilakukan melalui rapat koordinasi. Pembagian anggota tim telah maksimal dengan memastikan tugas yang diberikan sesuai dengan jobdesk atau posisi tim kerja. 2. Perlunya monitoring stakholder secara berkala dalam proses pengisian untuk memastikan pemahaman tim terhadap indikator kriteria SAQ sudah sesuai 3. Koordinasi antar anggota dapat lebih dimaksimalkan
Pemenuhan Evidance	
1. Kelengkapan bukti dukung	1. Kendala dalam pengumpulan dan penyusunan bukti seperti pada bukti dukung yang berkaitan dengan website UK/UPT dimana terjadi perubahan pada level eselon 1 yang mengharuskan UK/UPT ikut menyesuaikan sehingga bukti dukung dilakukan perbaikan berulang kali.

4.10. Public Hearing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Melalui FKP, BRMP Agroklimat dan Hidrologi dapat menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan, mulai dari petani, penyuluh, universitas, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat luas sebagai pengguna layanan. Dengan adanya dialog dua arah ini, BRMP Agroklimat dan Hidrologi dapat menyerap aspirasi dan masukan yang relevan terkait kebutuhan layanan terkait bidang agroklimat dan hidrologi.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
   Hari / Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
   Tempat Pelaksanaan : Agrosinema, BRMP SDLP
b. Metode Pelaksanaan FKP
   Pelaksanaan FKP dilakukan secara *hybrid* yaitu secara tatap muka dan *online*.
c. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil kajian pra-pelaksanaan Forum Konsultasi Publik menunjukkan bahwa pelayanan di BRMP Agroklimat telah memiliki landasan regulasi dan prosedur yang memadai, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek kunci. Keterpaduan dokumen dan kejelasan persyaratan administrasi perlu ditingkatkan agar pengguna layanan memperoleh informasi yang lebih jelas dan mengurangi potensi ketidaksesuaian berkas. Mekanisme pelayanan yang telah tersusun melalui flowchart juga perlu dioptimalkan dengan integrasi sistem informasi digital, termasuk penyediaan fitur pelacakan layanan daring untuk meningkatkan transparansi.

Pada sisi pengelolaan pelayanan, sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan layanan digital, sementara kapasitas SDM perlu terus diperkuat untuk menghadapi peningkatan volume permintaan. Di samping itu, proses pengawasan dan jaminan mutu memerlukan digitalisasi yang lebih komprehensif agar tindak lanjut evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dapat dicapai melalui integrasi sistem layanan berbasis digital, penguatan kompetensi SDM, serta penyusunan indikator kinerja yang lebih adaptif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan BRMP Agroklimat muncul akibat keterbatasan integrasi sistem dan belum optimalnya tata kelola informasi. Persyaratan layanan yang bervariasi antarjenis kegiatan menyebabkan inkonsistensi dokumen dari pengguna, sementara belum adanya one gate system atau sistem pengajuan terpadu memperlambat proses verifikasi. Kondisi ini diperkuat oleh belum tersedianya mekanisme digital untuk *tracking* status permohonan layanan secara mandiri, sehingga pengguna bergantung penuh pada komunikasi manual dengan petugas.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah pelaksana dengan volume permintaan layanan teknis turut memengaruhi efektivitas penyampaian pelayanan. Kompetensi pelaksana sudah sesuai struktur dan kualifikasi, namun distribusi beban kerja dan spesialisasi teknis belum merata di tiap bidang layanan. Hal inilah yang mendasari munculnya rekomendasi dalam berita acara untuk melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis lanjutan serta peninjauan struktur pembagian tugas agar pelayanan lebih efisien dan terukur.

Selanjutnya, terkait sarana dan prasarana, keterbatasan akses terhadap fasilitas layanan publik yang ramah pengguna (terutama kanal daring) turut menghambat keterjangkauan layanan oleh masyarakat luas. Kondisi tersebut melahirkan rekomendasi untuk peningkatan fasilitas layanan publik dan digitalisasi kanal pengaduan agar lebih interaktif dan mudah diakses. Penerapan sistem pengaduan terintegrasi dengan SP4N-Lapor! juga menjadi bagian dari strategi transparansi dan penguatan akuntabilitas pelayanan.

Dengan demikian, seluruh rekomendasi yang muncul dalam berita acara tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan respons rasional terhadap kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan. Rekomendasi tersebut mencakup empat fokus utama: penyeragaman prosedur, penguatan kapasitas SDM, digitalisasi proses layanan dan pengawasan, serta peningkatan sarana dan aksesibilitas layanan publik. Keempatnya diarahkan untuk mendukung tercapainya standar pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

e. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)/*Public Hearing* penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), sebagian besar masukan dan tanggapan masyarakat telah diakomodasi dalam dokumen SPP yang disusun oleh BRMP Agroklimat.

Masukan yang telah tertampung antara lain terkait kejelasan persyaratan pelayanan, penyederhanaan alur mekanisme pelayanan, serta penambahan kanal pengaduan berbasis digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan.

Namun demikian, terdapat beberapa masukan yang belum seluruhnya dapat diakomodasi pada tahap penyusunan SPP ini karena memerlukan kajian teknis lebih lanjut, koordinasi lintas tim kerja, atau penyesuaian dengan kebijakan tingkat kementerian. Masukan tersebut terutama terkait dengan pengembangan sistem pelayanan berbasis daring terintegrasi, perluasan cakupan layanan data spasial, serta penambahan sumber daya manusia teknis di bidang tertentu.

Sebagai tindak lanjut, BRMP Agroklimat menyiapkan rencana aksi berkelanjutan berupa:

1. Kajian teknis dan koordinasi internal untuk mengintegrasikan masukan yang belum dapat diimplementasikan ke dalam pembaruan SPP pada periode berikutnya.
2. Rencana pengembangan sistem layanan digital terpadu, bekerja sama dengan Pusdatin dan unit teknis terkait, untuk menjawab kebutuhan layanan berbasis data dan automasi proses.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pelayanan, guna menyesuaikan dengan volume serta kompleksitas layanan yang diusulkan masyarakat.

Dengan rencana aksi tersebut, BRMP Agroklimat berkomitmen untuk memastikan seluruh masukan masyarakat dapat menjadi dasar penyempurnaan standar pelayanan di masa mendatang. Proses pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala agar pelaksanaan pelayanan publik senantiasa selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Gambar 52. Public Hearing BRMP Agroklimat 2025

Berdasarkan Berita Acara (BA) *Public Hearing* 2025, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis terkait penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Berita Acara yang ditandatangani dapat dilihat pada gambar berikut:

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id EMAIL: brmp.agroklimat@pertanian.go.id

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada hari ini, 14 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang bertempat di BRMP SDLP. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)			
1	Persyaratan	Persyaratan pelayanan mencakup kelengkapan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan sebelum pelaksanaan pelayanan, meliputi: surat permohonan resmi, identitas pengguna layanan, serta formulir pengajuan kegiatan pengujian atau perakitan.	Disesuaikan dengan jenis layanan: Jasa Teknis (Pengujian dan Perakitan Teknologi Agroklimat dan Hidrologi).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mekanisme pelayanan disusun dalam bentuk flowchart, terdiri dari tahapan: penerimaan permohonan → verifikasi dokumen → pelaksanaan layanan teknis → validasi hasil → penyampaian laporan hasil kepada pengguna.	Bukan SOP, hanya menjelaskan mekanisme pelayanan secara ringkas dan fungsional.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Lama waktu pelayanan ditetapkan berdasarkan jenis layanan teknis dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan dan ketersediaan sarana pendukung.	Contoh: 2—5 hari untuk analisis data dalam layanan permohonan data
4	Biaya/Tarif	Jenis tarif mencakup biaya pengujian dan perakitan teknologi sesuai ruang lingkup layanan. Penetapan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Rincian tarif disesuaikan dengan kategori layanan dan kapasitas alat uji.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa hasil pengujian, laporan hasil kalibrasi, sertifikat kelayakan alat, atau rekomendasi teknis hasil perakitan teknologi agroklimat dan hidrologi.	Keluaran bersifat jasa teknis, bergantung pada karakteristik layanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Mekanisme pengaduan diuraikan dalam bentuk flowchart mengacu pada sistem Dumas (Pengaduan Masyarakat): penerimaan pengaduan → verifikasi → tindak lanjut → umpan balik hasil penanganan.	Disampaikan melalui kanal resmi: surat elektronik, formulir pengaduan daring, atau secara langsung.
Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)			
1	Dasar Hukum	-	Menjadi acuan hukum penyusunan dan pelaksanaan SPP.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana mencakup perangkat yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan, seperti ruang layanan publik, meja informasi, dan akses digital layanan daring.	Tidak termasuk fasilitas kerja internal petugas.
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana disesuaikan dengan struktur organisasi dan kapasitas SDM BRMP Agroklimat, mempertimbangkan volume serta kompleksitas layanan.	Kompetensi dapat juga disertakan/ dibuktikan melalui pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman kerja relevan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Tim Satuan supervisi Kepala Balai guna memastikan	Dilaksanakan secara periodik dan insidentil sesuai kebutuhan.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana disesuaikan dengan mempertimbangkan volume serta kompleksitas layanan.	-
6	Jaminan Pelayanan	Setiap layanan dijamin dilaksanakan sesuai standar prosedural, tepat waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin keamanan data pengguna dan proses pelayanan dari potensi penyalahgunaan informasi. Menjamin keselamatan pelaksana dan pengguna layanan dengan penerapan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium maupun lapangan.	Meliputi penggunaan APD dan prosedur keselamatan kerja.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui penilaian kinerja individu dan tim pelayanan, dengan indikator mutu dan ketepatan waktu pelayanan.	-

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 14 Oktober 2025

No	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Dimas Agung Dwiputra	**Micro IT Community** Masyarakat Pengguna	
2	Bekti Subagja, A.Pi., M.Si.	**Sekretariat BRMP** *Stakeholder* pelayanan publik	
3	Faldiena Marcelita, ST, M.Kom.	**Prodi Rekayasa Komputer, Sekolah Vokasi, IPB University** Akademisi/praktisi	
4	Tety Sovia	**Bank Sampah Induk Kita** Organisasi masyarakat sipil	
5	Gesha Yuliani Nattasya	**Sinar Tani** Media massa	

**) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta kegiatan (masyarakat pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, akademisi/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa)*

Kepala Balai,

Rima Purnamayani, SP., M. Si
NIP. 197606132003122001

Gambar 53. Berita Acara *Public Hearing* BRMP Agroklimat

V. MANAJEMEN BALAI

Untuk meningkatkan kinerja institusi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transparansi pelaporan keuangan, perlu dukungan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian serta keuangan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif. Pada TA 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melakukan peningkatan sistem kinerja melalui kegiatan manajemen.

Kegiatan Manajemen Balai terdiri atas: 1) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, 2) Pengelolaan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Sistem Manajemen Mutu, 3) Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Satker, 4) Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, 5) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Pengendalian Intern, 6) Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet dan 7) Layanan Perkantoran.

5.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

Paradigma baru dalam proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini memerlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi dalam penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu setiap pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengelola anggaran secara tertib, taat aturan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelaksanaan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan. Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporannya secara rutin dan berkala, maka Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menetapkan satu unit kegiatan yang mendukung salah satu tugas dan fungsi balai yaitu Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan.

Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dibentuk sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf (g) yang menyatakan Menteri Negara Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

PMK nomor 59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan dan pelaporan akuntansi Barang Milik Negara mutlak menjadi kewajiban setiap pimpinan satker, hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana pengadaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan keuangan dan perlengkapoan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian secara tertib, taat aturan, efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan tepat sasaran. Selain itu juga untuk menyediakan informasi dan laporan keuangan dan aset barang milik negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diakses secara online dan terbatas oleh Kemenkeu secara berjenjang melalui Unit kerja eselon I dan Unit Akuntansi Wilayah masing-masing kementerian.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Beberapa kegiatan dilakukan dengan cara perekaman dokumen sumber dan dilakukan prosessing data dengan menggunakan

software. Prosedur perekaman/entri dan prosesing rekonsiliasi data ini meliputi penerimaan dokumen, verifikasi, perekaman dan pelaporan.

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. *Laporan Realisasi Anggaran.* Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 84.371.450 atau mencapai 453,61 persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp 18.600.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 6.716.470.013 atau mencapai 86,53 persen dari alokasi pagu total anggaran sebesar Rp. 7.501.558.000 atau mencapai 98,85% dari alokasi pagu efektif anggaran sebesar Rp. 6.794.298.000 dengan pagu blokir sebesar Rp. 707.260.000.
2. *Neraca.* Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 9.309.045.029,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 60.412.000,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 8.787.952.474,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 460.680.555,00.
   Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 9.309.045.029,00 dan Rp. 9.309.045.029,00

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.716.470.013,- atau mencapai 98,85 persen dari alokasi pagu efektif anggaran sebesar Rp 6.794.298.000,-. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2025 sebesar sebesar Rp. 84.371.450,- dari target Rp. 18.600.000,- atau sebesar 453,61%. Realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan tahun anggaran 2025 sebesar 98,82% dengan besaran anggaran Rp. 15.811.000,- dari pagu anggaran Rp. 16.000.000,-. Pagu blokir seluruh kegiatan sebesar Rp. 707.260.000. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai: Rp. 2.827.284.000,-
b. Belanja Barang: Rp. 4.664.200.000,-
c. Belanja Modal: Rp. 10.074.000,-

5.1.1. Realisasi Anggaran

018.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Sarana Laboratorium Sumber Daya Lahan Pertanian Modern yang merupakan program nilai tambah dan daya saing industri, Pengadaan Alat Laboratorium memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.074.000,00 terdiri dari 2 (dua) unit belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

1. Drone tablet sebesar Rp. 3.323.300,- (98,50%).
2. Alat Uji Kualitas air sebesar Rp. 6.700.000,- (100%)

018.09.WA Program Dukungan Manajemen

Alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 6.784.224.000,- terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut:

Realisasi anggaran output ini sebesar Rp. 6.706.842.229 - atau 98,85%.

Tabel 47. Alokasi anggaran dan realisasi program dukungan manajemen Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

URAIAN	PAGU Anggaran dalam DIPA (Rp)	Realisasi	% terhadap PAGU
Program Dukungan Manajemen	**6.784.224.000**	**6.706.842.229**	**98,85**
Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	**421.140.000**	**420.900.500**	**99.94**
Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	421.140.000	420.900.500	99.94
Layanan Perkantoran	6.206.484.000	6.129.433.513	98,76
Gaji dan Tunjangan	2.827.284.000	2.764.430.770	97,78
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3.379.200.000	3.365.002.743	99,58
Layanan BMN	7.600.000	7.585.400	99,81
Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya	7.600.000	7.585.400	99,81
Layanan Umum	94.000.000	93.600.700	99,58
Penyusunan Program dan Anggaran	25.700.000	25.686.500	99,95
Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga	36.300.000	36.206.700	99,74
Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	16,000,000	15.896.500	99,35
Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	16,000,000	15.811.000	98,82
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27.500.000	27.447.900	99,81
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	27.500.000	27.478.700	99,92
Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	19.900.000	19.885.700	99,92
Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	7.600.000	7.593.000	99,91

5.1.2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Penerimaan Dana PNBP BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2024 sebesar Rp. 18.600.000. Dengan target penerimaan umum sebesar 4.800.000 dan target penerimaan fungsional sebesar 13.800.000. Pendapatan berasal dari layanan mess, layanan survey dan pemetaan serta jasa lainnya.

Tabel 48. Target dan realisasi PNBP 2025

No	Penerimaan	Target	Realisasi
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	4.800.000	4.821.000
2	Pendapatan dan penjualan peraltan dan mesin	-	7.721.650
3	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL 425911	-	52.140.300
4	Penerimaan kembalai belanja barang TAYL 425912	-	350.000
5	Pebdapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	38.500
Jumlah Penerimaan umum		**4.800.000**	**65.071.450**
4	Pendapatan penggunaan sarpras sesuai tusi	8.000.000	18.100.000
5	Pendapatan layanan survei dan pemetaaan	4.000.000	-
6	Pendapatan jasa lainnya	1.000.000	1.200.000
Jumlah penerimaan fungsional		**13.800.000**	**19.300.000**
Jumlah PNBP		**18.600.000**	**84.371.450**

5.1.3. SIMAK-BMN

Laporan Persediaan Tahun 2025

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.110.000 dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 965.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Persediaan Per Desember TA 2025 dan 2024

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	1.110.000	965.000
Barang untuk Pemerliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	1.110.000	965.000

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN. perlu dilakukan penatausahaan asset (BMN) oleh satker sebagai pengguna barang. Penatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan. inventarisasi. dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: 1) Mencatat dan membukuan semua BMN yang telah ada ke dalam buku barang dan/atau KIB; 2) Membuat dan mencatat setiap mutasi BMN; 3) Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi serta menyusun daftar barang sebagaimana nomor 1; 4) Mencatat semua barang dan perubahan atas adanya perpindahan; 5) Mencatat perubahan kondisi barang; 6) Mencatat PNBP dari pengelolaan BMN.

Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN. Sensus BMN merupakan kegiatan inventarisasi BMN yang dilakukan oleh satker sebagai pengguna barang. sekurang-sekurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun sekali. Seiring berjalannya waktu. dalam penggunaan BMN tentunya terdapat kemungkinan perbedaan pencatatan penatausahaan BMN dengan kondisi riil yang sebenernya. Oleh karena itu. sensus BMN dilakukan agar dapat mengidemtifikasi keadaan riil BMN baik dari sisi keberadaan. jumlah. ataupun kondisi barang. Tujuan dari pelaksanaan sensus BMN agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Dengan tersedianya data mutakhir secara rinci tentang BMN yang didokumentasikan. hal tersebut dapat mendukung validitas nilai asset tetap dalam laporan keuangan meliputi volume fisik. spesifikasi & kondisi harga; tersedianya informasi akurat untuk perencanaan. penentuan kebutuhan. penganggaran. pengadaan. penyimpanan & penyaluran. pemeliharaan. penghapusan. serta pengamanan; dan terlaksananya pemutakhiran serta legalisasi status penggunaan BMN pada setiap satker/unit kerja. Sensus BMN dilaksanakan dala 3 tahapan:

1) Tahap Persiapan

Pengguna barang atau Kuasa Pengguna Barang perlu menetapkan panitia atau tim yang akan melakukan beberapa persiapan diantaranya menyusun rencana kerja. mengumpulkan dokumen sumber. melakukan pemetaan pelaksanaan sensus. menyiapkan blanko label sementara. menyiapkan data awal sensus. dan menyiapkan kertas kerja sensus BMN.

2) Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan seperti mengidentifikasi BMN dalam ruangan (DBR) dan BMN yang berada di luar ruangan (KIB & DIL); melakukan verifikasi database simak BMN dan menyusun kertas kerja sensus berdasarkan hasil identifikasi oleh pelaksana sensus; dan menyusun laporan hasil sensus berdasarkan kertas kerja dan hasil identifikasi.

3) Tahap Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut. tim pelaksana sensus melakukan beberapa kegiatan seperti membukukan dan mendaftarkan hasil sensus; meperbahari DBR. DBL. dan KIB; menempelkan blangko label permanen; melakukan tindak lanjut; dan pemutakhiran data simak BMN.

Sensus BMN dilaksanakan dengan harapan bahwa nantinya setiap satker dapat melakukan pencatatan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga dapat menghasilkan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang wajar dan validitas data SIMAK BMN dapat terwujud. Pelaksanaan sensus BMN ini berguna untuk mengetahui kondisi. nilai. dan jumlah BMN dengan cara catatan BMN yang ada dibandingkan dengan keberadaan seluruh BMN yang ada dalam penguasaan dalam hal tertib administrasi BMN.

Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi berisi bebarapa hal. di antaranya:

(1) Daftar barang yang baik atau rusak ringan
(2) Daftar barang yang rusak berat
(3) Daftar barang yang tidak ditemukan atau hilang
(4) Daftar barang berlebih

Semua laporan hasil tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengelolaan BMN ke depannya. Pelaksanaan inventarisasi akan membantu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kebijakan pengelolaan yang akan tetapkan terhadap BMN yang berada pada penguasaan suatu satker.

Kemudian. tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisasi BMN pun tidak dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

a) Apakah masih ada pencatatan BMN yang harus ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan.
b) Apakah masih ada BMN yang belum tercacat sehingga harus ditindaklanjuti dengan pencatatan.
c) Apakah ada BMN yang perlu ditindaklanjuti dengan penghapusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. hasil dari kegiatan inventarisasi BMN akan menjadi acuan satker dalam menyusuun rencana kegiatan pemantauan dan penertiban BMN yang ada dalam penguasaan satker. Sehingga dapat dipahami betapa pentingnya melakukan inventarisasi BMN yakni kita bisa memastikan bahwa kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan BMN yang akan ditetapkan akan sesuai dengan kebutuhan seluruh aset yang ada.

Hasil sensus BMN Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang bertujuan untuk mendata. mengkoreksi pencataatan dan penghapusan terhadap BMN yang sudah tidak dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Hasil sensus BMN tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 50 dan 51.

Penghentian penggunaan dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau penyediaan layanan umum. Suatu aset dapat dihentikan penggunaannya karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang. rusak berat. hilang. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset tersebut merupakan aset yang tidak dapat lagi memberi manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan sehingga hanya menambah beban pemerintah apabila tidak segera dihapuskan. Dari aspek akuntabilitas. aset yang telah dihentikan penggunaannya akan membebani Neraca Laporan Keuangan Pemerintah karena terdapat aset yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi tetapi tetap dilaporkan. Dari aspek efisiensi. terhadap aset yang telah dihentikan penggunaannya memungkinkan adanya pengeluaran biaya dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu untuk merawat dan menjaga aset tersebut. Selain itu. adanya aset yang dihentikan penggunaannya yang tak kunjung dihapuskan juga bertentangan dengan asas fungsionalitas dalam pengelolaan BMN.

Tabel 50. Hasil Sensus BMN Elektronik BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025

No	Nama Barang	Terdaftar	Teridentifikasi	Belum di Temukan	Kondisi			Hapus
					Baik (B)	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Bermotor	10	10	0	10	0	0	0
2	UPS	10	10	0	4	0	6	6
3	Mesin Absensi	1	1	0	1	0	1	1
4	Projector	3	3	0	0	0	3	3
5	Laptop	32	32	0	22	0	10	10
6	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0	1	0	0	0
7	Card Reader	1	1	0	0	0	1	1
8	Home Theater	1	1	0	1	0	0	0
9	Audio Mixing Portable	1	1	0	0	0	1	1
10	Wireless Mic	1	1	0	1	0	0	0
11	PowerSupply Microphone	1	1	0	1	0	0	0
12	Chairman_Audio Conference	1	1	0	0	0	1	1
13	Megaphone	1	1	0	1	0	0	0
14	Stand Hand Mic	1	1	0	0	0	0	0
15	Mic Microphone	12	12	0	12	0	0	0
16	Wireless	8	8	0	0	0	8	8
Jumlah Elektronik		**473**	**85**	**85**	**0**	**54**	**0**	**31**

Tabel 51. Hasil Sensus BMN Non Elektronik BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2025

No	Nama Barang	Terdaftar	Teridentifikasi	Belum di Temukan	Kondisi			Hapus
					Baik (B)	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Non Elektronik							
2								
3	Partisi	1	1	0	1	0	0	0
4	Kasur/Spring Bed	14	14	0	14	0	0	0
5	Lemari Penyimpanan	71	71	0	55	0	16	16
6	Workstation	32	32	0	31	0	0	0
7	Meja	122	122	0	122	0	7	7
8	Kursi	269	269	0	269	0	0	0
9	Rak	11	11	0	11	0	0	0
10	Holder (Book Holder)	0	0	0	0	0	0	0
11	Buku	17	17	0	0	0	17	17
12	Mesin Ketik dan Mesin Hitung	0	0	0	0	0	0	0
13	Fire Alarm	0	0	0	0	0	0	0
14	Tas Laptop	0	0	0	0	0	0	0
15	Papan Nama	1	1	0	0	0	1	1
16	White Board	1	1	0	0	0	1	1
17	Dispenser	0	0	0	0	0	0	0
18	Kabel Roll	2	2	0	0	0	2	2
19	Karpet	0	0	0	0	0	0	0
20	Tabung Pemadam Api	5	5	0	5	0	0	0
21	Genset	1	1	0	1	0	0	0
Jumlah Non Elektronik		547	547	0	509	0	44	44
Total Elektronik + Non Elektronik		632	632	0	563	0	75	75

Barang milik negara yang telah melampui batas usia produktif akan dikembalikan ke negara. BRMP Agroklimat telah berhasil melaksanakan penghapusan BMN melalui Setjen ke Kementerian keuangan. Proses penghapusan telah sampaoi ke KPKNL wilayah Bogor. Adapun barang yang akan dihapuskan dari daftara BMN BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian antara lain mebeler, alat pengukur debit ait yang dinyatakan hilang dan lain sebagainya.

Layanan Manajemen Keuangan

Layanan manajemen keuangan merupakan mata anggaran dalam rencana kerja Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan. Tahun 2025 pagu anggaran Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan sebesar Rp. 16.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.811.000 atau 98,82%.

Tabel 52. Pagu dan realisasi anggaran pengelolaan keuangan dan perlengkapan tahun 2025

URAIAN	PAGU Anggaran dalam DIPA (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	*16.000.000*	15.811.000	98,82	189.000
Belanja Bahan	500.000	500.000	100,00	0
- Fotokopi dan Penggandaan Laporan	500.000	500.000	100,00	0
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.497.000	99,80	3.000
- ATK, bahan komputer dan penunjang lainnya	1.500.000	1.497.000	99.80	3.000
Belanja Perjalanan Biasa	14.000.000	13.814.000	54,54	186.000
- Uang harian	11.575,000	11.544.000	98,67	31.000
- Transport	1.000.000	995.000	99,73	5.000
- Biaya Penginapan	1.425.000	1.275.000	89,47	150.000

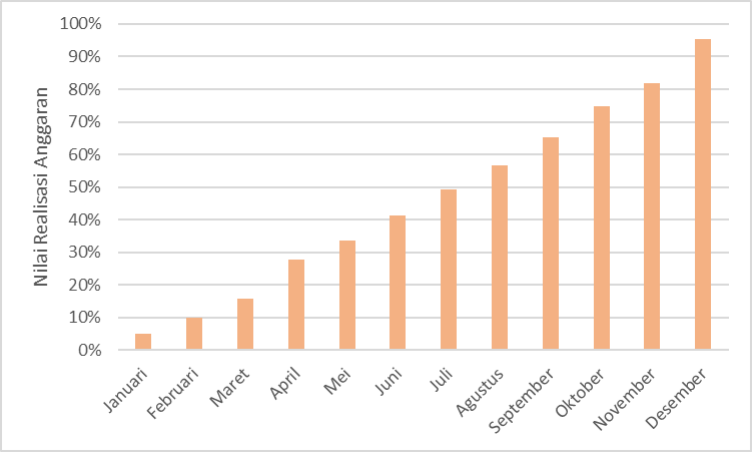

Gambar 54. Grafik realisasi anggaran BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

5.2. Manajemen Kepegawaian Rumah Tangga dan Sistem Manajemen Mutu

Untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin akuntabilitas dan Transparansi pelaksanaan administrasi kegiatan di Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian TA 2025, maka diperlukan kegiatan pendukung yang salah satunya diaktualisasikan kedalam Kegiatan Manajemen Kepegawaian, Rumah Tangga dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu 1) Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga 2) Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015.

Paradigma baru dalam proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini memerlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian maka setiap pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengelola anggaran secara tertib, taat aturan ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan menghasilkan output yang dapat diukur untuk mendukung pelaksanaan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Pengembangan sistem pengelolaan pegawai yang akurat dan terkini diperlukan sistem penyajian informasi melalui program basis data, Balai Pengujian Standar

Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian melalui komputerisasi data kepegawaian yang dituangkan dalam sitem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN) berbasis Web. Aplikasi SIMASN ini telah dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian sejak Tahun 2015 dan mulai Tahun 2016 setiap UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian harus menggunakannya dan selalu mengupdate apabila terdapat mutasi kepegawaian, sistem ini juga untuk mendukung basis data kepegawaian yang telah dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pengajuan mutasi pegawai. Sementara itu BKN telah mengembangkan sistem informasi Kepegawaian berbasis web yang dapat diakses oleh masing-masing Instansi Pemerintah yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Sesuai UU No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan Pasal 3 Menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggung-jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggung-jawaban nasional bagi kegiatan pemerintahan.

Sedangkan Pasal 6 Ayat d mengamanatkan perlu dilaksanakannya usaha-usaha mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan diantaranya melalui pengkajian-pengkajian dibidang perlengkapan-perlengkapan teknis kearsipan. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan kearsipan menuju kearah kesempurnaan, diperlukan suatu sistem dan sarana sehingga penyelenggaraan kearsipan khususnya arsip dinamis dapat terlaksana sebaik-baiknya, Balitklimat mulai Tahun 2016 sudah mempunyai sarana dan fasilitas untuk mendukung kesempurnaan tata laksana kearsipan yaitu ruangan khusus dan rak untuk menyimpan serta fasilitas pendukung lainnya. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penertiban arsip Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Tujuan kegiatan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan sistem manajemen mutu antara lain untuk menyusun basis data kepegawaian secara berkala dan berkelanjutan, menyusun administrasi kepegawaian secara sistematis dan praktis; melaksanakan perbaikan dokumentasi, perbaikan proses, perbaikan komunikasi antar unit, meningkatkan produktifitas kerja, dan meningkatkan efisiensi waktu; serta mempertahankan Pengelolaan pelayanan dalam menjaga konsistensi penerapan ISO 9001:2015.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Beberapa kegiatan dilakukan dengan cara perekaman dokumen sumber dan dilakukan prosessing data dengan menggunakan software. Prosedur perekaman/entri dan prosesing data ini meliputi penerimaan dokumen, verifikasi, perekaman dan pelaporan.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMASN) selalu diupdate dengan data mutasi pegawai karena sangat membantu dalam perencanaan pengadaan pegawai, pengembangan karir dan pengurusan administrasi pegawai seperti: kenaikan pangkat, pengaktifan, pembebasan, pengusulan angka kredit pejabat fungsional, perencanaan penugasan belajar. Sampai akhir tahun 2025 ini jumlah pegawai di BRMP AHP sebanyak 44 pegawai yang terdiri atas 39 PNS dan 5 orang PPPK. SDM lainnya sebanyak 21 PPNPN yang bekerja sebagai staf administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan sopir. Tahun 2025 ini ada 3 (dua) pegawai PPNPN yang diterima sebagai PPPK di lingkup Kementan. Tingkat Pendidikan SDM 3 orang berpendidikan S3, 8 orang S2, 12 orang S1, 8 orang D3, dan 12 orang SMU sederajat. Dari sisi golongan terdapat 1 orang golongan IV, 24 orang golongan III, 9 orang golongan II, 1 golongan XI dan 1 golongan VII. Jabatan fungsional tertentu ditahun 2025 antara lain ASTA, Analis PSP, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Perekayasa, Analis SDMA, Pranata Keuangan dan Perencana, sedangkan jabatan fungsional umum ada sebanyak 6 jabatan.

Di tahun 2025 dari sisi kepegawaian terdapat keniakan pangkat untuk beberapa pegawai dalam periode April dan Oktober 2025 dari BRMP AHP sebanyak 3 pegawai dari golongan IIc ke IId, IId ke IIIa maupun IIIa ke IIIb.

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terus berusaha terus untuk membangun peningkatan sumberdaya manusia dengan mengakomodir usulan tugas belajar maupun ijin belajar. Ada lima petugas atau ijin belajar atas nama Naadaa Rachmawati S1 Universitas Bakrie (lulus 2025), Risqa Nurkhaida Rahma, S.TP S2 IPB (on the track)., Husna Alfiani S2 UI (lulus 2025), Rima Purnamayani, SP,M.Si S3 IPB (lulus 2025) dan Andrianus H. W., A,Md S1 UT (on the track).

Dengan berpedoman dalam ketentuan Permentan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas Belajar dan lzin Belajar PNS Lingkup Kementerian Pertanian Pasal 31 Poin b "Persyaratan bagi PNS lzin Belajar memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PNS. Atas dasar tersebut kami sampaikan bahwa BRMP akan menerbitkan kembali surat lzin Belajar Atas Biaya Sendiri Pegawai pegawai izin belajar sebagaimana terlampir sesuai ketentuan Permentan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas Belajar dan lzin Belajar PNS Lingkup Kementerian Pertanian setelah memenuhi persyaratan masa kerja, sehingga ajuan ijin belajar atas nama Andi Damar Kuncoro dan Kuwat Setiawan sementara belum diijinkan sampai memenuhi waktu menjadi PNS selama 2 tahun.

5.2.1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Entri data kepegawaian di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian ke dalam Subsistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMASN) terdiri dari:

1. Data dasar pegawai;
2. Data riwayat pendidikan formal dan informal;
3. Data riwayat latihan penjenjangan;
4. Data riwayat kepangkatan;
5. Data riwayat pekerjaan;
6. Data istri/suami;
7. Data anak;
8. Data keikutsertaan dalam lokakarya dan seminar;
9. Data Mutasi Pegawai (pensiun, Kenaikan Pangkat)
10. Survei Indek Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
11. Upload Data arsip masing-masing pegawai kedalam SIM ASN Kementan.

Kegiatan Update SIM ASN dilakukan secara rutin dilakukan setiap ada mutasi pegawai dan sinkronisasi data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dengan SIMASN. Dalam rangka tercapainya validitas dan akurasi data pegawai BSIP, maka perlu dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan data Pegawai pada Aplikasi SIMASN di Unit Kerja/UPT lingkup BSIP.

Selain kegiatan update SIM ASN, Kepegawaian telah dilakukan pengurusan kenaikan pangkat TA 2025:

- Farida Oktavia, SP naik IIIb
- Andrianus Herliyanto AW, A.Md naik IId
- Yudi Kusmana naik IIIa

Aplikasi SIMASN berbasis WEB menghasilkan keluaran-keluaran antara lain: (1) Daftar Nominatif, (2) Daftar Urut Kepangkatan (DUK), (3) Daftar Pegawai, (4) Daftar Pejabat, (5) Daftar SKP, (6) Laporan, dan (7) Rekapitulasi-rekapitulasi.

Tabel 53. Rincian Tenaga berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	3
2.	S2	8
3.	S1	12
4.	SARJANA MUDA & D 3	8
5.	SLTA	12
J U M L A H		**43**

Tabel 54. Rincian Tenaga Berdasarkan Golongan 2025

NO	GOLONGAN	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
1.	IV	1
2.	III	24
3.	II	9
4.	IX	1
5.	VII	1
J U M L A H		**36**

Tabel 55. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional 2025

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Teknisi Litkayasa Penyelia	1
2	Teknisi Litkayasa Terampil	4
3	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	2
4	Arsiparis Terampil	2
5	ASTA Ahli Muda	1
6	ASTA Ahli Pertama	5
7	Analis PSP Ahli Muda	1
8	Analis PSP Ahli Pertama	4
9	Pranata komputer pertama	2
10	Perekayasa Ahli Pertama	1
11	Analis SDMA Ahli Pertama	1
12	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
13	Perencana Ahli Pertama	1
JUMLAH		**26**

Tabel 56. Rincian Tenaga Berdasarkan Jabatan Fungsional Pelaksana 2025

NO	JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA	JUMLAH
1	Operator Layanan Operasional	3
2	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
3	Penelaah Teknis Kebijakan	2

NO	JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA	JUMLAH
4	Pengadministrasi Perkantoran	5
5	Pengelola Layanan Operasional	1
6	Pengolah Data dan Informasi	1
Jumlah		**15**

5.2.1.1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPPK direkrut untuk mengisi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya jabatan fungsional dan jabatan tertentu yang memerlukan keahlian dan kompetensi spesifik. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan publik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN.

Tabel 57. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Septian Tri Putranto, SP	198509212025211016	Perencana Ahli Pertama
2	Andri Purna Irawan	197802272025211004	Pengadministrasi Perkantoran
3	Reagan Raymond	198103302025211007	Pengadministrasi Perkantoran

5.2.1.2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada tahun 2025 telah menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai hasil dari proses seleksi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penerimaan CPNS ini merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Agroklimat dalam bidang perakitan dan modernisasi agroklimat.

CPNS yang diterima telah melalui seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi. Kehadiran CPNS baru di lingkungan BRMP Agroklimat diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kapasitas teknis dan administrasi, serta mendorong inovasi dalam mendukung program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pengembangan pertanian modern.

Dengan diterimanya CPNS tersebut, BRMP Agroklimat berkomitmen untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar CPNS dapat beradaptasi dengan budaya kerja organisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, serta memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran BRMP Agroklimat.

Tabel 58. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025

No	Nama	Jabatan
1	Mahdiyah Ma Sumah, S.Si	Analis Standardisasi Ahli Pertama
2	Kharissa Nurmanita Kusuma, SP	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama
3	Muhammad Ibas, SAP	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
4	Devi Alvitasari, S.Pd., M.Si	Perekayasa Ahli Pertama
5	Amelia Candra Wati, S.Si	Analis Standardisasi Ahli Pertama
6	Ardane Swari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama

5.2.1.3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu

Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian telah lulus sebanyak 21 PPPK Paruh Waktu yang bekerja sebagai staf administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan sopir. Telah terbit Pertek dan SK untuk PPPK Paruh Waktu pada Bulan November 2025 dengan TMT per 1 November 2025. Selanjutnya juga sudah ditandatangani perjanjian kinerja PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja 1 November 2025 sampai 31 Oktober 2026.

Tabel 59. Daftar Daftar PPPK Paruh Waktu 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Edi Susanto	198202062025211048	Penata Layanan Operasional
2	Moch Agustian	199608302025211041	Operator Layanan Operasional
3	Heri Irawan	199304222025211048	Pengelola Umum Operasional
4	Imam Susilo	197412082025211023	Operator Layanan Operasional
5	Mamat	198601102025211068	Pengelola Umum Operasional
6	Wahyu Eka Triyana	198210042025211040	Operator Layanan Operasional
7	Deky Gustaman	199012072025211078	Operator Layanan Operasional
8	Jamalludin	197108172025211046	Pengelola Umum Operasional
9	Heri Mashuri	198610282025211083	Operator Layanan Operasional
10	Yogi Buchori	198607092025211068	Operator Layanan Operasional
11	Lentik Mojang Triana	200006192025212029	Operator Layanan Operasional
12	Amirulloh	198310272025211049	Pengelola Umum Operasional
13	Daeng Muda Panglima	198909302025211069	Operator Layanan Operasional
14	Gina Maulana Kurnia	197802202025211030	Penata Layanan Operasional
15	Saepudin	197710202025211028	Operator Layanan Operasional
16	Ahmad Jaelani	198512072025211074	Pengelola Umum Operasional
17	Budi Permana	197905202025211053	Operator Layanan Operasional
18	Guntoro	198108212025211044	Operator Layanan Operasional
19	Iswadi Antriono	197808072025211048	Operator Layanan Operasional
20	Aspian Ihsan	198604032025211111	Operator Layanan Operasional
21	Eko Prasetyo	198407182025211098	Penata Layanan Operasional

5.2.1.4. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu bentuk penghargaan atas prestasi kerja, pengabdian, serta loyalitas pegawai terhadap negara.

Kenaikan pangkat pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan status kepegawaian semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan karier pegawai untuk meningkatkan motivasi, kinerja, serta profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Secara umum, kenaikan pangkat dapat dibedakan menjadi:

1. Kenaikan Pangkat Reguler, yang diberikan kepada pegawai setelah memenuhi masa kerja dan persyaratan administratif tertentu.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan, yang diberikan atas dasar prestasi kerja luar biasa, menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, maupun setelah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

Dalam prosesnya, kenaikan pangkat juga berhubungan erat dengan evaluasi kinerja, penilaian disiplin, serta kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian. Dengan demikian, setiap kenaikan pangkat harus dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah jabatan. Melalui sistem kenaikan pangkat yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi, diharapkan terwujud Aparatur Sipil Negara yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Tabel 60. Daftar Kenaikan Pangkat BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025

No	Nama	Kenaikan Pangkat	Status
1	Farida Oktavia, SP	3B	Telah terbit SK
2	Andrianus Herliyanto AW, A.Md	2D	Telah terbit SK
3	Yudi Kusmana	3A	Telah terbit SK

5.2.1.5. Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah dua bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun keduanya bertujuan untuk memajukan karier PNS melalui pendidikan dan pelatihan, keduanya memiliki perbedaan dalam pembiayaan.

Tabel 61. Monitoring Petugas Belajar dan Ijin Belajar

No	Nama	Status Belajar	Keterangan
1	Naadaa Rahmawati, A.Md	Ijin Belajar S1 Univ. Bakri	Lulus
2	Husna Alfiani, ST	Tubel S2 UI	Lulus
3	Risqa Nurkhaida R., STP	Ijin Belajar S2 IPB	*On the track*
4	Rima Purnamayani, SP., M.Si	Ijin Belajar S3 IPB	Lulus
5	Andrianus HHW, A.Md.	Ijin Belajar S1 UT	*On the track*

5.2.1.6. Pencantuman Gelar

Pencantuman gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bentuk pengakuan atas kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gelar dapat dicantumkan dalam data kepegawaian, surat menyurat dinas, serta dokumen resmi lainnya apabila telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Tahun 2025 ada sebanyak empat pegawai yang telah berhasil mengajukan pencantuman gelar.

Tabel 62. Pencantuman gelar pegawai

No	Nama	Jenjang Pendidikan
1	Dr. Muchamad Wahyu Trinugroho, ST. M.Eng	S3
2	Husna Alfiani, ST. MTI	S2
3	Dariin Firda, S.Si., M.Sc	S2
4	Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si	S3

5.2.1.7. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Ujian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen sumber daya manusia aparatur guna memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tuntutan jabatan yang diemban. Pelaksanaan ujian kompetensi bertujuan untuk mengukur dan menilai kemampuan ASN secara objektif, baik dari aspek kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melalui ujian kompetensi, instansi memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil ujian ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, promosi, mutasi, serta perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Pelaksanaan ujian kompetensi ASN juga mencerminkan komitmen instansi terhadap penerapan prinsip merit sistem, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur. Dengan demikian, diharapkan ASN yang dinyatakan kompeten mampu memberikan kinerja yang optimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Tabel 63. Peserta uji kompetensi jabatan fungsional 2025

No	Nama	Jenjang Pendidikan
1	Dr. Muchamad Wahyu Trinugroho, ST. M.Eng.	Analis PSP
2	Dariin Firda, S.Si., M.Sc	Analis PSP

Usulan uji kompetensi di semester 2 telah dilakukan. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan terwujud PNS yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 64. Usulan jabatan baru

No	Nama	Jabatan yang dituju
1	Dr. Muchamad Wahyu Trinugroho, ST., M.Eng.	Perekayasa Ahli Muda
2	Annisa Noyara Rahmasari, S.Si., M.Sc	Perekayasa Ahli Pertama
3	Naadaa Rahmawati, A.Md	Teknisi Litkayasa Mahir

5.2.1.8. Pelantikan Jabatan Fungsional

Pelantikan Jabatan Fungsional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan kenaikan atau pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang dilantik telah memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi, dan kompetensi jabatan, serta dinilai mampu melaksanakan tugas jabatan fungsional secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui

pelantikan ini, diharapkan pejabat fungsional dapat menjalankan peran strategis sesuai bidang keahliannya serta berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. Tahun 2025 telah dilantik sebanyak tiga pegawai ke dalam jabatan fungsional.

Tabel 65. Pelantikan jabatan fungsional

No	Nama	Tujuan
1	Nurwindah Puji Lestari, S.Si., M.Si	Asta Ahli Pertama
2	Dariin Firda, S.Si., M.Si	Analis PSP Ahli Pertama
3	Dian Andriani, A.Md	Pranata Keuangan APBN Penyelia

Gambar 55. Pelantikan pejabat fungsional

5.2.1.9. Mutasi Jabatan

Mutasi pegawai merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mutasi dilakukan sebagai upaya penataan dan pemerataan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai. Tahun 2025 terdapat mutasi pegawai BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Tabel 66. Perubahan pejabat struktural dan Mutasi eksternal BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

No	Nama	Tujuan
1	Yulius Argo Baroto, ST	BRMP Yogyakarta
2	Raden Iman Muhardiono Br., SP., MPSDA	Ditjen LIP
3	Mahdiyah Ma Sumah, S.Si	Ditjen LIP

5.2.1.10. Ujian Dinas Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, persyaratan administratif untuk mengikuti Ujian Dinas adalah sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir golongan ruang II/d (untuk Ujian Dinas Tingkat I), dan golongan ruang III/d (untuk Ujian Dinas Tingkat II). Tahun 2025 juga dilaksanakan Ujian Penyetaraan Kenaikan Pangkat (UPKP).

Tabel 67. Daftar Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyetaraan Kenaikan Pangkat BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	Hasil
1	Rusli Royani	Operator Layanan Operasional	II/d	Tidak Lulus
2	Dwima Daru Alam, A.Md	Teknisi Litkayasa Teram[il	II/c	Lulus

5.2.1.11. Peta Jabatan

Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan gambaran sistematis mengenai susunan jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang disusun berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku. Penyusunan peta jabatan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap kebutuhan jabatan dan sumber daya manusia ASN, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, dan pembinaan karier pegawai. Dengan adanya peta jabatan, instansi dapat memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

Selain itu, peta jabatan ASN berperan penting dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis merit, karena menjadi acuan dalam penilaian kesesuaian antara pegawai dan jabatan (job–person fit). Peta jabatan juga menjadi instrumen strategis dalam penataan organisasi, analisis beban kerja, serta penetapan kebutuhan formasi ASN secara objektif dan terukur. Dengan demikian, peta jabatan ASN merupakan dokumen fundamental yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Telah terbit peta jabatan Kementan tahun 2025.

Tabel 68. Peta jabatan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

AA. PETA JABATAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan		Bezzeting		+/-		Katerangan
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Jabatan Administrator									
1	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian	13	1	0	1	0	0	0	
	Total Jabatan Administrator		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	
Jabatan Pengawas									
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	0	1	0	0	0	
	Total Jabatan Pengawas		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	
Jabatan Pelaksana									
1	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	4	0	3	0	-1	0	
2	Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	0	-1	0	
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	3	0	0	0	
4	Pengelola Layanan Operasional	6	1	0	1	0	0	0	
5	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0	
6	Operator Layanan Operasional	5	3	0	3	0	0	0	
7	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	2	3	2	0	0	
	Total Jabatan Pelaksana		**17**	**2**	**15**	**2**	**-2**	**0**	
Jabatan Fungsional									
1	**Analis Pemanfaatan IPTEK**								
	Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda		2	0	0	0	-2	0	
	Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama		2	0	0	0	-2	0	
	Total Analis Pemanfaatan IPTEK		**4**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**0**	
2	**Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara**								
	Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
	Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
	Total Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara		**2**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**	
3	**Analis Prasarana dan Sarana Pertanian**								
	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0	
	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10	3	0	1	0	-2	0	
	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8	5	0	4	0	-1	0	
	Total Analis Prasarana dan Sarana Pertanian		**11**	**0**	**5**	**0**	**-6**	**0**	
4	**Analis Standardisasi**								
	Analis Standardisasi Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
	Analis Standardisasi Ahli Muda	9	3	0	1	0	-2	0	
	Analis Standardisasi Ahli Pertama	8	5	0	5	0	0	0	
	Total Analis Standardisasi		**9**	**0**	**6**	**0**	**-3**	**0**	
5	**Analis Sumber Daya Manusia Aparatur**								
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	0	1	0	0	0	
	Total Analis Sumber Daya Manusia Aparatur		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	
6	**Perekayasa**								
	Perekayasa Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
	Perekayasa Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0	
	Perekayasa Ahli Pertama	8	5	0	1	0	-4	0	
	Total Perekayasa		**8**	**0**	**1**	**0**	**-7**	**0**	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan		Bezzeting		+/-		Katerangan
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
6	**Perekayasa**								
	Perekayasa Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
	Perekayasa Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0	
	Perekayasa Ahli Pertama	8	5	0	1	0	-4	0	
	Total Perekayasa		**8**	**0**	**1**	**0**	**-7**	**0**	
7	**Perencana**								
	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0	
	Total Perencana		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	
8	**Pranata Hubungan Masyarakat**								
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	1	0	0	0	-1	0	
	Total Pranata Hubungan Masyarakat		**2**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**	
9	**Pranata Komputer**								
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	1	1	0	0	
	Total Pranata Komputer		**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	
10	**Arsiparis**								
	Arsiparis Mahir	7	1	0	0	0	-1	0	
	Arsiparis Terampil	6	1	1	1	1	0	0	
	Total Arsiparis		**2**	**1**	**1**	**1**	**-1**	**0**	
11	**Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara**								
	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9	1	0	0	0	-1	0	
	Pranata Keuangan APBN//Pengawas Keuangan Negara Mahir	8	1	0	0	0	-1	0	
	Pengawas Keuangan Negara/Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1	0	0	0	-1	0	
	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara		**3**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	
12	**Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur**								
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	0	0	0	-1	0	
	Total Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		**1**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	
13	**Teknisi Penelitian dan Perekayasaan**								
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8	1	0	1	0	0	0	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	7	5	0	0	0	-5	0	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	6	6	0	4	0	-2	0	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula	5	2	0	2	0	0	0	
	Total Teknisi Penelitian dan Perekayasaan		**14**	**0**	**7**	**0**	**-7**	**0**	
	Total Jabatan Fungsional		**58**	**3**	**22**	**3**	**-36**	**0**	
	TOTAL PEGAWAI		**77**	**5**	**39**	**5**	**-38**	**0**	
			82		**44**		**-38**		

5.2.1.12. Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan secara terus-menerus dalam menjalankan tugas negara selama jangka waktu tertentu. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, atau 30 tahun secara berkesinambungan serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui pemberian Satyalancana Karya Satya, pemerintah menegaskan komitmen dalam menghargai pengabdian dan jasa PNS yang telah memberikan kontribusi nyata bagi

bangsa dan negara, sekaligus menumbuhkan semangat pengabdian serta keteladanan di lingkungan birokrasi.

Tabel 69. Penerima Satyalancana Karya Satya

No	Nama	Jabatan	SLKS
1	Dr. Rima Purnamayani Sp, M.Si	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian	X
2	Nurwindah Pujilestari S.Si, M.Si.	Analis Standardisasi Ahli Pertama	X
3	Farida Oktavia, SP	Analis Standardisasi Ahli Pertama	X
4	Risqa Nurkhaida Septia Rakhma Stp	Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	X
5	Epen Supendi	Pengelola Layanan Operasional	X
6	Yudi Kusmana	Operator Layanan Operasional	X
7	Dian Andriani A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	X
8	Saca Wiharja	Operator Layanan Operasional	X
9	Heri Wibowo ST., M.Sc.	Kepala Subbagian Tata Usaha	X
10	Sujihaddin	Pengadministrasi Perkantoran	X
11	Rusli Royani	Operator Layanan Operasional	X
12	Akhmad Faisal Rakhman	Pengadministrasi Perkantoran	X
13	Sulistyawati A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	X
14	Tri Nandar Wihendar S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	X
15	Budi Rahayu	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Penyelia	X
16	Adang Hamdani SP, M.Si	Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda	XX
17	Asep Hidayat	Pengadministrasi Perkantoran	X
18	Muhammad Nur Imansyah S.Kom	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	X
19	Dr. Kharmila Sari Hariyanti S.Si.,M.Si	Analis Standardisasi Ahli Muda	X
20	Dhany Hendra Pradana ST	Pengolah Data Dan Informasi	X

Per Bulan Juni 2025 telah diajukan ***Satyalancana Karya Satya periode tahun 2025*** pada pegawai BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Tabel 70. Penerima Satyalancana Karya Satya 2025

No	Nama	Jabatan	SLKS
1	Dr. Rima Purnamayani SP., M.Si	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	XX
2	Dr. Kharmila Sari Hariyanti	Analis Standardisasi Ahli Muda	XX
3	Budi Rahayu	Teknisi Litkayas Penyelia	XX
4	Nurwindah Puji Lestari, S.Si., M.Si	Analis Standardisasi Ahli Pertama	XX
5	Tri Nandar Wihendar, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	XX
6	Dr. Muchamad Wahyu Trinugroho, ST., M.Eng	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	X
7	Husna Alfiani, ST., MTI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	X

5.2.1.13. Monev GAB Analisis Jabatan

Kesesuaian antara jabatan dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. Penempatan ASN pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya bertujuan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman kerja yang dimiliki.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, pegawai telah menempati jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dimiliki. Kesesuaian ini mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kinerja unit kerja. Analisis kesesuaian jabatan ini bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Tabel 71. Kesesuaian jabatan dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si	Kepala Balai	Belum mengikuti Diklatpim
2	Budi Rahayu,	Teknisi Litkayasa Penyelia	Jenjang pendidikan belum sesuai (SMA)
3	Andi Damar Kuncoro Aji,	Teknisi Litkayasa Pemula	Jenjang pendidikan belum sesuai (SMA)
4	Kuwat Setiyawan,	Teknisi Litkayasa Pemula	Jenjang pendidikan belum sesuai (SMA)
5	Epen Supendi,	Pengelola Layanan Operasional	Jenjang Pendidikan belum sesuai. Harusnya D3

5.2.1.14. Pengukuhan Ketua Tim Kerja

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Telah terbit Keputusan Menteri Pertanian No 649/Kpts. /OT. 050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tertanggal 6 Agustus 2025. Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas penyeliaan berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
    1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian;
    3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian;

4. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan
5. Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang agroklimat dan hidrologi pertanian

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil

1. Melaksanakan layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian, dan penilaian kesesuaian;
2. Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian, serta kebun instalasi; dan
3. Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyebarluasan, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Adapun ketua tim kerja yang dilantik pada 20 Agustus 2025 adalah:

1. Adang Hamdani, SP., M.Si sebagai Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
2. Husna Alfiani, SR., M.TI sebagai Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil

Gambar 56. Pelantikan ketua tim kerja

5.2.1.15. Purna Bhakti Pegawai

Masa purna bhakti bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang penuh makna. Pada momen yang penuh haru dan kebanggaan ini, kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Tedi Rustandi, yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai pegawai BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Selama puluhan tahun mengabdi, Pak Tedi menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan semangat kerja yang luar biasa. Tak terhitung sumbangsih yang telah diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun keteladanan. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap hasil kerja peghawai telah menjadi bagian penting dari perjalanan dan kemajuan organisasi ini.

Gambar 57. Pegawai purna tugas

5.2.1.16. Matriks Mutasi Pegawai

No	Nama	Gol	TMT Gol	Jabatan	Pendidikan	Mutasi			
						Kenaikan Gol	TMT Kenaikan Gol	Mutasi	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HERI WIBOWO, ST., M.Sc.	3D	4/1/2024	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	S2 Tahun : 2018	4A	1/4/2028	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler struktural
2	MUHAMMAD ADRIAN MUNAF KARIM, S.T.P., MPSDA	3B	3/1/2023	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PERTAMA	S2 Tahun : 2016	3C	1/1/2027	Analis PSP Muda	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
3	ANNISA NOYARA RAHMASARY, S.Si, M.Sc.	3B	3/1/2023	ANALIS STANDARDISASI PERTAMA	S2 Tahun : 2017	3C	1/1/2027	ASTA Muda	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
4	RISQA NURKHAIDA SEPTIA RAKHMA, STP	3A	7/1/2015	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PERTAMA	S1 Tahun : 2011	3B	1/10/2026	Analis PSP Muda	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
5	FARIDA OKTAVIA, SP	3B	1/10/2025	ANALIS STANDARDISASI PERTAMA	S1 Tahun : 2008	3C	1/10/2029	ASTA Muda	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
6	ANDRIANUS HERLIYANTO ADI WIBOWO, A.Md.	2D	1/11/2025	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL	D3 Tahun : 2012	3A	1/10/2029	Litkayasa Mahir	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
7	MIA DWI HADIDAWATI, A.Md.Bns	VII	1/11/2023	ARSIPARIS TERAMPIL	D3 Tahun : 2016				
8	INDRA SATRIA EBRIANDA, A.Md.	2C	3/1/2023	ARSIPARIS TERAMPIL	D3 Tahun : 2015	2D	1/1/2028	Arsiparis Terampil	Kenaikan pangkat melalui JFT
9	ADANG HAMDANI, SP, M.Si	3D	10/1/2019	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MUDA	S2 Tahun : 2013	4A	1/10/2026	Anslis PSP Madya	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
10	BUDI RAHAYU,	3C	1/8/2024	TEKNISI LITKAYASA PENYELIA	SLTA Tahun :	3D	1/8/2028	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat melalui JFT
11	NAADAA RACHMAWATI, A.Md	2D	4/1/2023	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL	D3 Tahun : 2016	3A	1/4/2025	Litkayasa Mahir	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
12	DWIMA DARU ALAM, A.Md.	2C	3/1/2023	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL	D3 Tahun : 2017	3A	1/3/2026	Litkayasa Mahir	KPPI
13	ANJAS BAGUS PRAWIRA NAPITU, A.Md.	2C	3/1/2023	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL	D3 Tahun : 2020	2D	1/1/2028	Litkayasa Mahir	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
14	ANDI DAMAR KUNCORO AJI,	2A	3/1/2023	TEKNISI LITKAYASA PEMULA	SLTA Tahun : 2006	2B	1/1/2028	Litkayasa Terampil	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
15	KUWAT SETIYAWAN,	2A	3/1/2023	TEKNISI LITKAYASA PEMULA	SLTA Tahun : 2007	2B	1/1/2028	Litkayasa Terampil	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
16	MUHAMMAD MULQAN AMIN SAPUTRA, ST	IX	1/11/2023	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	S1 Tahun : 2015				
17	KHARMILA SARI HARIYANTI, S.Si.,M.Si	3D	4/1/2018	ANALIS STANDARDISASI MUDA	S2 Tahun : 2009	4A	1/8/2024	ASTA Madya	Kenaikan pangkat dan jabatan melalui JFT
18	HUSNA ALFIANI, ST	3D	4/1/2023	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S1 Tahun : 2009	3D	4/1/2027	Pranata Humas	Tidak bisa naik ke 4A, Tugas belajar, harus ke JFT
19	MUCHAMAD WAHYU TRINUGROHO, ST., M.Eng	3D	10/1/2023	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S2 Tahun : 2017	4A	10/1/2027	ASTA/Analis PSP	Tugas belajar, harus masuk JFT
20	DIAN ANDRIANI, A.MD	3C	4/1/2023	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	D3 Tahun : 1996			Ke Pranata APBN Penyelia	Masuk JFT, menunggu peta jabatan
21	SULISTYAWATI, A.Md	3B	4/1/2023	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	D3 Tahun : 2004	3C		Ke Pranata APBN Mahir	Masuk JFT, menunggu peta jabatan
22	EPEN SUPENDI,	3A	4/1/2022	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SLTA Tahun : 1988	3B	1/4/2026	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
23	SUJIHADDIN,	3A	4/1/2023	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA Tahun : 1995	3B	1/4/2027	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
24	SACA WIHARJA,	3A	4/1/2023	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA Tahun : 1994	3B	1/4/2027	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
25	AKHMAD FAISAL RAKHMAN,	3A	4/1/2022	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA Tahun : 1999	3B	1/4/2026	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
26	YUDI KUSMANA,	3A	10/1/2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA Tahun : 1993	3B	1/10/2029	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
27	RUSLI ROYANI,	2D	4/1/2021	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA Tahun : 1998	3A	1/4/2025	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
28	TRI NANDAR WIHENDAR, S.Si	3D	4/1/2022	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S1 Tahun : 2002	3D			Batas maksimal pangkat golongan
29	MUHAMMAD NUR IMANSYAH, S.KOM	3D	4/1/2023	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S1 Tahun : 2010	3D		Ke APK APBN Pertama	Kenaikan pangkat seanjutnya melalui JFT
30	ASEP HIDAYAT,	3A	10/1/2023	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA Tahun : 1996	3B	1/10/2027	Kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat reguler
31	NURWINDAH PUJILESTARI, S.Si, M.Si.	3D	10/1/2023	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S2 Tahun : 2009	3D	1/5/2026	Ke ASTA Muda	
32	DHANY HENDRA PRADANA, ST	3D	4/1/2023	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	S1 Tahun : 2004	3D		Ke Analis PSP Pertama	Harus ukom untuk masuk ke JFT
33	DARIIN FIRDA, S.Si	3B	4/1/2023	Analis PSP<Pertama	S1 Tahun : 2017	3C		Ke Analis PSP Muda	Kenaikan pangkat melalui JFT
34	Dr. RIMA PURNAMAYANI, SP., M.Si	4A	1/10/2024	KEPALA BALAI	S3 Tahun : 2025	4B	1/10/2028		KP melalui JFT
35	SEPTIAN TRI PUTRANTO, S.P	IX	1/3/2025	PERENCANA AHLI PERTAMA	S1	3B			
36	DEVI ALVITASARI, S.Pd., M.Si	3B	1/5/2025	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	S2	3C			KP melalui JFT
37	ARDANE SWARI, S.Kom	3A	1/5/2025	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S1	3B			KP melalui JFT
38	MUHAMMAD IBAS, S.A.P	3A	1/5/2025	ANALIS SUMBER DATA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S1	3B			KP melalui JFT
39	AMELIA CANDRA WATI, S.Si	3A	1/5/2025	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	S1	3B			KP melalui JFT
40	KHARISSA NURMANITA KUSUMA, S.P	3A	1/5/2025	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S1	3B			KP melalui JFT
41	REAGAN RAYMOND,	V	1/3/2025	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMA				PPPK
42	ANDRI PURNA IRAWAN	V	1/3/2025	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMA				PPPK

5.2.1.17. Peningkatan Kapasitas SDM

a. Pelatihan Smart Irigasi Korea

Pelatihan Smart Irigasi di Korea merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dirancang untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi irigasi modern berbasis digital. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempelajari langsung berbagai inovasi pengelolaan sumber daya air yang telah berhasil diterapkan di Korea Selatan, negara yang dikenal memiliki sistem irigasi cerdas dan efisien. Peserta pelatihan:

1. Adang Hamdani, SP., M.Si
2. Muhammad Adrian Munaf Karim, STP., MPSDA

b. Pelatihan Pelayanan Prima Kementan

Pelatihan Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, khususnya petani, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna layanan sektor pertanian.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai konsep dasar pelayanan prima, standar pelayanan publik sesuai regulasi nasional, teknik komunikasi efektif, pengelolaan pengaduan, serta strategi membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pengguna layanan. Selain materi teori, peserta juga mengikuti sesi praktik dan studi kasus yang menggambarkan situasi pelayanan sehari-hari, sehingga kemampuan peserta dalam memberikan solusi dan respon yang tepat dapat semakin terasah.

Kementerian Pertanian menghadirkan narasumber berpengalaman dari unit-unit teknis dan lembaga pelatihan pemerintah untuk memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang perbaikan layanan di era transformasi digital. Peserta juga diperkenalkan dengan inovasi pelayanan berbasis teknologi untuk mendukung proses kerja yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Tabel 72. Peserta pelatihan pelayanan prima Kementan dari BRMP Agroklimat

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1	Andri Purna Irawan	Pengadministrasi Perkantoran	Resepsionis
2	Iswadi Antriono	Oparetor layanan operasional	Sekurity
3	M. Ronal Sahbana Koswara, S.Si	Operator Layanan	Pelayanan

Gambar 58. Sertifikat pelatihan

c. Pelatihan dasar-dasar pemetaan BRMP SDLP

Pelatihan Dasar-Dasar Pemetaan Tanah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami prinsip-prinsip dasar survei dan pemetaan tanah. Kegiatan ini dirancang untuk

memberikan landasan teknis bagi pegawai, peneliti, maupun tenaga lapangan dalam melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pemetaan karakteristik tanah yang akurat dan sesuai standar.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar tanah, pengenalan jenis-jenis tanah, metode survei lapangan, penggunaan peralatan pemetaan, serta teknik pembuatan peta tanah mulai dari pengumpulan data, interpretasi, hingga penyajian hasil dalam bentuk peta tematik. Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan untuk mengaplikasikan teknik observasi profil tanah, pengambilan contoh, pengukuran koordinat, dan pencatatan data secara sistematis.

Tabel 73. Peserta pelatihan dasar-dasar pemetaan BRMP SDLP 2025

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ibas	Analis SDMA Pertama
2	Devi Alvitasari, S.Pd., M.Si	Perekayasa Pertama
3	Amelia Candra Wati, S.Si	ASTA Pertama
4	Kharissa Nurmanita Kusuma, SP	ASTA Pertama
5	Mahdiyah Ma Sumah, S.Si	Analis PSP Pertama
6	Ardane Swari, S.Kom	Prakom Pertama
7	Akhmad Faisal Rakhman	Pengelola Kepegawaian
8	Kuwat Setiawan	Tekinisi Litkayasa Pemula
9	Andi Damar Kuncoro	Tekinisi Litkayasa Pemula

d. Pelatihan ToT AWS

Pelatihan Training of Trainers (TOT) Pemeliharaan Automatic Weather Stations (AWS) merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai instruktur maupun teknisi dalam pengelolaan dan perawatan stasiun cuaca otomatis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional AWS sehingga data iklim yang dihasilkan tetap akurat, real-time, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penelitian, peringatan dini, hingga pengambilan keputusan di bidang pertanian dan lingkungan.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai prinsip kerja AWS, fungsi setiap sensor (seperti suhu, kelembapan, radiasi matahari, curah hujan, dan kecepatan angin), serta standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan berkala. Kegiatan juga mencakup praktik langsung mengenai kalibrasi sensor, pengecekan sistem tenaga surya, inspeksi perangkat komunikasi data, serta penanganan gangguan teknis yang umum terjadi di lapangan. Pelatihan ToT AWS dengan narasumber Dr. Kharmila Sari Haruyanti dan Tri Nandar Wihendar, S.Si.

Tabel 74. Peserta pelatihan ToT AWS 2025

No	Nama	Jabatan
1	Devi Alvitasari, S.Pd., M.Si	Perekayasa Pertama
2	Amelia Candra Wati, S.Si	ASTA Pertama
3	Kharissa Nurmanita Kusuma, SP	ASTA Pertama
4	Kuwat Setiawan	Tekinisi Litkayasa Pemula
5	Andi Damar Kuncoro	Tekinisi Litkayasa Pemula
6	Naada Rahmawati, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil
7	Dwima Daru Alam, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil
8	Anjas Bagus Napitu, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil

Gambar 59. Pelatihan ToT AWS 2025

e. Pelatihan ASTA

Pelatihan Analis Standardisasi merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai standar, penilaian kesesuaian, serta penerapan prinsip-prinsip standardisasi dalam berbagai kegiatan teknis maupun administrasi. Melalui pelatihan ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar standardisasi, ruang lingkup regulasi teknis, prosedur pengembangan standar, serta peran analis dalam memastikan bahwa proses kerja dan produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Peserta pelatihan analis standardisasi tahun 2025 adalah Dr. Kharmila Sari Haruyanti yang merupakan ASTA ahli muda di BRMP Agroklimat. Pelatihan ini sekaligus untuk persiapan uji kompetensi ke jenjang jabatan ASTA ahli madya.

f. Pelatihan pengoperasian Drone

Pelatihan Pengoperasian Drone untuk Pemetaan Irigasi merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis peserta dalam memanfaatkan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mendukung pemetaan dan monitoring jaringan irigasi. Pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang mampu mengoperasikan drone secara aman, efektif, dan sesuai standar, sekaligus memahami alur kerja pemrosesan citra untuk menghasilkan peta yang akurat.

Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai dasar-dasar aerodinamika drone, regulasi penerbangan, perencanaan misi terbang, teknik pemotretan udara, dan penggunaan berbagai sensor yang digunakan untuk pemetaan lahan irigasi. Selain itu, peserta juga dibimbing dalam praktik lapangan mulai dari persiapan alat, pemeriksaan kelayakan terbang, pengendalian drone, hingga pengambilan data visual dan spasial.

Tabel 75. Peserta pelatihan Drone 2025

No	Nama	Jabatan
1	Devi Alvitasari, S.Pd., M.Si	Perekayasa Pertama
2	Kuwat Setiawan	Tekinisi Litkayasa Pemula
3	Andi Damar Kuncoro	Tekinisi Litkayasa Pemula
4	Naada Rahmawati, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil
5	Dwima Daru Alam, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil
6	Anjas Bagus Napitu, A.Md	Tekinisi Litkayasa Terampil
7	Moch AGustian	Teknisi/Administrasi
8	Budi Rahayu	Teknisi Litkayasa

g. Pelatihan SRIKANDI

Pelatihan SRIKANDI Persuratan merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi pegawai dalam mengelola administrasi persuratan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

Kementan menyelenggarakan pelatihan pada Bulan Oktober 2025 di Wisma Cioayung Kementan. Adapun peserta dari BRMP Agroklimat adalah:

1. Lentik Mojang Triana
2. Mia Hadidawati, A.Md.Bns

h. Sertifikasi Surveyor

Sertifikasi Surveyor merupakan proses penilaian kompetensi profesional yang bertujuan untuk memastikan bahwa seorang surveyor memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, dan integritas kerja sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kualitas hasil survei, baik dalam konteks pemetaan, konstruksi, geospasial, lingkungan, maupun survei teknis lainnya yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Sertifkasi surveyor diikuti oleh 2 pegawai BRMP Agroklimat yaitu:

1. Dr. Muchamad Wahyu Tri Nugroho, ST., M.Eng
2. Rd. Iman Muhardiono Br., SP., MPSDA

i. Pelatihan Pelayanan Prima Agroklimat

Pelayanan prima merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama bagi BRMP Agroklimat yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pelayanan informasi agroklimat, standardisasi, serta pelayanan teknis lainnya. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional semakin tinggi. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Pelatihan hari ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan kita dalam memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Tidak hanya memahami konsep service excellence, tetapi juga membangun sikap kerja yang ramah, responsif, bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan persoalan dengan solusi yang tepat.

Pelatihan pelayanan prima dilaksanakan pada 26 November 2025 di RR KATAM. Diikuti oleh sebanyak 25 orang yang terdiri dari sekurity, office boy, driver, serta tim pelayanan dan pendayagunaan hasil.

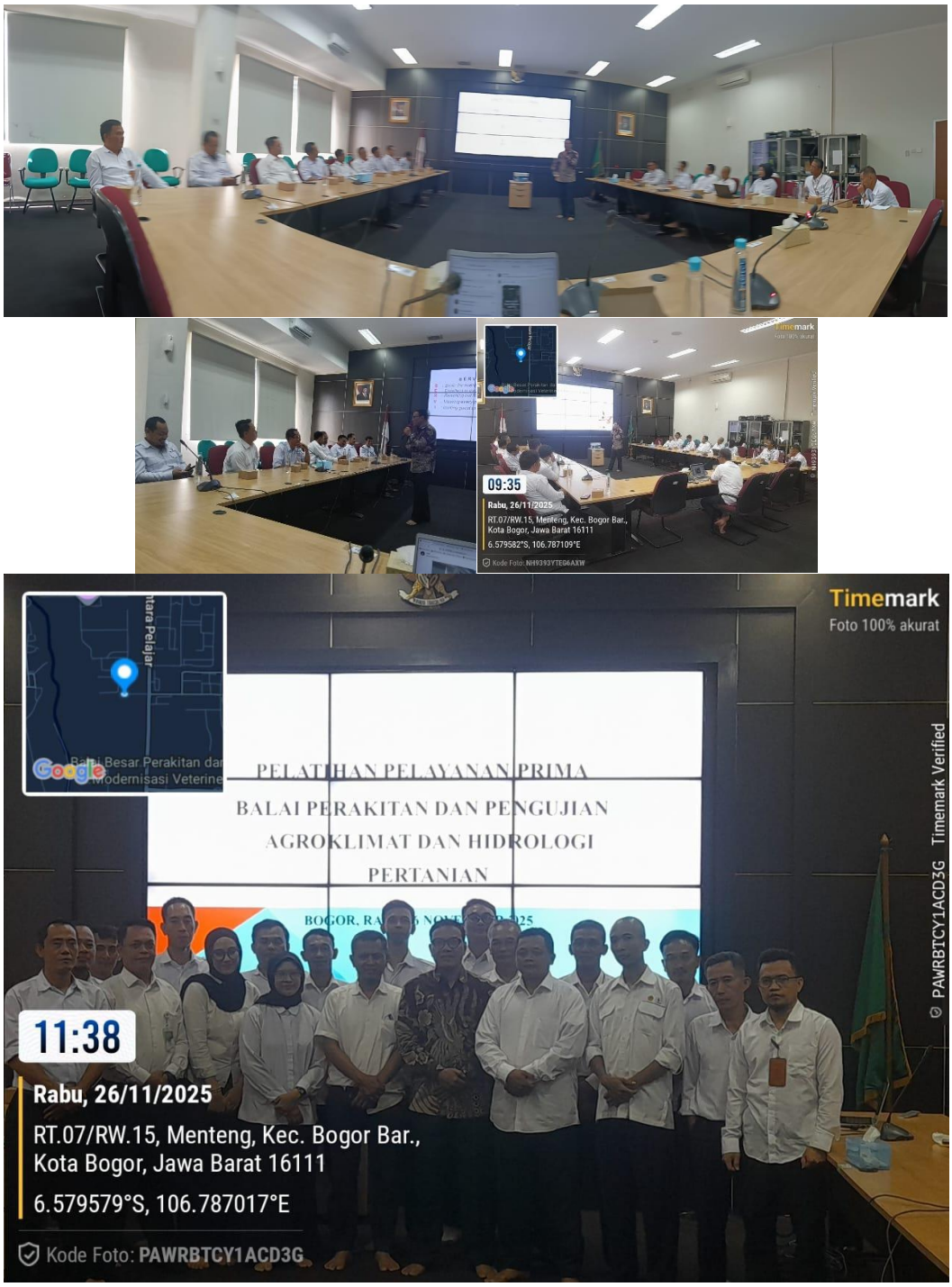

Gambar 60. Pelatihan pelayanan prima

5.2.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). Standar ini dirancang untuk membantu organisasi memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan konsisten, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. ISO 9001:2015 menekankan pendekatan berbasis risiko, perbaikan berkelanjutan, dan kepemimpinan dalam seluruh proses organisasi. Dengan menerapkan ISO 9001:2015, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan pelanggan, serta menciptakan budaya kerja yang fokus pada mutu. Standar ini juga memberikan kerangka kerja yang sistematis

untuk merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, dan meningkatkan proses agar tujuan mutu dapat tercapai secara berkelanjutan.

BRMP Agroklimat melaksanakan surveilan ke-2 sistem ISO 9001: 2015, yang berubah menjadi sertifikasi awal karena adanya perubahan nomenklatur kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP. Surveilan dilaksanakan pada Senin 8 Desember 2025. Hasil surveilan tidak ada temuan major maupun minor, namun ada sebanyak 14 temuan observasi. Hal ini menunjukkan bahwa BRMP Agroklimat terbukti menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 secara baik. Adapun temuan observasi sebagai berikut:

1. Menambahkan isu perubahan iklim / climate change yang relevan pada Isu Internal dan Isu Eksternal (SWOT Analisis) di organisasinya.
2. melengkapi Analisa SWOT/ K2PA dengan memanfaatkan kombinasi strategi S – O, S – T, W – O dan W – T agar semua isu internal maupun eksternal dapat berubah menjadi benefit bagi organisasi.
3. Menambahkan isu perubahan iklim (climate change) pada Identifikasi Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Berkepentingan.
4. Sebaiknya dalam penetapannya dipisahkan antara kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan.
5. Dapat mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan budaya mutu di semua tingkatan dalam organisasi. Dimana pimpinan selalu mendorong perilaku yang mendukung budaya mutu di organisasinya.
6. Dapat menambahkan isu perubahan iklim (climate change) pada mitigasi risiko yang sudah ditetapkan.
7. Disarankan untuk melaksanakan Refresh Training terkait SMM SNI ISO 9001:2015 dan Panduan dalam melaksanakan Audit Internal ISO 19011:2018.
8. Sebaiknya data alat ukur yang ada, ditambahkan kolom pelaksanaan kalibrasi kembali.
9. Disarankan untuk melaksanakan sosialisasi terkait MRI secara berkala (contoh dalam bentuk BIMTEK) agar semua pegawai dapat memahami manajemen risiko dan semua kelompok Jabatan fungsional dapat mengimplementasikan dengan baik.
10. Disarankan untuk mengup-date peraturan perundangan terbaru secara berkala pada daftar dokumen eksternal, seperti : Permentan 38 tahun 2021 Tentang penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian pertanian.
11. Laporan bulanan kegiatan yang ditetapkan disarankan untuk memilik format yang sama, supaya standar Laporan bulanan kegiatan yang ditetapkan standar.
12. Sebaiknya formulir permohonan data atau alat ditinjau kembali, dengan menambahkan tabel pengembalian alat yang terdiri dari kodisi alat yang dipinjam dan peminjamnya.
13. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi telah menetapkan Matrik Usulan Kegiatan Tahun 2025, disarankan untuk selalu didampingi dengan dokumen proposal dan KAK dari para PJ Kegiatan.
14. Sebaiknya dimintakan laporan tertulis hasil kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan tercakup didalam kontrak kerja, contoh : CV Karya Jasa Abadi (Pemeliharaan Genset).

PT. ENHAII MANDIRI 186

ENHAII Mandiri 186

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
PT. ENHAII MANDIRI 186

SERTIFIKAT

Dengan ini menyatakan bahwa

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Jalan Tentara Pelajar No. 1A, Cimanggu, Bogor,
Jawa Barat 16111 – Indonesia

Terbukti bahwa persyaratan sesuai

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

telah dipenuhi untuk ruang lingkup :

Layanan Manajemen dan Administrasi di Balai Perakitan
Dan Pengujian Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian
(EA Code: 36, Nace Code: 84.11)

Nomor Sertifikat : 25120078-SMM

Masa berlaku sertifikat :
Diterbitkan tanggal : 23 Desember 2025
Berakhir tanggal : 22 Desember 2028

Yenie Sintha, SE, MM, Direktur Utama
Ditanda tangani atas nama PT. ENHAII MANDIRI 186
Kantor : D'Esta Square No. 10, Jl. Pakuan No. 02
Bogor, Jawa Barat 16143 - Indonesia

Gambar 61. Dokumentasi pelaksanaan surveilen tahun 2025

5.2.3. Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas (ZI) di Kementerian Pertanian merupakan komitmen kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Melalui pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kementan mendorong seluruh unit kerja untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal, dan inovasi pelayanan.

Pembangunan ZI di lingkungan Kementan tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan integritas sebagai nilai utama, Kementan berupaya menciptakan birokrasi pertanian yang modern, terpercaya, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Hasil penilaian ZI tahun 2025 BRMP Agroklimat memperoleh nilai 84,20 dari target nilai 81,21.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ZI TA 2025

No	Satker	Target Nilai ZI	Capaian ZI	WBK	Ket. Area Tidak Lolos
23	BRMP Mektan	83.00	84.59	Lolos	
24	BRMP Biogen	83.50	92.16	Lolos	
25	BRMP Pascapanen	82.00	93.33	Lolos	
26	BRMP SDLP	83.35	88.63	Lolos	
27	BRMP Tanah dan Pupuk	87.95	89.39	Lolos	
28	BRMP Rawa	83.35	84.72	Lolos	
29	BRMP Agroklimat	81.21	84.20	Lolos	
30	BRMP Lingtan	83.35	88.47	Lolos	
31	BRMP Penerapan	80.00	86.09	Lolos	
32	BRMP Aceh	80.00	83.17	Tidak Lolos	IPAK
33	BRMP Sumut	80.00	92.70	Lolos	

5.2.4. Rumah Tangga

Dalam rangka melaksanakan layanan perkantoran dengan mekanisme yang tertata dan sistematis maka perlu dibangun manajerial pada kegiatankegiatan layanan yang mengacu pada peningkatan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan sarana prasarana, mengurus kantor/gedung serta mengelola perlengkapan Kantor. Tugas keruahtanggan yang diantaranya adalah merencanakan, menyiapkan dan memelihara perlengkapan peralatan kegiatan rumah tangga balai; merencanakan, memelihara, memperbaiki dan pengadaan alat-alat kelengkapan kendaraan dinas balai; menyiapkan layanan transportasi kegiatan balai; melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan kantor; menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, telah terlaksana dengan baik dengan berbagai keterbatasan yang ada.

5.2.4.1. Perawatan Gedung Perkantoran

Beberapa sarana dan prasarana telah dilakukan perbaikan dan perawatan untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Diantaranya

adalah perbaikan lanjutan sarana lobby, perbaikan ruang rapat Campbellstokes, perbaikan papan nama kantor, perbaikan pantry ruang PE.

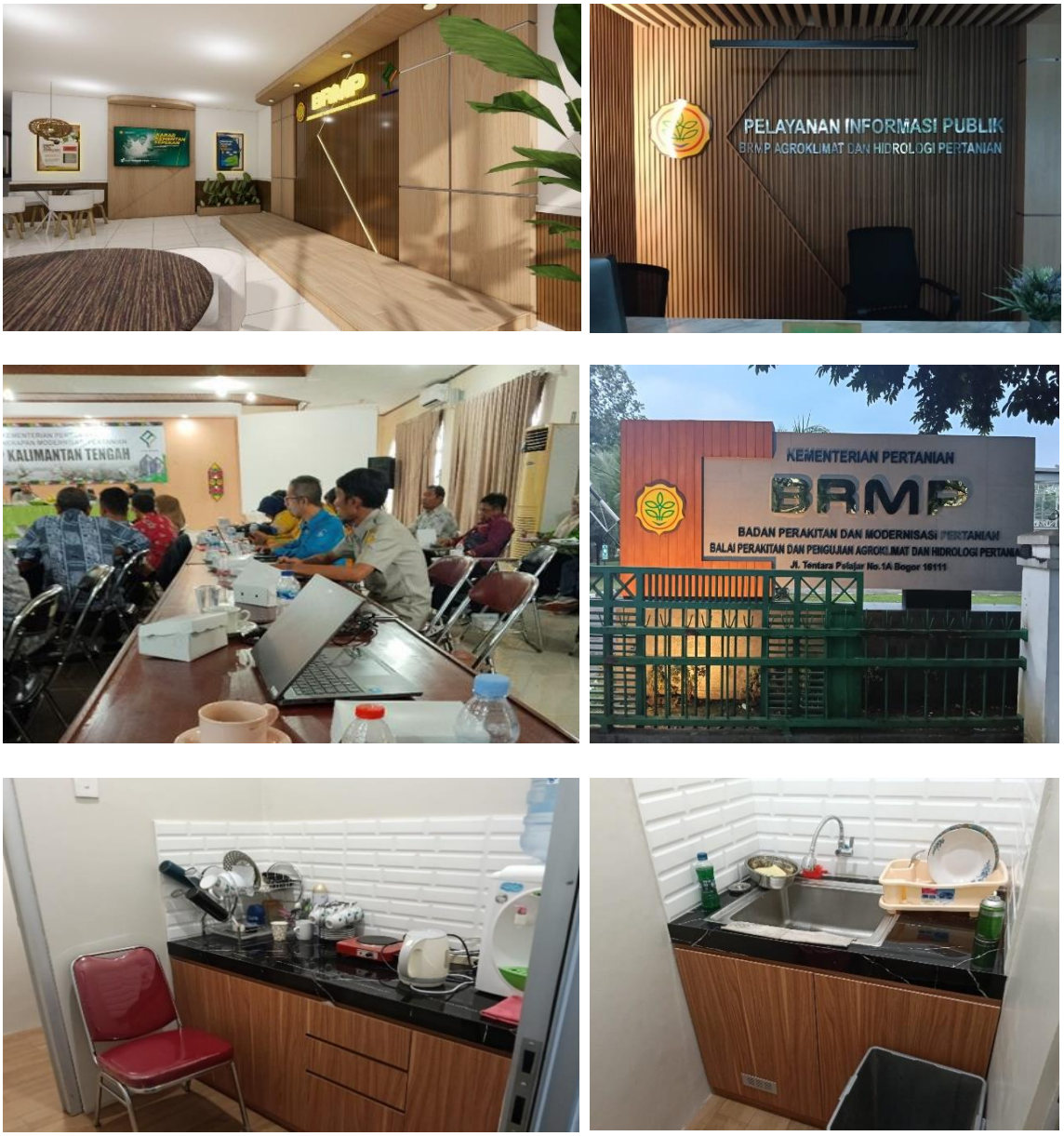

Gambar 62. Hasil renovasi toilet Pria dan pool kendaraan BRMP Agroklimat

Perbaikan lainnya antara lain adalah perluasan gudang BMN, melakukan pengecatan terakota, perbaikan kursi tamu, penggantian karpet ruang rapat campbellstokes, sekretariat, dan mushola, pembuatan taman, pembuatan tempat pengomposan, serta kebun.

Gambar 63. Pemeliharaan gedung perkantoran serta halaman perkantoran

Pemeliharaan Peralatan Perkantoran merupakan salah satu pekerjaan untuk selalu menjaga fasilitas yang berada di BRMP AHP yang merupakan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan maka semua fasilitas harus dipelihara secara intensive dan berkelanjutan. Agar dapat ditempati secara layak maka perlu diadakan pemeliharan.

5.2.4.2. Perawatan Sarana Prasarana Perkantoran

Prasarana dan sarana perkantoran dipelihara secara rutin untuk memberikan pelayanan bagi pegawai secara optimal. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain adalah kendaraan dinas, komputer perkantoran, pemasangan CCTV, perbaikan genset dan semua sarana yang diperlukan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Gambar 64. Perawatan kendaraan dan pemasangan CCTV

5.2.4.3. Pengadaan Seragam Kantor

Seragam bukan hanya sekadar identitas instansi, tetapi juga mencerminkan budaya instansi tersebut. Seragam kerja pegawai memainkan peran penting dalam keberhasilan kinerja balai. Seragam bukan hanya sekadar identitas instansi, tetapi juga mencerminkan budaya instansi dan mempengaruhi citra instansi serta kenyamanan kerja pegawai. Tahun 2025 BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengadakan pakaian seragam PDH Kementan dan seragam PDL.

Gambar 65. Pengadaan seragam tahun 2025

5.2.4.4. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan atau Medical check up (MCU) adalah pemeriksaan tubuh secara menyeluruh yang bertujuan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan dan mengantisipasi adanya penyakit. Prosedur MCU bisa membantu menilai kondisi berbagai organ tubuh. Contohnya dengan mengecek fungsi jantung, pemeriksaan gula darah, tes urine, ginjal, hingga kadar kolesterol. Hasilnya mampu mendeteksi adanya masalah kesehatan untuk melakukan perawatan selanjutnya. BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh pegawai, namun ada beberapa pegawai yang tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan berbagai alasan.

Gambar 66. Pemeriksaan kesehatan pegawai

5.2.5. Survei Kepuasan Layanan Internal BRMP Agroklimat

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Layanan Internal BRMP Agroklimat, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan berada pada kategori sangat baik. Hal ini tercermin dari dominasi penilaian puas dan sangat puas yang mencapai kisaran 80–100% pada hampir seluruh unsur layanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan internal secara umum telah berjalan efektif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan di lingkungan BRMP Agroklimat.

Meskipun demikian, masih terdapat tingkat ketidakpuasan dalam rentang 3–7%, yang mengindikasikan adanya beberapa aspek layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan. Ketidakpuasan tersebut menjadi masukan penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi lebih lanjut, terutama dalam rangka peningkatan kualitas layanan, penyempurnaan prosedur, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa kualitas layanan internal BRMP Agroklimat telah berada pada jalur yang tepat, namun tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar tingkat kepuasan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

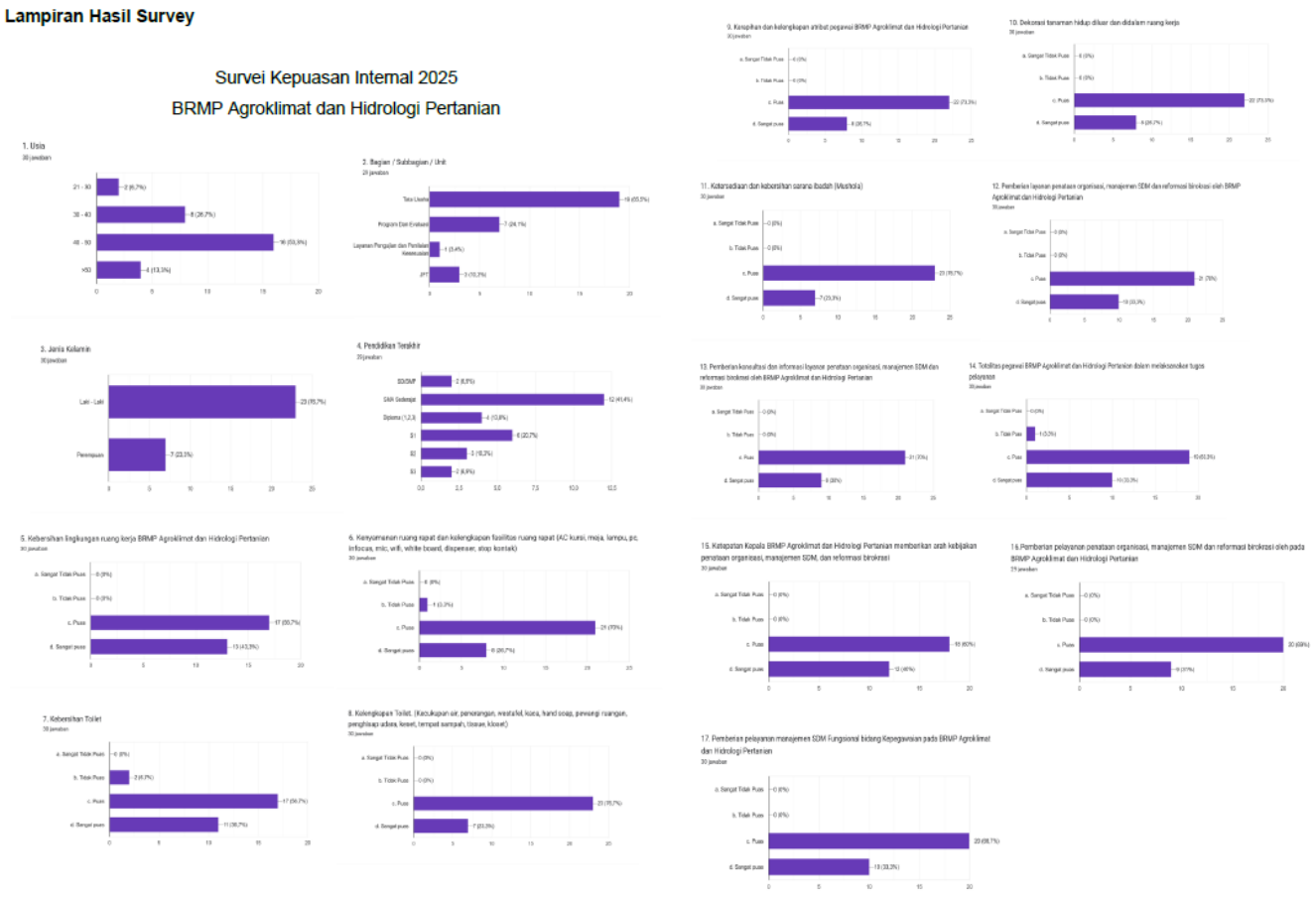

Gambar 67. Survey kepuasan internal

5.3. Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga

Pelaksanakan Penugasan Terkait Tugas Fungsi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan dalam lingkup internal maupun eksternal, meliputi kegiatan koordinatif dengan BRMP Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Teknis/Badan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, PT PLN, serta mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Pembahasan yang dilakukan terkait koordinasi dan sinkronisasi ini diantaranya adalah kelembagaan, hukum, kerjasama, survey investigasi desain, serta isu terkini yaitu perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon.

Tranformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang organisasi dan tata kelola BRMP yang sudah diterbitkan dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup UPT (Unit Pelaksana Teknis). Permentan harus direvisi karena adanya Instruksi Presiden tentang penyuluh pertanian yang dialihkan ke Pusat/Kementerian dan tidak berada di bawah pemerintah daerah lagi.

Adanya revisi ini memberikan kesempatan bagi BRMP untuk mencermati kembali tugas dan fungsi Unit Kerja yang dianggap masih beririsan dengan Ditjen teknis lainnya terutama Ditjen PKH. Sinkronisasi fungsi BRMP dan Ditjen PKH dilakukan beberapa kali dan menghasilkan kesepakatan : Dalam pelaksanaan fungsi produksi Benih dan Bibit Ternak, Produksi Pakan, dan Pengujian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi karena aktivitas produksi benih dan bibit ternak, produksi pakan, dan pengujian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkaitan dengan peningkatan populasi dan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional (daging, telur dan susu), sedangkan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan perekayasaan teknologi produksi bibit ternak unggul sebagai rumpun/galur ternak baru serta pemeliharaan dan perekayasaan teknologi pakan, serta perekayasaan teknologi pengujian sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memproduksi bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak, menghasilkan teknologi pakan ternak serta, menghasilkan teknologi bidang peternakan melalui perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern. BRMP melaksanakan produksi benih sumber tanaman pakan ternak /bibit ternak unggul untuk kepentingan perakitan, perekayasaan, pendayagunaan, dan modernisasi yang selanjutnya diproduksi secara masal oleh Ditjen PKH.

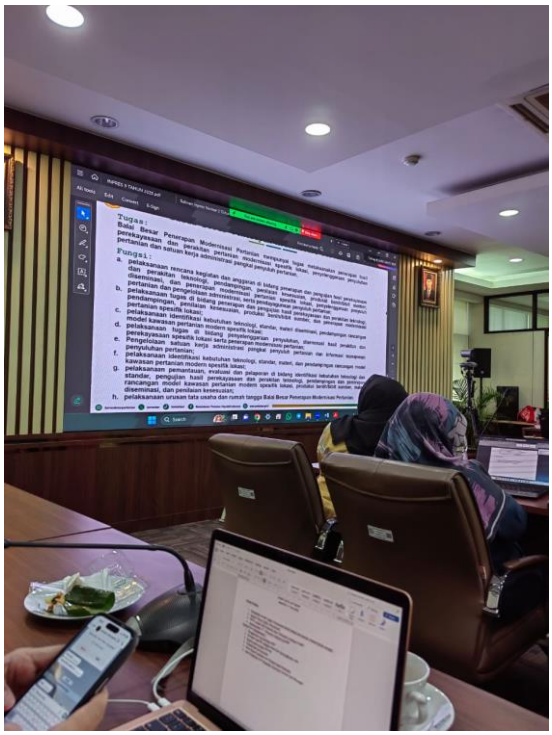

Gambar 68. Pembahasan Revisi Permentan Tentang BRMP

Kerjasama kegiatan

Pada tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melakukan kegiatan kerjasama competitive Grant ICARE melalui Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dengan judul Integrasi Informasi Mendukung Pengambilan Keputusan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi serta Implementasi Smart Irrigation Terstandar dalam Budidaya Kakao Penguatan Nilai untuk Rantai Komoditas Pertanian di Sulawesi Tenggara.

Kerjasama lainnya yang telah berjalan yaitu kerjasama kegiatan Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SPT2E) yang dilakukan bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI). Beberapa point penting dalam kegiatan ini yaitu :

1. Implementasi Pilot Project dilakukan beberapa tahap di 50 titik lokasi dengan total luasan 500 ha, masing-masing titik seluas 10 ha.

2. Tanggal 17 Januari 2025, telah dilaksanakan Kick Off Penanaman Perdana di Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah seluas 10 ha, dengan tanaman energi indigofera dan gamal sejumlah 10.000 batang, serta tanaman jagung seluas 10 ha.
3. Komponen pilot project meliputi :
   a. Tanaman energi : indigofera, kaliandra dan gamal
   b. Tanaman pangan : jagung
   c. Pendampingan Pilot Project
4. Dalam Pilot Project ini, pihak PLN EPI akan memberikan bantuan :
   a. Herbisida 5 liter/ha
   b. Biaya pengolahan lahan Rp. 500.000/ha
   c. Bibit tanaman energi : 1000 batang/ha
   j. Pupuk organik 25 karung
   k. Pembiayaan detaser selama 2 bulan
   l. Bantuan Operasional PPL : Rp. 350.000/bulan
   m. Pembiayaan benih tanaman pangan
5. BRMP melakukan pendampingan Pilot Project oleh tenaga pendamping/detaser selama 2 bulan dan dilanjutkan oleh PPL di lokasi sampai tanaman energi menghasilkan biomassa, serta memberikan bantuan benih tanaman pangan yaitu jagung dan tanaman lainnya yang menjadi preferensi petani di beberapa lokasi.

Gambar 69. Koordinasi Kerjasama BRMP dengan PLN Kegiatan SPT2E

BRMP Agroklimat di bawah koordinasi BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian melaksanakan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) pada tahun 2024 di 6 provinsi dan tahun 2025 di Provinsi Riau. Pelaksanaan SID pada tahun 2024 telah dievaluasi dan masih terdapat kekurangan dari target Kementerian Pertanian. Hal ini karena beberapa wilayah yang telah disurvey ternyata tidak dapat didesain akibat tumpang tindih dan kendala di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi kembali dengan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP). Dari hasil koordinasi tersebut, BRMP tidak perlu menambah desain untuk mencapai target.

Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan di lingkup BRMP melalui Rapat Pimpinan yang diperluas, menghasilkan beberapa point yaitu :

1. Blokir efisiensi dikembalikan, kecuali perjadin.
2. Penggunaan nama BRMP untuk seluruh satker dan satker agar mengganti atribut BSIP menjadi BRMP
3. Kelembagaan baru mengampu 2 tusi besar yaitu perakitan dan pengujian, sehingga kinerjanya harus lebih baik karena ada 2 peran besar

4. Untuk segera ditindaklanjuti terkait : usulan terkait peta jabatan karena komposisi jabatan fungsional harus berubah
5. Target perakitan BRMP berupa produk yang kuantitasnya tidak perlu banyak tetapi unggul
6. Fokus riset dengan Dikti/PTN : sudah bertemu 1x dan akan ada pertemuan 1x lagi lebih detil untuk berbagi peran dan pembiayaan. Dibentuk seperti konsorsium. Tahap awal kapus/kabb agar membuatkan peta jalan/state of the art
7. Balai penerapan tetap melakukan perekayasaan spesifik lokasi
8. Akan dibentuk satker di kaltara dan papua selatan. di papua selatan ditempatkan orang sebelum ada definitif

Sebagai instansi yang memiliki tusi terkait iklim, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian seringkali dilibatkan dalam pertemuan koordinasi maupun kegiatan terkait perubahan iklim, diantaranya dilibatkan dalam penyusunan National Adaptation Plan (NAP), pembahasan National Determined Contribution (NDC), dan revisi Peraturan Presiden Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

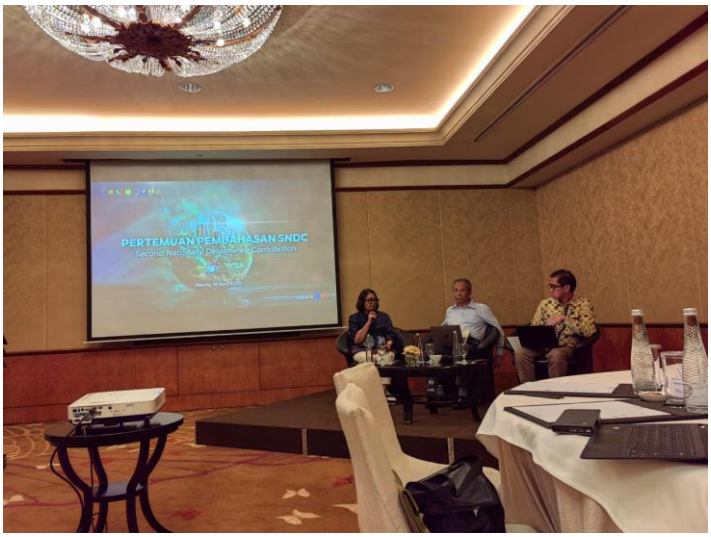

Gambar 70. Pembahasan National Determined Contribution (NDC)

Rencana Adaptasi Nasional Indonesia (National Adaptation Plan Indonesia/NAP Indonesia) adalah sebuah dokumen yang menguraikan strategi dan tindakan yang akan diambil oleh Indonesia untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang sudah dan akan terjadi. NAP Indonesia bertujuan untuk mengurangi kerentanan negara terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan berbagai sektor terhadap dampaknya, seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam perencanaan tindakan adaptasi ini, beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko dan kerentanan:
   NAP mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia, seperti pertanian yang terpengaruh oleh kekeringan atau banjir, serta kesehatan yang terancam oleh penyebaran penyakit akibat perubahan suhu.
2. Menetapkan prioritas adaptasi:
   Berdasarkan identifikasi risiko, NAP menetapkan prioritas adaptasi untuk berbagai sektor dan wilayah di Indonesia, memastikan bahwa tindakan adaptasi difokuskan pada area yang paling membutuhkan.
3. Merumuskan strategi dan tindakan adaptasi:

NAP mencakup serangkaian tindakan adaptasi yang spesifik dan terukur, termasuk pengembangan teknologi, kebijakan, dan praktik terbaik untuk membantu masyarakat dan sektor-sektor ekonomi beradaptasi dengan perubahan iklim.

4. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi:
   NAP mendorong koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan pelaksanaan rencana adaptasi yang efektif.
5. Mengintegrasikan adaptasi ke dalam pembangunan:
   NAP bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektoral, memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

Gambar 71. Penyusunan National Adaptation Plan

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, menjadi dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan nilai ekonomi karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Perpres ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan NEK sebagai upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang telah ditetapkan secara nasional, serta mengendalikan emisi GRK dalam pembangunan nasional. Perpres ini mengatur berbagai aspek terkait NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (baik domestik maupun internasional), penerapan tarif pajak karbon, dan penggunaan dana hasil perdagangan karbon untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perpres ini merupakan landasan hukum penting bagi Indonesia dalam menjalankan kebijakan terkait ekonomi karbon dan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi GRK. Saat ini, pemerintah sedang melakukan revisi terhadap Perpres 98/2021. Beberapa pihak mengusulkan agar revisi ini mencakup pengaturan lebih rinci terkait Voluntary Carbon Market (VCM) atau pasar karbon sukarela, yang memungkinkan transaksi karbon di luar mekanisme yang diatur secara resmi. Kementerian Pertanian menyampaikan usulan revisi Perpres antara lain :

1. Perlu penambahan ruang lingkup sektor pertanian tidak hanya pada persawahan, perkebunan dan peternakan, namun untuk persawahan diganti menjadi tanaman pangan, dan penambahan bidang hortikultura, lahan pertanian serta sarana dan prasarana pertanian untuk adaptasi.

2. Pembentukan Badan Karbon hendaknya tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah dan private sector
3. Registrasi/standardisasi perdagangan komoditas perlu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan petani menengah dan kecil

Gambar 72. Pembahasan PP Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon

Partisipasi dalam Asian-Pasific Regional Workshop on Scaling Climate Solutions in Agrifood Systems: Climate Smart Technologies, Carbon Market Pathways and COP 30 Preparation yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, bertujuan fundamental untuk memperkuat kapasitas teknis, kelembagaan, dan kerangka kebijakan di negara-negara Asia-Pasifik agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pasar karbon internasional. Secara spesifik, workshop ini mengeksplorasi potensi pemanfaatan peluang pembiayaan karbon di bawah Pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris oleh sektor agrifood, yang diakui sebagai sektor prioritas baik untuk upaya mitigasi maupun adaptasi iklim.

Analisis risiko mengidentifikasi tantangan signifikan, meliputi:

1. Risiko Teknis: Kebutuhan implementasi mekanisme Pasal 6 (pasar karbon) di sektor pertanian yang menuntut ketersediaan data emisi yang akurat, sistem Measurement, Reporting, Verification (MRV) yang kredibel, serta integrasi yang koheren dengan kebijakan nasional.
2. Risiko Kebijakan: Perkembangan regulasi nasional terkait perdagangan karbon dan insentif bagi praktik pertanian rendah emisi masih berada pada tahap yang evolusioner.
3. Risiko Pembiayaan: Proyek pertanian rendah emisi seringkali memerlukan investasi awal yang substansial, sebuah hambatan bagi petani skala kecil dengan keterbatasan modal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan dampak, tindak lanjut dan rekomendasi berfokus pada:

1. **Kesiapan Pasal 6**: Inventarisasi mendalam terhadap aktivitas sektor pertanian yang potensial untuk penerapan mekanisme pasar karbon dan penyusunan peta jalan (roadmap) kesiapan Indonesia dalam mencapai Pasal 6 Perjanjian Paris.
2. **Penguatan Kapasitas**: Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan melalui pelibatan stakeholder untuk konvergensi sistem agrifood dan isu perubahan iklim.
3. **Data dan Regulasi**: Peningkatan sistem data spasial, MRV, dan registri nasional di sektor pertanian , serta peninjauan dan, jika perlu, revisi regulasi nasional terkait perdagangan karbon dan dukungan finansial bagi petani.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berdampak positif dalam memperkuat pemahaman Indonesia terkait roadmap kesiapan Pasal 6, membuka ruang untuk berbagi praktik baik dan posisi kebijakan di forum Asia-Pasifik, serta memperkuat peran Indonesia sebagai representatif ASEAN menuju COP30. Kolaborasi antar stakeholder dan kerja sama internasional diusulkan sebagai kunci untuk transfer teknologi dan peningkatan implementasi pasar karbon di Indonesia.

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga turut ikut serta pada Kegiatan Hands-on Workshop on Co-development of Functions for an Integrated National Agrometeorological Services System for the Agriculture Sector in Indonesia. Workshop ini bertujuan utama untuk menginisiasi serta memperkuat pengembangan bersama (co-development) fungsi-fungsi esensial bagi Sistem Layanan Agrometeorologi Nasional Terintegrasi. Fokus strategis dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa layanan yang dikembangkan relevan, mudah diakses, dan aplikatif dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta risiko bencana terkait cuaca.

Forum ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, BMKG, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta Asian Development Bank (ADB) . Dalam sesi diskusi, dilakukan identifikasi mendalam mengenai jenis informasi dan layanan agrometeorologi yang paling dibutuhkan oleh petani serta pengambil kebijakan di lapangan. Hasilnya, disepakati fungsi-fungsi inti yang harus dimiliki oleh sistem terintegrasi tersebut, yang mencakup pengumpulan data, pemodelan, diseminasi informasi, hingga mekanisme umpan balik.

Pembahasan teknis mengerucut pada pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile, web platform, dan AI/Machine Learning guna meningkatkan akurasi serta kecepatan peringatan dini. Berdasarkan identifikasi sistem eksisting, terdapat tiga aplikasi yang dinilai memiliki kesesuaian tinggi dengan Layanan Agrometeorologi, yaitu IDMAI (Bappenas) yang berbasis penginderaan jauh untuk kondisi faktual padi; SIAPTANAM (BRMP Kementan) yang menyediakan rekomendasi tanam berdasarkan prediksi iklim BMKG; serta EWS Sipantara (Dirjen Hortikultura) sebagai sistem peringatan dini banjir dan kekeringan.

Gambar 73. Kegiatan Hands-on Workshop on Co-development of Functions for an Integrated National Agrometeorological Services System for the Agriculture Sector in Indonesia

Dalam rangka mendukung kegiatan KUR, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga turut serta pada kegiatan Lokakarya Inovasi Pembiayaan Hijau: Skema Green KUR untuk Pertanian Cerdas Iklim Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) bekerja sama dengan

Asian Development Bank (ADB). Latar belakang utama kegiatan ini adalah meningkatnya risiko iklim yang mengancam ketahanan pangan nasional, di mana proyeksi penurunan produksi padi mencapai 10-25% dan potensi kerugian PDB antara 0,66% hingga 3,45%. Meskipun investasi pada Climate Smart Agriculture (CSA) menjadi prioritas, saat ini ketersediaan pembiayaan finansial untuk sektor tersebut masih sangat terbatas.

Sebagai solusi untuk menghubungkan kesenjangan pembiayaan bagi petani kecil dan rentan, forum ini mengusulkan skema Green KUR. Fitur utama dari skema ini mencakup produk keuangan yang responsif terhadap iklim, penetapan harga yang efektif melalui subsidi bunga dan jaminan, serta integrasi dengan dukungan penyuluhan dari Kementerian Pertanian. Skema ini menawarkan keunggulan kompetitif berupa suku bunga rendah sebesar 3% dan diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan petani secara drastis hingga rentang 58,56% - 522,11%. Selain manfaat finansial, penerapan teknologi CSA yang didukung skema ini (seperti varietas adaptif dan hemat air) terbukti menurunkan emisi Gas Rumah Kaca rata-rata sebesar 35% dan menghemat air irigasi hingga 21%. Sebagai instansi yang bergerak di bidang air untuk pertanian, sudah seharusnya BRMP Agroklimat turut serta dalam segala kegiatan yang mendukung penghematan air irigasi pertanian tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan adalah menyusun Pre-Feasibility Assessment (Studi Pra-Studi Kelayakan) serta segera membentuk Tim Kerja Lintas Pemangku Kepentingan yang melibatkan Kementerian Pertanian, OJK, Kementerian Keuangan, dan Bappenas untuk merumuskan regulasi teknis. Agenda prioritas tim ini meliputi perancangan detail skema subsidi, pendefinisian paket teknologi CSA yang eligible untuk dibiayai, serta pengembangan program peningkatan kapasitas bagi lembaga keuangan dan penyuluh pertanian.

Gambar 74. Lokakarya Inovasi Pembiayaan Hijau untuk Pertanian Cerdas Iklim

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga turut serta pada diskusi yang dilaksanakan antara Kementerian Pertanian dan BMKG menyoroti urgensi penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai solusi strategis mengatasi kelangkaan air pertanian. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kebutuhan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 menjadi 2, yang terkendala oleh kurangnya ketersediaan air. Meskipun intervensi menggunakan pompa telah dilakukan, kendala teknis muncul akibat minimnya sumber air yang dapat dipompa, sehingga OMC diperlukan untuk mengisi waduk atau reservoir sebagai sumber air irigasi utama. Strategi ini berkaca pada keberhasilan Thailand yang menempatkan operasi hujan buatan secara khusus di bawah sektor pertanian.

Secara historis dan teknis, OMC telah terbukti efektif dalam mendukung ketahanan pangan melalui kemitraan dengan Kementerian PUPR, khususnya untuk pengisian waduk di daerah tangkapan air (DTA) strategis seperti Waduk Kaskade Citarum. Pada tahun 2024, pelaksanaan OMC di tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) mencatatkan tingkat keberhasilan 79% dalam mendatangkan hujan di waduk target meskipun kondisi cenderung kering. Bahkan, operasi selama lima hari terbukti mampu mengisi penuh waduk di kawasan IKN. Hal ini menegaskan bahwa OMC memiliki potensi besar jika diarahkan secara spesifik untuk memitigasi risiko kekeringan pada lahan pertanian beririgasi teknis.

Keberhasilan operasional OMC sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam mengenai pola iklim wilayah target. Waktu pelaksanaan menjadi faktor krusial; operasi tidak efektif jika dilakukan saat puncak musim kemarau karena minimnya potensi awan, sehingga penjadwalan harus dilakukan secara presisi sebelum periode tersebut. Diperlukan review mendalam untuk menentukan kebutuhan material dan armada pesawat, baik yang bersumber dari TNI maupun swasta, guna memastikan operasi berjalan optimal tanpa terhambat masalah administratif.

Sebagai tindak lanjut strategis, fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas di Pulau Jawa dengan target pencapaian IP 3, mengingat wilayah ini memiliki produktivitas lahan tertinggi. Untuk menjustifikasi pelaksanaan program ini, diperlukan kajian Benefit Cost Ratio yang akan disusun oleh tim dari IPB guna menghitung efektivitas biaya OMC terhadap peningkatan tonase produksi beras. Estimasi awal menunjukkan bahwa dengan luas baku sawah di Jawa yang mencapai hampir 3 juta hektar, intervensi yang tepat untuk menaikkan IP dapat memberikan dampak signifikan terhadap produksi Gabah Kering Panen (GKP) nasional. Pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan BMKG dan Menteri Pertanian direncanakan untuk mematangkan kolaborasi ini.

Gambar 75. Diskusi antara BMKG dan Kementerian Pertanian terkait Operasi Modifikasi Cuaca

Kegiatan Workshop on Ecosystem-based Adaptation (EbA) diselenggarakan bertujuan untuk merumuskan integrasi pendekatan EbA ke dalam penyusunan National Adaptation Plan (NAP) Indonesia. Secara konseptual, EbA merupakan bagian dari Nature-based Solutions (NbS) yang berakar pada pendekatan ekosistem untuk fokus pada adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan jasa ekosistem (ecosystem services). Meskipun terminologi ini relatif baru, praktik EbA sejatinya telah lama diterapkan di Indonesia melalui kearifan lokal masyarakat, seperti upaya perbaikan mangrove yang memberikan dampak positif lintas sektor. Dalam proses penyusunan NAP, tim berupaya melakukan pengarusutamaan instrumen yang sudah ada, seperti Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dan penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) guna

menentukan baseline yang tepat. BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian turut serta dalam perumusan integrasi EbA dalam penyusunan NAP Indonesia tersebut.

Penyusunan NAP dengan integrasi EbA juga diposisikan sebagai strategi vital untuk meminimalisasi kerugian dan kerusakan (Loss and Damage) akibat dampak perubahan iklim yang melampaui batas adaptasi komunitas maupun ekosistem. Dokumen NAP diharapkan mampu merespons kejadian iklim ekstrem maupun kejadian beronset lambat (slow onset events), serta mencakup aspek rehabilitasi dan rekonstruksi. Tantangan utama dalam implementasi EbA adalah karakteristiknya yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan serta sifat alam yang terkadang tidak terduga, sehingga pelaksanaannya perlu berjalan beriringan dengan upaya mitigasi iklim.

Aspek krusial yang dibahas secara mendalam adalah mekanisme pembiayaan berkelanjutan yang bersifat jangka panjang. Forum mendiskusikan berbagai model pendanaan internasional, seperti People's Survival Fund (PSF) di Filipina yang mengalokasikan anggaran publik untuk manajemen air dan asuransi pertanian, serta Ecological-fiscal transfer (EFT) di Portugal yang memberikan insentif bagi daerah dengan biodiversitas tinggi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang relevan mencakup Transfer Anggaran ke Provinsi Berbasis Ekosistem (TAPE), Green Sukuk, dan fasilitasi pajak, di mana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dinilai sebagai opsi teroptimal untuk sumber anggaran proyek. Selain itu, skema Debt for Nature Swaps juga menjadi peluang pendanaan yang telah dipraktikkan Indonesia dengan negara mitra seperti Jerman dan Amerika Serikat.

Untuk memastikan keberlanjutan program, aspek Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) ditekankan tidak hanya sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sarana pembelajaran dari kesalahan (learning from mistakes). Praktik baik (good practices) dalam MEL untuk NAP meliputi penerapan penilaian risiko iklim di tingkat ekosistem, integrasi pertimbangan ekosistem di seluruh sektor, serta pelibatan pemerintah daerah secara inklusif. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma global di mana pemantauan tren dan evaluasi pada titik strategis menjadi kunci untuk membangun bukti (building evidence) keberhasilan adaptasi iklim.

Gambar 76. Workshop Perumusan Integrasi EbA dalam Penyusunan NAP Indonesia

BRMP Agroklimat juga turut serta pada kegiatan Bimtek Pengelolaan Gratifikasi yang merupakan salah satu agenda krusial dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tema yang diusung adalah "Satukan Aksi, Basmi Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan, Berintegrasi untuk Negeri," acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan nilai-nilai integritas dengan target strategis kementerian dalam mencapai kedaulatan pangan.

Penyampaian materi dilakukan secara komprehensif oleh narasumber dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Dalam kegiatan bimtek ini ditekankan bahwa pengendalian gratifikasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mencegah tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik yang memiliki interaksi tinggi dengan masyarakat dan pelaku usaha pertanian. Penekanan utama diberikan pada aspek perlindungan diri, di mana pelaporan gratifikasi yang benar merupakan mekanisme legal yang melindungi pegawai dari potensi delik penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di masa depan.

Dalam sesi teknis, pada kegiatan ini diberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu secara langsung ke loket resmi KPK atau melalui kanal internal Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada masing-masing unit kerja. Penjelasan ini diperkuat dengan pembahasan berbagai contoh kasus nyata guna memberikan batasan yang jelas mengenai kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, bentuk gratifikasi yang masuk dalam pengecualian, hingga batasan nilai yang masih diperbolehkan dalam konteks kedinasan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi keraguan bagi pegawai dalam mengambil sikap saat menghadapi pemberian dari pihak ketiga.

Berbagai isu praktis di lapangan menjadi topik bahasan utama, mulai dari etika penerimaan hadiah saat kunjungan kerja, tata cara penanganan pemberian dari mitra kerja, hingga pengelolaan gratifikasi dalam penyelenggaraan event atau kegiatan pemerintah. Penjelasan teknis yang diberikan oleh narasumber KPK diharapkan mampu memberikan standar operasional yang seragam bagi seluruh insan pertanian dalam menghadapi situasi-situasi sensitif tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 77. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Gratifikasi

BRMP Agroklimat juga turut serta di kegiatan pertemuan strategis yang mengusung agenda utama peluncuran Innovation Technology Fund (ITF) serta pemantapan kolaborasi untuk solusi berketahanan iklim yang diselenggarakan oleh Bappenas. Acara ini bertujuan memperkuat analisis dan mekanisme penyaluran pendanaan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions 2060. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan aksi nyata rendah karbon ke dalam perencanaan nasional, melanjutkan keberhasilan fase pertama kerja sama Indonesia-Inggris.

Pada acara tersebut Duta Besar Jerman dan Britania Raya, bersama perwakilan UNDP, menekankan bahwa kolaborasi internasional merupakan kunci karena tidak ada negara yang mampu menghadapi krisis iklim sendirian. Jerman berkomitmen mendukung melalui pilar penguatan iklim dan kemajuan teknologi, sementara UNDP menyoroti urgensi sistem peringatan dini dan pembiayaan cerdas bagi komunitas terdampak. Britania Raya juga melihat investasi pada teknologi rendah karbon sebagai peluang besar untuk kemajuan ekonomi sekaligus mendukung swasembada pangan Indonesia.

Dari sisi pemerintah Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan implementasi Ekonomi Biru melalui lima program utama, termasuk perluasan kawasan konservasi laut dan pembersihan sampah plastik oleh nelayan. Program-program ini juga mencakup pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif Modern Fishermen Village. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa adaptasi iklim adalah keniscayaan bagi negara tropis demi menghadapi kenaikan suhu global.

Salah satu inti kegiatan ini adalah peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) yang dikelola oleh BPDLH untuk memobilisasi pembiayaan iklim domestik dan internasional. ITF dirancang untuk mengurangi risiko investasi rendah karbon serta menghubungkan komitmen global dengan aksi nyata di tingkat daerah. Mengingat kebutuhan investasi yang mencapai USD 472,6 Miliar hingga tahun 2035, peran ITF sangat krusial dalam memobilisasi dana dari sektor publik maupun swasta untuk skala yang lebih besar.

Dalam sesi dialog nasional, terdapat satu arahan penting mengenai perlunya investasi perlindungan guna mencegah dampak buruk perubahan iklim yang lebih besar. Dalam sesi dialog tersebut disampaikan juga adanya "cost of ignorance" atau biaya tinggi akibat ketidaktahuan jika adaptasi tidak segera dilakukan secara serius. Selain itu, ditekankan pula pentingnya dasar saintifik yang kuat dalam memetakan risiko iklim di berbagai sektor seperti pangan, air, dan kesehatan.

Para narasumber juga menyoroti masalah koordinasi yang masih sering dilakukan secara terpisah-pisah oleh berbagai lembaga atau "working in silo". Oleh karena itu, diusulkan sebuah forum bersama untuk menyatukan isu perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan target SDGs dalam konsep sustainable resilience. Indonesia pun aktif mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan ini di berbagai platform global seperti G20 dan ASEAN Leaders Declaration.

Sebagai tindak lanjut, dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang telah diperbarui akan dijadikan panduan operasional dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD. Implementasi ke depan harus tetap mengedepankan aspek inklusivitas dengan berpihak pada kelompok marginal yang paling terdampak oleh krisis iklim. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan kesadaran bahwa sinergi antara pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat adalah modal utama dalam mewujudkan ekosistem yang tangguh menghadapi bencana.

Gambar 78. Kegiatan Pertemuan Strategis Peluncuran Innovation Technology Fund (ITF)

BRMP Agroklimat juga mengikuti Kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Pengadaan, Kementerian Pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk

menyelaraskan perencanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Pertanian guna mendukung program swasembada pangan nasional. Fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa setiap proses pengadaan telah terencana dengan matang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pada kegiatan ini ditekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Perencanaan yang sinkron dianggap sebagai fondasi utama untuk menghindari kendala teknis maupun administratif di tengah tahun anggaran. Harapan dari kegiatan ini seluruh unit kerja dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pengadaan yang berpotensi menghambat kelancaran program kerja kementerian.

Salah satu materi krusial yang disampaikan dalam lokakarya ini adalah mitigasi risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian diberikan pemahaman mengenai titik-titik rawan yang sering menjadi objek pemeriksaan hukum, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Penjelasan ini bertujuan agar setiap pejabat pengadaan memiliki kewaspadaan tinggi dan mampu menjalankan tugasnya secara transparan demi mencegah praktik-praktik yang melanggar aturan.

Selain aspek hukum, sesi teknis juga mencakup pembahasan mengenai strategi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan pemerintah. Kebijakan ini merupakan arahan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan memastikan bahwa belanja pemerintah memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Unit kerja di seluruh Kementerian Pertanian didorong untuk lebih proaktif dalam memilih penyedia lokal yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan instansi.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pemanfaatan teknologi informasi melalui platform katalog elektronik (e-katalog) untuk mempercepat proses pengadaan. Transformasi digital dalam PBJP dinilai mampu memotong birokrasi yang panjang serta memberikan transparansi harga yang lebih baik. Dengan sistem elektronik, pemantauan terhadap realisasi pengadaan dapat dilakukan secara real-time, sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada kegiatan ini disusun pula draf awal rencana pengadaan tahun 2026 yang telah disinkronkan antar unit kerja. Hasil dari lokakarya ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih dan efisien.

Gambar 79. Kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggaran 2026

Penyebarluasan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Kegiatan penyebarluasan inovasi teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian dilaksanakan di KP Muara. BRMP Agroklimat berkesempatan melaksanakan survey sekaligus mendampingi dalam pengembangan infrastruktur air, yang menerapkan teknologi pengelolaan air yaitu irigasi perpompaan. Kegiatan meliputi survey dan identifikasi, telah hasil analisis rancangan pembangunan irigasi perpompaan serta pendampingan instalasi.

Adapun hasil survey adalah sebagai berikut:

1. Telah dihasilkan peta desain jaringan irigasi sesuai dengan hasil survey di lapangan sebagai berikut:

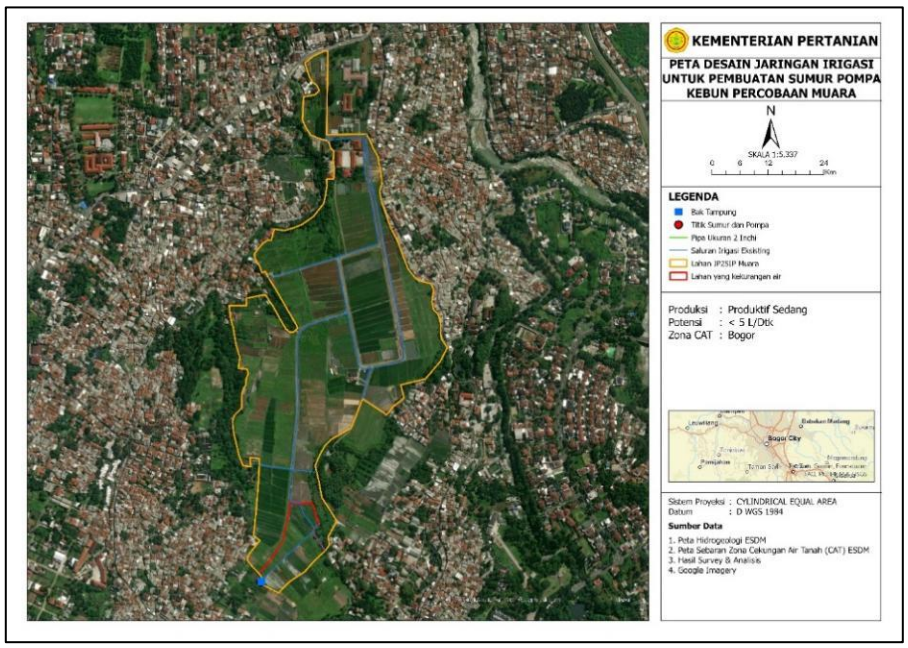

Gambar 80. Peta Desain Rencana Jaringan Irigasi di KP Muara

Gambar 81. Dokumentasi Perencanaan Jaringan Irigasi di KP Muara

2. Dari hasil survey lapangan, didapatkan 2 skenario infrastruktur untuk pompa sumur. Skenario pertama adalah air dari sumur dipompa, lalu dikumpulkan terlebih dahulu ke bak penampung, setelah itu baru dialirkan melalui saluran-saluran irigasi eksisting yang sudah ada. Skenario ke 2 yaitu air dari sumur langsung dipompa menuju saluran irigasi eksisting untuk kemudian dialirkan ke lahan-lahan. Kedua skenario tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut:

No	Nama Skenario	Kelebihan	Kekurangan
1	Skenario 1 (Sumur + Pompa + Bak Tampung)	- Kerja pompa tidak terlalu diforsir karena air bisa ditampung terlebih dahulu - Biaya listrik setelah pompa bekerja lebih murah - Ketersediaan air cadangan lebih besar	- Biaya pembangunan cenderung lebih mahal - Ruang yang terpakai untuk infrastruktur lebih banyak - Terdapata resiko kontaminasi air akan tetapi kecil peluang nya karena air selalu

No	Nama Skenario	Kelebihan	Kekurangan
		ketika kerja pompa terjadi gangguan	dialirkan.
2	Skenario 2 (Sumur + Pompa)	- Biaya pembangunan cenderung lebih murah - Penghematan ruang - Minim resiko kontaminasi air	- Kerja pompa terlalu diforsir karena pompa akan terus bekerja sampai semua lahan terairi - Biaya listrik setelah pompa bekerja lebih mahal - Ketika kinerja pompa terganggu, maka petani tidak dapat mengairi lahan

3. Dalam proses penentuan titik pengeboran selayaknya harus dilakukan pengukuran geolistrik untuk mengetahui kedalaman air di elevasi berapa sehingga menentukan kedalaman sumur. Karena keterbatasan alat, maka dilakukan pendekatan memakai data sekunder yaitu data hidrogeologi dan cekungan air tanah (CAT) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
4. Data hidrogeologi menunjukan bahwa lokasi IP2SIP Muara khususnya pada titik sumur berada pada daerah dengan hidrogeologi produktif sedang dengan penyebaran luas akan tetapi potensi debit nya kurang dari 5 liter/detik. Sedangkan untuk daerah CAT berada pada zona CAT Bogor dengan volume debit 1.019 juta m^3 dan luasan mencapai 1311 Km^2.
5. Dari data sekunder tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan sumur dangkal (kurang dari 60 m) maupun sumur dalam (lebih dari 60 m) di lahan IP2SIP Muara sangat layak untuk dibangun.
6. Hasil tersebut didukung dengan wawancara petani bahwa warga sekitar apabila menggali sumur, air sudah terlihat di kedalaman sekitar 2 m.
7. Posisi sumur, pompa dan bak tampung tersebut berada pada elevasi paling tinggi di lahan IP2SIP Muara dan sudah terdapat saluran irigasi eksisting di titik tersebut sehingga air dapat mengalir secara gravitasi ke lahan tanpa bantuan pompa pendukung untuk menaikan air.
8. Saluran irigasi di IP2SIP Muara pun terlihat dalam kondisi bagus. Saluran-saluran tidak terjadi pendangkalan akibat sedimen dan seluruh saluran sudah dibangun *lining* beton sehingga meminimalisir terjadi kehilangan air karena kebocoran pada saluran. Seluruh saluran juga terkoneksi satu sama lain sehingga tidak ada air yang lgsg terbuang tanpa mengalir ke lahan terlebih dahulu.

Identifikasi air tanah dalam dilaksanakan yang dilaksanakan di Kp Muara BB Padi Kota Bogor terdiri dari dua lokasi rekomendasi pengukuran yaitu pada koordinat 106.789496 BT -6.624229 S dan 106.789558 BT -6.624111 S, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara geologi, geofisika, maupun hidrogeologi. Daerah penelitian didominasi oleh endapan vulkanik muda berupa tufa, lahar, breksi, dan lava andesit hingga basal. Sistem akuifer di lokasi ini memiliki produktivitas sedang dengan aliran air melalui ruang antar butir batuan. Sistem akuifer di lokasi penelitian memiliki produktivitas sedang. Direkomendasikan pengeboran sumur dalam di sekitar titik GL.1 dan GL.2 dengan kedalaman ±120–160 meter. Disarankan melakukan penyelidikan Well Logging setelah pengeboran untuk menentukan posisi optimal penyaringan air.

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga melakukan penyebarluasan pada kegiatan *APEC ATCWG Workshop on Digital Agricultural Technologies for Climate Change Adaptation and Enhancement of Food Productivity* yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan. Forum ini dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, dan perwakilan industri dari negara-negara anggota APEC.

Pembahasan dalam forum menyoroti keselarasan antara inovasi SIAP TANAM dengan prioritas strategis APEC tahun 2025, yaitu *"Building a Sustainable Tomorrow"*, khususnya dalam sub-tema adaptasi perubahan iklim. Delegasi negara lain memberikan atensi pada kemampuan sistem ini dalam memberikan rekomendasi waktu tanam yang presisi di tengah anomali cuaca ekstrem. SIAP TANAM dinilai sebagai implementasi nyata dari konsep "pertanian cerdas iklim" (*climate-smart agriculture*) yang mampu menerjemahkan data kompleks menjadi panduan operasional bagi petani.

Sesuai dengan salah satu sesi utama workshop yang membahas *"Challenges and limitations associated with digital agriculture"*, diskusi berkembang ke arah tantangan implementasi di lapangan.

- Akurasi dan Integrasi Data: Forum mendiskusikan pentingnya integrasi data lintas sektor. Pendekatan Indonesia yang menggabungkan data prediksi iklim dengan data infrastruktur air dan varietas tanaman dianggap sebagai praktik terbaik (*best practice*) dalam memitigasi risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir.
- Kesenjangan Digital: Isu mengenai bagaimana teknologi ini dapat diakses oleh petani kecil (*smallholder farmers*) juga menjadi sorotan. Rekomendasi umum dari forum APEC menekankan perlunya pelibatan tenaga kerja muda dan pusat inovasi pertanian (*agri-tech centres*) untuk mempercepat adopsi teknologi semacam ini di tingkat tapak.

Secara keseluruhan, forum menyimpulkan bahwa transformasi digital, seperti yang ditunjukkan melalui SIAP TANAM, adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga memperkuat kapasitas negara anggota dalam menghadapi krisis iklim global.

Gambar 82. Penyebarluasan Teknologi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada Kegiatan APEC 2025 di Korea Selatan

5.4. Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran

Pemantapan dan Evaluasi Proposal RKTM TA 2025

Untuk memantapkan/mempertajam proposal Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun anggaran 2025, maka pada tanggal 5 Maret 2025 dilakukan evaluasi proposal yang dihadiri seluruh penanggungjawab kegiatan, dan semua pegawai serta pejabat struktural. Perlu penyesuaian proposal sesuai dengan catatan hasil evaluasi proposal. Selain itu juga dilakukan pemantapan metodologi guna mengarahkan pencapaian tujuan dan keluaran yang diharapkan.

1) Acara Monev ini dilaksanakan tanggal 5 Maret 2025 secara offline yang dihadiri 36 orang staf BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian termasuk para pejabat struktural, yaitu Kepala Balai, Kepala Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi, serta Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil. Pembahasan dilakukan untuk 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
2) Masukan umum untuk semua penanggung jawab kegiatan adalah agar format laporan agar diseragamkan dan dilengkapi sesuai arahan KemenPAN-RB.
3) Poin-poin penting terkait hasil rumusan diuraikan sebagai berikut:
   a) Kegiatan Teknis:
      (1) Perumusan Usulan PNPS Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
         - Pelaporan proposal untuk kegiatan PNPS 2025 sudah baik dan sesuai format
         - Perlu diputuskan tindak lanjut terkait kegiatan PNPS karena di TA 2025 untuk sementara ini tidak ada anggaran untuk kegiatan teknis
         - Hasil-hasil FGD dalam proses perumusan standar perlu dikelola sebagai informasi dan dapat ditambahkan pada bank data balai yang dapat berguna untuk brainstorming kegiatan, contohnya topik modernisasi pertanian banyak didiskusikan untuk penyusunan kebijakan.
         - Ke depannya, PNPS yang mendukung kebijakan perlu diprioritaskan untuk diajukan.
      (2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
         - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan TA 2025 sudah baik
         - TA 2025 tidak ada anggaran untuk kegiatan RSNI
   b) Kegiatan Dukungan Manajemen:
      (1) Pelayanan Humas dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID)
         - Layout website balai perlu disusun lebih baik terutama untuk menonjolkan link ke SIAP TANAM sebagai produk unggulan, karena beberapa kali user kesulitan menemukan link tersebut walaupun sudah ada di website yang mana template-nya sudah dikunci BRMP
         - Perlu ditilik kesempatan untuk upaya pengelolaan pengetahuan (knowledge management), terutama karena adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak adanya produksi cetak Info Agroklimat di 2025, dan adanya SDM balai, termasuk mahasiswa magang yang memiliki skill untuk pengelolaan tersebut
      (2) Pengelolaan, Operasional, dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet
         - Perlu penyusunan prioritas anggaran terutama karena banyaknya peralatan yang sudah rusak
         - Perlu optimasi kegiatan screen house termasuk operasi dan pemeliharaannya, contohnya dibutuhkan metode-metode preventif untuk pengendalian hama sehingga dapat menjaga provitas
         - Perlu perencanaan lebih baik terkait operasional dan updating database iklim dan hidrologi, salah satu opsi adalah untuk pengelolaan data online (bahkan real time) seperti yang telah dilakukan kewenangan DAS Bengawan Solo yang sudah memiliki data debit harian online
      (3) Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Anggaran
         - Adanya MRI/manajemen risiko perlu dijadikan acuan dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan balai, contohnya dalam kegiatan screenhouse sehingga dapat dimanfaatkan optimal

- Perlu adanya strategi untuk menyiasati blokir anggaran dimana saat buka blokir diumumkan, maka langkah tepat guna dapat diambil untuk menentukan prioritas kegiatan untuk peningkatan capaian keuangan

(4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko Indeks
- Adanya MRI/manajemen risiko perlu dijadikan acuan dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan balai, contohnya dalam kegiatan screenhouse sehingga dapat dimanfaatkan optimal
- Perlu adanya strategi untuk menyiasati blokir anggaran dimana saat buka blokir diumumkan, maka langkah tepat guna dapat diambil untuk menentukan prioritas kegiatan untuk peningkatan capaian keuangan

(5) Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu
- CPNS yang baru pada saat bergabung dengan balai sudah menempati jabatan-jabatan sesuai dengan formasi pada saat melamar

(6) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
- Kordinasi dengan semua penanggungjawab kegiatan
- Rekap manajemen aset

(7) Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga
- Perlu dilakukan penyusunan laporan khusus terkait sinkronisasi dengan harapan apabila terjadi pergantian kepemimpinan, pemimpin yang baru dapat mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan oleh balai secara mudah

(8) Pengelolaan PNBP
- Perlu dicari alternatif lain yang dapat meningkatkan target PNBP Balai.
- Status TGR jalur pengembalian nya masuk ke dalam PNBP dan masuk ke dalam PNBP umum, status pengembaliannya wajib dikembalikan dan hasil pengembalian tidak bisa digunakan kembali seperti PNBP fungsional

Gambar 83. Proses Pemantapan dan Evaluasi Proposal TA 2025

Tabel 76. Daftar Kegiatan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2025

No	JUDUL KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN (RP.)
1	Pengadaan Alat Laboratorium (PNBP)	Ka. Laboratorium	10.074.000
2	Pendampingan Program Strategis Kementan	Ka. BPSIAHP	421.140.000
3	Pengelolaan, Operasional, dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet	Dr. M. Wahyu Trinugroho	7.600.000
4	Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Anggaran	Adang Hamdani, SP., M.Si	25.700.000
5	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	Ka. BRMP AHP	27.500.000
6	Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko Indeks	Ka. BRMP AHP	7.600.000

No	JUDUL KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN (RP.)
7	Pengelolaan Informasi Publik	Husna Alfiani, ST., M.Sc	8.694.000
8	Pelayanan Humas	Husna Alfiani, ST., M.Sc	19.600.000
9	Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga	Ka BRMP AHP	36.300.000
10	Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	Heri Wibowo, ST., M.Sc	16.000.000
11	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	Heri Wibowo, ST., M.Sc	16.000.000
12	Gaji dan Tunjangan	Heri Wibowo, ST., M.Sc	2.827.284.000
13	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Heri Wibowo, ST., M.Sc	3.379.200.000

Updating Aplikasi imonev

Entri aplikasi imonev rutin dilakukan setiap bulan untuk dimonitor oleh BRMP. Alamat web yang digunakan yaitu http://smart.kemenkeu.go.id, http://sso.bsipkementan.id, dan https://e-monev.bappenas.go.id. Isian berupa progress fisik kegiatan dan realisasi keuangan. Untuk aplikasi SMART DJA menampilkan nilai kinerja anggaran untuk aplikasi sso.bsipkementan.go.id menampilkan realisasi keuangan versi SP2D dan SPM serta e-monev.bappenas.go.id menampilkan capaian persentase fisikkegiatan dan anggaran . Update aplikasi imonev sudah dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2025.

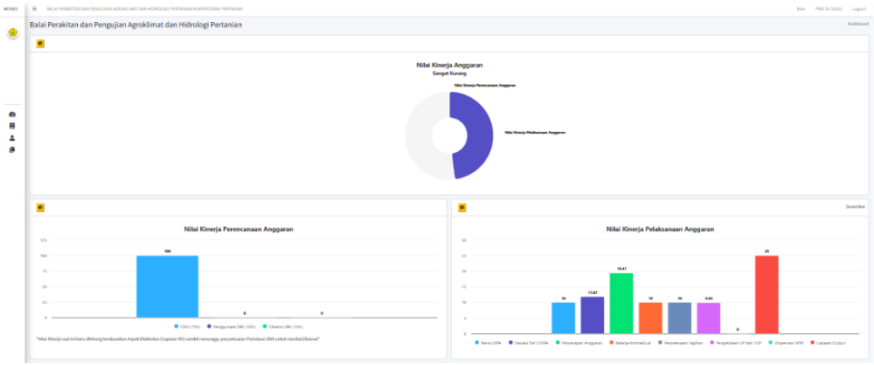

Gambar 84. Dashboard SMART DJA Sampai Akhir Desember 2025

untuk target PK 2025 nilai kinerja anggaran (NKA) diganti menjadi target IKPA Kementerian Pertanian sebesar 91. BRMP Agroklimat dan Hidrologi realisasi IKPA sampai dengan Desember 2025 sebesar 96,12.

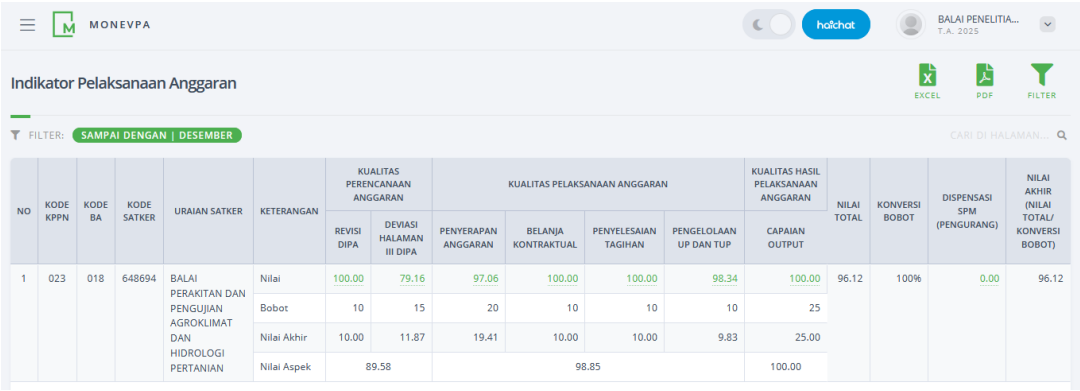

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	023	018	648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	Nilai	100.00	79.16	97.06	100.00	100.00	98.34	100.00	96.12	100%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.41	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	89.58		98.85				100.00				

Gambar 85. Dashboard monev IKPA Sampai Akhir Desember 2025

Realisasi Per Jenis Belanja

Aplikasi ini menampilkan realisasi keuangan versi SP2D dan SPM yang kita input harian, mingguan dan bulanan. Sampai dengan akhir bulan Desember 2025 realisasi Balai seperti diperlihatkan pada Tabel 77 di bawah:

Tabel 77. Realisasi Keuangan sampai akhir bulan Desember 2025

Uraian	PAGU dalam DIPA	Realisasi (Rp)		% terhadap PAGU		Sisa Anggaran (Rp)	
		Pengajuan	SPP	Pengajuan	SPP	Pengajuan	SPP
PAGU EFEKTIF	**6.794.298.000**	**6.716.470.013**	**6.716.470.013**	**98,85**	**98,85**	**77.827.987**	**77.827.987**
Belanja Pegawai	2.827.284.000	2.764.430.770	2.764.430.770	97,78	97,78	62.853.230	62.853.230
Belanja Barang	3.956.940.000	3.942.015.943	3.942.015.943	99,62	99,62	14.924.057	14.924.057
Belanja Barang Operasional	3.379.200.000	3.365.002.743	3.365.003.743	99,58	99,58	14.197.257	14.197.257
Belanja Barang Non Operasional	577.740.000	577.013.200	577.013.200	99,87	99,87	726.800	726.800
Belanja Modal	10.074.000	10.023.300	10.023.300	99,50	99,50	50.700	50.700

Penetapan Kinerja Tahunan (PK) TA 2025

Penetapan kinerja Tahun 2025 disusun setelah DIPA terbit. Penetapan Kinerja meliputi perjanjian kinerja antara eselon 3 dengan eselon 1. Dokumen ini berisi sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Dokumen ini disajikan pada lampiran. Dokumentasi Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja disajikan pada Gambar 3.

Untuk Perjanjian Kinerja (PK) TA 2025 mengalami perubahan atau revisi pasca harmonisasi Renstra Kementerian Pertanian. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang baru, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target dan capaian untuk bulan Desember diperlihatkan pada Tabel 78, sedangkan Contoh PK pegawai diperlihatkan pada Gambar 86-88.

Tabel 78. Progres Capaian Kinerja Indikator Sasaran bulan Desember

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
		UTAMA			
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	3.20	Indeks (1-4)	
2	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming* dan *Modern* Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang Tersedia	-	Teknologi	
		LAINNYA			
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81.21	Nilai (0-100)	84.20

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	91.00	Nilai (0-100)	96.12

Gambar 86. Dokumentasi Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Sasaran Kinerja Balai : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Sasaran Kinerja Atasan Penilai : Terlaksananya Tugas dan Fungsi BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Tata Usaha BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Persentase pelaksanan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja.	100	Persen
2	Terlaksananya tugas PPSPM BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Persentase pelaksanaan tugas sebagai PPSPM	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja	100	Persen

Bogor, 2 Januari 2025

Pegawai yang dinilai,

HERI WIBOWO, ST.,M.Sc
NIP. 197701212011011007
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Atasan Penilai,

RIMA PURNAMAYANI, SP., M.Si
NIP. 197606132003122001
Kepala Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Gambar 87. Contoh Dokumen PK 2025 (1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Sasaran Kinerja Balai : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Sasaran Kinerja Atasan Penilai : Terlaksananya Tugas dan Fungsi BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terlaksananya Tugas dan Fungsi layanan pengujian dan penilaian kesesuaian	Persentase pelaksanan tugas dan fungsi layanan pengujian dan penilaian kesesuaian	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja.	100	Persen
2	Terlaksananya Tugas kerja Manajerial Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	Persentase pelaksanaan tugas manajerial Layanan Pengujian dan Penliaian Kesesuaian	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja	100	Persen

Bogor, 2 Januari 2025

Pegawai yang dinilai,

Dr. KHARMILA SARI HARIYANTI, S.Si., M.Si
NIP. 197205162002122001
Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian Dan Penilaian Kesesuaian Agroklimat Dan Hidrologi

Atasan Penilai,

RIMA PURNAMAYANI, SP., M.Si
NIP. 197606132003122001
Kepala Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Gambar 88. Contoh Dokumen PK 2025 (2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Sasaran Kinerja Balai : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Sasaran Kinerja Atasan Penilai : Terlaksananya Tugas dan Fungsi BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil	Persentase pelaksanan tugas dan fungsi kerja program, evaluasi, dan penyebarluasan hasil	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja	100	Persen
2	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil	Persentase pelaksanan tugas dan fungsi kerja program, evaluasi, dan penyebarluasan hasil	100	Persen
		Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja	12	Bulan
		Persentase kesesuaian output kinerja dengan capaian kinerja	100	Persen

Bogor, 2 Januari 2025

Pegawai yang dinilai,

ADANG HAMDANI, SP, MSi
NIP. 197412262002121002
Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Agroklimat dan Hidrologi

Atasan Penilai,

RIMA PURNAMAYANI, SP., M.Si
NIP. 197606132003122001
Kepala Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Gambar 89. Contoh Dokumen PK 2025 (3)

Revisi Anggaran TA 2025

Sampai dengan bulan Desember BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sudah melakukan 14 kali revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 79. Rekap perubahan revisi anggaran TA 2025

Revisi ke-	Pagu Awal	Pagu revisi	DIPA Terbit	Keterangan revisi
	Rp. 6.384.104.000		02 Desember 2024	Program Belanja penggunaan PNBP dan Dukungan Manajemen (dukman). dengan masih disusunnya SOTK Badan Baru (BrMP), maka semua kegiatan diblokir kecuali: 1. 001 (Gaji), dan 2. 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)
1	Rp. 6.384.104.000	Rp. 6.384.104.000	12 Februari 2025	Halaman 3 DIPA
2	Rp. 6.384.104.000	Rp. 6.384.104.000	20 Februari 2025	Blokir Efisiensi
3	Rp. 6.384.104.000	Rp. 7.419.104.000	25 Maret 2025	- Pengembalian Semua Blokir Efisiensi - Tambahan Anggaran Pendampingan Program Strategis Kementan (masih blokir)
4	Rp. 7.419.104.000	Rp. 7.419.104.000	20 April 2025	Realokasi anggaran Gaji (Gaji Minus) Revisi tersebut diwajibkan dalam rangka rencana buka blokir kegiatan dukman dengan organisasi baru BRMP
5	Rp. 7.419.104.000	Rp. 7.419.104.000	30 April 2025	1. Buka blokir kegiatan dukman dengan efisiensi perjadin (kecuali kegiatan Monev, SPI, PPID, Humas -> Belum ada RO di BRMP) 2. Penambahan Anggaran Pendampingan Swasembada Pangan dengan blokir Efisiensi Perjadin & Bahan lapang + ATK
6	Rp. 7.419.104.000	Rp. 7.419.104.000	3 Juni 2025	- Penambahan Akun Tunjangan umum PPPK - Adjustment alokasi anggaran gaji PPPK dengan adanya PPPK baru
7	Rp. 7.419.104.000	Rp. 7.419.104.000	11 Juli 2025	Pemutahiran halaman III DIPA
8	Rp. 7.419.104.000	Rp. 7.462.055.000	2 September 2025	Tambahan Anggaran Belanja Pegawai serta buka blokir Kegiatan Monev & Humas
9	Rp. 7.462.055.000	Rp. 7.462.055.000	3 September 2025	Revisi POK kegiatan Pendampingan Strategis Kementan & Operasional Perkantoran
10	Rp. 7.462.055.000	Rp. 7.461.558.000	19 September 2025	Buka Blokir Penggunaan PNBP (Belanja Modal Laboratorium)
11	Rp. 7.461.558.000	Rp. 7.501.558.000	11 Oktober 2025	Tambahan Anggaran Perjadin Kegiatan Pendampingan Program

Revisi ke-	Pagu Awal	Pagu revisi	DIPA Terbit	Keterangan revisi
				Strategis Kementan
12	Rp. 7.501.558.000	Rp. 7.501.558.000	15 Oktober 2025	• Revisi POK (Pergeseran anggaran Perjadin & Operasional Perkantoran untuk optimasi Realisai anggaran) • Pencatatan Revisi Halaman III DIPA Triwulan IV 2025
13	Rp. 7.501.558.000	Rp. 7.501.558.000	13 November 2025	• Optimasi realisasi anggaran
14	Rp. 7.501.558.000	Rp. 7.501.558.000	02 Desember 2025	• Penambahan alokasi Uang Makan ASN • Realokasi anggaran Operasional Perkantoran untuk optimasi realisasi (002) • Realokasi anggaran Kegiatan dukman untuk optimasi realisasi

Penyusunan Matriks Program TA 2026

Penyusunan Program TA 2026 diawali dengan menyusun draft matrik TA 2026 mengacu pada Renja Balai Perkitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 2026. Matriks program TA. 2026 disusun guna mendapatkan gambaran secara umum mengenai sasaran kerja Balai, terutama yang berkaitan dengan rambu-rambu: justifikasi, kontinuitas, dan konsistensi terhadap program Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sesuai tupoksi yang baru. Penyusunan matrik TA 2026 disusun menyesuaikan pagu alokasi anggaran Indikatif TA 2026.

Penyusunan Draft Proposal TA 2026

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan matriks kegiatan Balai, maka perlu dilakukan penyusunan draft proposal kegiatan TA 2026. Proposal disusun untuk memberikan informasi tentang latar belakang, justifikasi, tujuan, keluaran, dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan terarah sesuai dengan yang direncanakan.

Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2026

Alokasi anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2026 disusun setelah pagu indikatif turun. Berdasarkan pagu indikatif tersebut selanjutnya dilakukan entry data kedalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hasil input data tersebut merupakan dasar penelaahan anggaran internal kementrian pertanian yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP/Irjen) dan Biro Perencanaan Kementrian Pertanian. Penyusunan RKAKL dan revieu APIP sudah dilakukan pada tanggal 28 September 2025 sd 1 Oktober 2025 di Hotel Permata Bogor.

Gambar 90. Arahan dan pembukaan Sekretaris Badan BRMP

Gambar 91. Revieu APIP BRMP AHP oleh tim APIP Itjen Kementan

Penyusunan RENJA Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 2026

Dinamika pembangunan pertanian menuntut suatu perencanaan strategis yang mantap dan sistematis agar bisa diacu setiap saat, sesuai dengan perkembangan penelitian lingkup Kementerian Pertanian khususnya, dan kepentingan pembangunan nasional pada umumnya. Untuk Renja 2026 mengikuti tupoksi Balai yang baru. Renja mengacu kepada: (1) Rencana Pembangunan Nasional (Repenas), (2) Grand Strategi Pembangunan Pertanian, (3) Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2026. Dengan adanya target sasaran yang akan dicapai, maka perlu disusun Rencana Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 2026. Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi penetapan program/kegiatan prioritas, memuat garis besar sasaran yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung perakitan dan modernisasi Pertanian.

Tabel 80. Renja TA 2026 (pagu alokasi)

Program / Kegiatan / Rincian Ouput	Anggaran
Sarana Laboratorium Sumber Daya Lahan Pertanian Modern	***15,476,000***
Alat Laboratorium Sumber Daya Lahan Pertanian Modern	*15,476,000*
Pengadaan Alat Laboratorium	*15,476,000*
Layanan BMN	**10,000,000**
Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya	10.000.000
Pengelolaan BMN	10.000.000
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	***100.000.000***
Layanan Hubungan Masyarakat	*80.000.000*
Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID)	*20.000.000*
Layanan Umum	***380.000.000***
Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	**380.000.000**
Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Anggaran	90,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Satker	*120.000.000*
Layanan Manajemen SDM	*70.000.000*
Layanan Manajemen Keuangan, Rumah Tangga dan Kearsipan	60,000,000
Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet	*40,000,000*
Layanan Perkantoran	***6.749.398.000***

Gaji dan Tunjangan	*3.311.398.000*
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.438.000.000
TOTAL	**7.340.874.000**

Pengukuran capaian kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi

Pada tanggal 7-9 Desember 2025 dilakukan workshop IKU 2025 di Hotel Savero Depok lingkup BRMP. Tujuan kegiatan ini untuk melihat capaian kinerja masing-masing satker serta menyusun manual Indikator Kinerja Sasaran kegiatan.

Indikator Kinerja Utama BRMP Agroklimat dan Hidrologi TA 2026 mempunyai 4 sasaran kegiatan dan 5 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target capaian dalam satu tahun. Rincian indikator kinerja kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 81. Indikator kinerja kegiatan TA 2026

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN TA 2026

Sasaran dan Indikator Kinerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian	Indeks kepuasan layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian	Indeks	3,20
2	Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian yang tersedia	Produk	1
		Jumlah pelaku usahatani yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian	Orang	50
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Nilai	84,20
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Nilai	87

Masing-masing indikator kinerja kegiatan mempunyai manual indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Manual Indikator 1 :

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui peningkatan kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian terhadap kualitas layanan pengujian yang diberikan Formula : Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Skala Likert 1-4 Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian yang dilakukan di B Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: - 2026: 3,20 2027: 3,21 2028: 3,22 2029: 3,23
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High

Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Rendahnya Partisipasi Responden	• Menyediakan berbagai kanal survei (online/offline). • Mengintegrasikan survei ke alur layanan (misal: otomatis setelah layanan selesai). • Memberikan insentif atau pengingat partisipasi. • Menetapkan quota sampling untuk representasi pengguna
Sistem Survei Tidak Berfungsi Optimal	• Menyediakan backup form (Google Form/Kertas). • Monitoring harian rekap data. • Backup database berkala. • Menjamin ketersediaan server dan dukungan teknis

Catatan	

2. Manual Indikator 2 :

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 - Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian yang tersedia
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur ketersediaan dan kesiapan adopsi berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
	Formula : Perhitungan Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan prasarana dan sarana pertanian yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
	Tujuan : mencatat sejauh mana teknologi digital, smart farming dan modern telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan agroklimat dan hidrologi pertanian
Satuan	Produk
Target	2025: - 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks pemanfaatan teknologi pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Agrokilmat dan Hidrologi Pertanian
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Indeks pemanfaatan teknologi oleh pengguna menurun	Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendayagunaan hasil perakitan teknologi kepada pengguna

Catatan	

3. Manual Indikator 3 :

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 - Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pelaku usahatani yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur ketersediaan dan kesiapan adopsi berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
	Formula : Perhitungan Jumlah pelaku usahatani yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian
	Tujuan : mencatat jumlah pelaku usahatani yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming dan modern agroklimat dan hidrologi pertanian
Satuan	Orang
Target	2025: 0 2026: 50 2027: 50 2028: 50 2029: 50
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks pemanfaatan teknologi pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya

Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Agrokilmat dan Hidrologi Pertanian
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Indeks pemanfaatan teknologi oleh pengguna menurun	Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendayagunaan hasil perakitan teknologi kepada pengguna

Catatan	

4. Manual Indikator 4 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.4 – Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan *check list* penilaian WBK / WBBM
	Formula : Instrumen pengukuran nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan *check list* penilaian WBK / WBBM
	Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
Satuan	Nilai
Target	2025: 81,21 2026: 84,20 2027: 84,50 2028: 84,75 2029: 85,00
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-

Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Agrokilmat dan Hidrologi Pertanian
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☒Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Nilai akhir pembangunan ZI tidak mencapai target	Mengumpulkan dokumen secara sistematis dan terkendali

5. **Manual Indikator 5 :**

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.5 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
	Formula : Instrumen pengukuran nilai IKPA berdasarkan beberapa aspek seperti Realisasi Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyampaian LPJ, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, serta Capaian Output.
	Tujuan: Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	2025: 87,0 2026: 87,5 2027: 88,0 2028: 88,5 2029: 89
Link dengan RPJMN	~~Ya~~/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Sumber Data	Data Primer
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☒ Bulanan ☐Triwulanan ☐Semesteran ☐Tahunan
Mitigasi Risiko	

Potensi Risiko	Mitigasi
Realisasi bulanan tidak sesuai dengan RPD sebagaimana halaman III DIPA sehingga deviasi melebihi 5%, oleh karena itu IKPA menjadi tidak maksimal	Melakukan pemantauan terkait realisasi anggaran dan capaian output setiap bulannya

Gambar 92. Workshop pengukuran indikator kinerja, Hotel Savero Depok

5.5. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

5.5.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan BRMP Agroklimat Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mendukung pelaksanaan monev tersebut, disusun panduan monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Panduan ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, serta untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pemantauan realisasi fisik dan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Mekanisme tersebut memungkinkan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara sistematis sehingga potensi permasalahan atau keterlambatan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat. Dalam hal ini, monitoring, pengendalian, dan evaluasi berfungsi sebagai alat manajemen untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat pencapaian indikator kinerja, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Informasi yang dihasilkan juga dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai laporan kinerja, antara lain laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi, laporan kegiatan manajemen, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). Keterpaduan antara pelaksanaan monev dan penyusunan laporan tersebut mencerminkan komitmen BRMP Agroklimat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, sekaligus menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan pada periode selanjutnya. Laporan monitoring dan evaluasi disusun pada pertengahan dan akhir tahun anggaran untuk memberikan gambaran kemajuan pelaksanaan kegiatan serta kendala yang dihadapi.

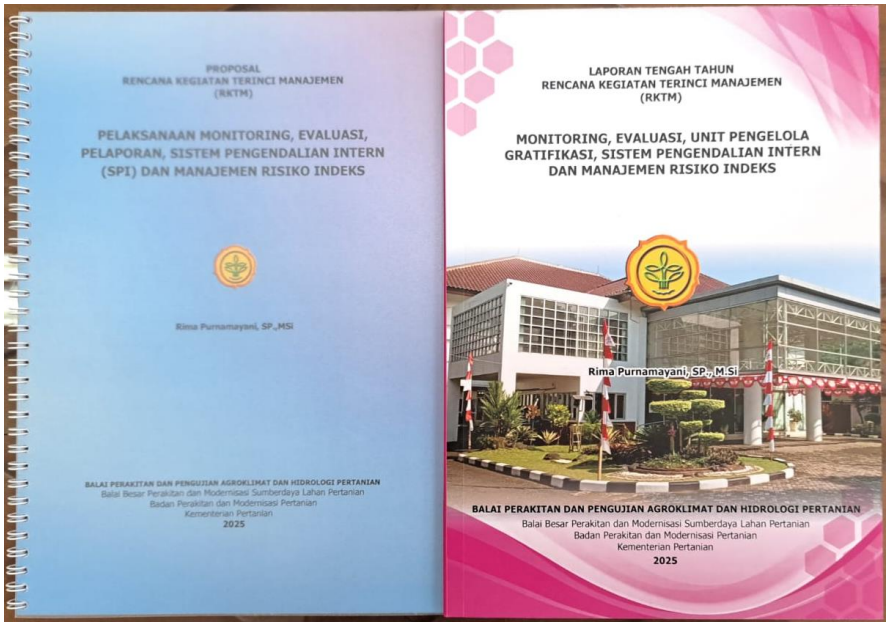

Gambar 93. Proposal dan laporan monitoring dan evaluasi yang telah disusun

5.5.2. Kesesuaian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dengan Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memastikan seluruh indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BRMP Agroklimat, termasuk pencapaian RSNI, pembangunan Zona Integritas, dan kinerja pelaksanaan anggaran, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta hasil yang diharapkan dari masing-masing unit kerja. Monitoring ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja, jadwal, dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja. Evaluasi tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan output dan hasil yang ditargetkan, seperti kontribusi kegiatan terhadap penyusunan RSNI, penguatan tata kelola dan integritas organisasi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.

Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di Satker BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari komitmen BRMP Agroklimat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang telah dilaksanakan hingga akhir tahun 2025. Kegiatan dimulai dengan perancangan pagu indikatif Balai yang dimulai di akhir 2024 dilanjutkan dengan pemenuhan evidence yang diminta dalam lembar kerja evaluasi (LKE) ZI dengan penialain silang antar UK lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan WBK/WBBM tahun 2025 difokuskan menyiapkan bukti-bukti otentik terkait pelakasanaan kegiatan WBK/WBBM di BRMP-AHP. Bukti-bukti tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang diminta dalam penilaian akuntabilitas kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan pelaksanaan internalisasinya di lingkup BRMP-AHP.

Berdasarkan hasil penilaian silang lingkup BRMP yang dilaksanakan pada pertengahan November 2025, BRMP Agroklimat memperoleh nilai Zona Integritas sebesar 82,20, yang masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 82,21. Menindaklanjuti hasil tersebut, BRMP Agroklimat diberikan kesempatan masa sanggah untuk melengkapi dan menyempurnakan dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah dilakukan perbaikan dan kelengkapan dokumen, pada penilaian akhir Zona Integritas yang dilaksanakan pada 27 November 2025, BRMP Agroklimat berhasil meningkatkan perolehan nilai menjadi 84,20.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ZI TA 2025

No	Satker	Target Nilai ZI	Capaian ZI	WBK	Ket. Area Tidak Lolos
23	BRMP Mektan	83.00	84.59	Lolos	
24	BRMP Biogen	83.50	92.16	Lolos	
25	BRMP Pascapanen	82.00	93.33	Lolos	
26	BRMP SDLP	83.35	88.63	Lolos	
27	BRMP Tanah dan Pupuk	87.95	89.39	Lolos	
28	BRMP Rawa	83.35	84.72	Lolos	
29	BRMP Agroklimat	81.21	84.20	Lolos	
30	BRMP Lingtan	83.35	88.47	Lolos	
31	BRMP Penerapan	80.00	86.09	Lolos	
32	BRMP Aceh	80.00	83.17	Tidak Lolos	IPAK
33	BRMP Sumut	80.00	92.70	Lolos	

Gambar 94. Hasil penilaian Zona Integritas Lingkup BRMP

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja pelaksanaan anggaran BRMP Agroklimat Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mencapai target nilai kinerja anggaran sebesar 87 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan data sementara hingga bulan Desember 2025, capaian kinerja anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai sebesar 96,12 sebagaimana tercatat dalam aplikasi SPANINT. Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan berada di atas target yang ditetapkan, meskipun penilaian kinerja anggaran tahun 2025 secara keseluruhan belum ditetapkan secara final.

Realisasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan output kegiatan yang dihasilkan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja organisasi. Konsistensi data pelaporan pada sistem yang digunakan juga mendukung keandalan informasi kinerja anggaran, sehingga dapat menjadi dasar dalam penilaian akhir kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI, BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	Nilai	100.00	79.16	97.06	100.00	100.00	98.34	100.00	96.12	100%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.41	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	89.58		98.85				100.00				

Gambar 95. Tangkapan layar nilai pelaksanaan kinerja anggaran per Desember 2025

5.5.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Tujuan

Sebagai bahan penilaian terhadap seluruh kegiatan manajemen dan perlu disesuaikan dengan RENSTRA yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut harus terukur indikator kinerjanya sesuai dengan rencana kinerja tahun berjalan. TOR/KAK dari kegiatan

tersebut harus selaras dengan kebijakan yang ada dalam RKT dan RENSTRA BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Pertanian. Selain kegiatan, perlu diperhatikan juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik itu proses lelang/tender dan waktu pelaksanaan, sesuai dengan kontrak kerja.

5.5.3.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada pemantauan realisasi fisik dan keuangan agar tetap sejalan dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Informasi realisasi anggaran digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan peruntukannya serta mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas. Evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup realisasi fisik dan keuangan berbentuk laporan realisasi yang dilakukan setiap awal bulan. Laporan tersebut menyajikan pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan bulan sebelumnya, yang sedang dikerjakan pada bulan berlangsung dan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Rekapitulasi presentasi realisasi fisik dan keuangan kegiatan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian s/d Desember 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 82 . Realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan Desember 2025

No.	Kegiatan	Pagu	Blokir Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
					Fisik	Keu
1	Sarana Laboratorium SDLP Modern	10.074.000	-	10.023.300	100	99,5
2	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.075.000.000	653.860.000	420.900.500	100	99,9
3	Layanan BMN	10.000.000	2.400.000	7.585.400	100	99,8
3	Layanan Humas dan Informasi	35.000.000	7.500.000	27.447.900	100	99,8
4	Layanan Umum	130.000.000	24.000.000	93.600.700	100	99,6
6	Layanan Perkantoran	6.206.484.000	0	6.129.433.513	100	98,8
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.000.000	7.500.000	27.478.700	100	99,92
	T O T A L	**7.419.104.000**	**707.206.000**	**6.249.400.323**	**100**	**99,5**

Laporan ini memantau pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, Layanan Barang Milik Negara, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Sarana Laboratorium SDLP Modern sampai dengan bulan Desember 2025, rekapitulasi kemajuan keuangan per 31 Desember 2025 mencapai 89,53% (pagu total) atau 99,5% (pagu efektif) dengan kemajuan fisik mencapai 100%. Dari capaian ini maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai hingga pertengahan tahun 2025 berdasarkan aplikasi SPANINT adalah 96,12.

Sumber dana DIPA SATKER BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun anggaran 2025 diperoleh dari APBN. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja (*unified budget*) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA TA 2025 SATKER BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dikelompokkan ke dalam :

1. Sarana Laboratorium SDLP Modern sebesar Rp. 10.075.000,-.

2. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1.075.000.000,-
3. Layanan Barang Milik Negara sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Layanan Humas dan Informasi sebesar Rp. 35.000.000,- terdiri dari :
   a) Pengelolaan Humas sebesar Rp. 25.000.000,-
   b) Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp. 10.000.000.-
5. Layanan Layanan Umum sebesar Rp. 130.000.000,-, terdiri dari
   a) Penyusunan Program dan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000.-,
   b) Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga sebesar Rp. 51.000.000,-
   c) Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu sebesar Rp. 22.000.000,-
   d) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan sebesar Rp. 22.000.000,-
6. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 6.206.484.000,-; meliputi;
   a) Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.827.284.000,-
   b) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 3.379.200.000,-.
7. Layanan Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 35.000.000,- meliputi :
   a) Monitoring, Evaluasi dan Unit Gratifikasi sebesar Rp. 25.000.000,-
   b) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Indeks sebesar Rp. 10.000.000,-

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sampai dengan bulan Desember 2025 mengalami Revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali. Pada Revisi DIPA ke-14 yang dikeluarkan pada 05 Desember 2025, terdapat revisi penambahan alokasi uang makan asn, realokasi anggaran operasional perkantoran untuk optimasi realisasi (002), dan realokasi anggaran kegiatan dukman untuk optimasi realisasi.

Realisasi anggaran BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.716.469.411,- atau sebesar 89,53% dari pagu total atau 98,85% dari pagu efektif dengan realisasi fisik mencapai 100%.

5.5.3.2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan output yang dihasilkan. Setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan capaian hasil serta kontribusinya terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pada pertengahan Tahun Anggaran 2025, realisasi pelaksanaan kegiatan masih relatif rendah. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh adanya blokir anggaran yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan. Memasuki semester kedua, sejumlah blokir anggaran mulai dibuka, disertai dengan adanya tambahan kegiatan ICARE, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali berjalan secara optimal.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat blokir serta adanya penyesuaian kegiatan ICARE, realisasi fisik kegiatan pada akhir tahun tetap mencapai 100 persen. Kegiatan teknis, termasuk penyusunan RSNI, tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak secara langsung didukung oleh alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya optimal dari seluruh unit kerja dalam memastikan target kinerja tetap tercapai.

5.5.3.3. Pelaksanan Evaluasi Tengah dan Akhir Tahun 2025

Evaluasi terhadap proposal dan laporan kegiatan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta untuk memastikan kelengkapan dan kualitas dokumen yang disampaikan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap kegiatan telah didukung oleh perencanaan yang memadai dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui tantangan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan, khususnya pada periode

dengan intensitas pelaporan yang tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses pengumpulan dan kompilasi data dari unit teknis serta penyesuaian format laporan yang harus diselaraskan dengan berbagai ketentuan pelaporan, sehingga menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan pada periode selanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan evaluasi kinerja, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian melaksanakan Evaluasi Tengah Tahun pada 24 Juli 2025 yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Untuk pelaksanaan evaluasi akhir tahun direncanakan pada awal Januari 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemajuan pelaksanaan seluruh kegiatan hingga pertengahan tahun anggaran berjalan.

Gambar 96. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Tengah TA. 2025

5.5.4. Evaluasi Kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) TA 2025

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Pertanian, maka perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) TA 2025 yang akan dilakukan pada akhir Desember 2025. Laporan tersebut berisi antara lain: (a) rencana stratejik yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan program BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian; serta (b) akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan pengukuran, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja, serta akuntabilitas keuangan TA 2025 secara rinci. Hal ini sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian TA. 2024 telah dilaksanakan di akhir bulan Januari 2025. Langkah-langkah telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mentapkan tujuan dan ruang lingkup laporan kinerja tahunan.
2. Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mengevaluasi kinerja balai selama tahun 2024 yang meliputi data operasional, finansial, dan statistik yang berkaitan dengan program dan proyek yang dilakukan oleh balai.
3. Melakukan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan untuk menentukan sejauh mana balai telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Identifikasi tren, pencapaian, dan area yang memerlukan perbaikan.
4. Visualisasi data dengan menggunakan grafik, diagram, dan tabel untuk memvisualisasikan data secara efektif. Ini membantu pembaca untuk dengan cepat memahami informasi yang disajikan dalam laporan.

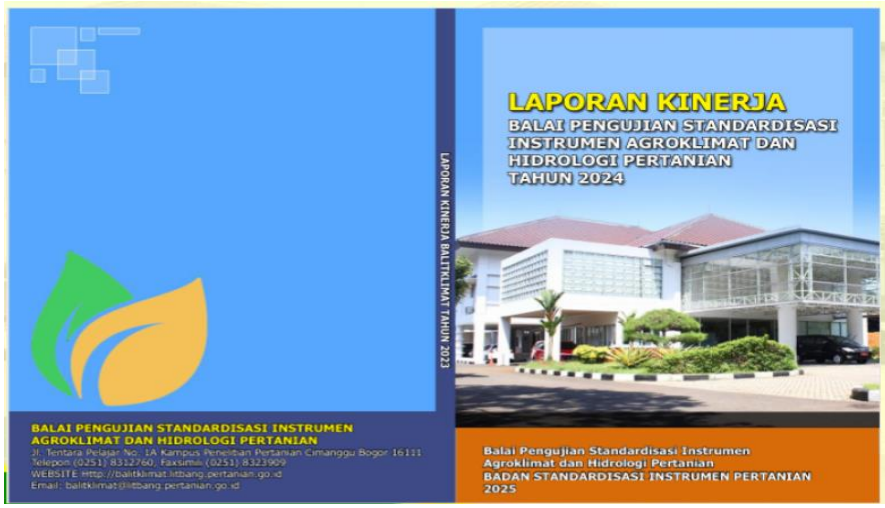

Gambar 97. Cover Laporan Kinerja TA 2024

5.5.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapang

Monitoring dan evaluasi (monev) lapang dilaksanakan dengan membagi tim menjadi dua kelompok, yaitu tim monev pendampingan dan tim monev Automatic Weather System (AWS). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Tim pertama melaksanakan monev pendampingan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Warung Kiara, Kecamatan Sukabumi. Wawancara dilakukan dengan seorang petani dan seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL). Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bermanfaat dalam menambah pengetahuan petani. Namun demikian, teknologi yang didiseminasikan belum dapat sepenuhnya diimplementasikan di lapangan. Luas lahan pertanian di Kecamatan Warung Kiara mencapai 266 hektar, tetapi yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar 40 hektar. Pengelolaan irigasi masih bergantung pada curah hujan, meskipun terdapat sumber air dari aliran Sungai Cicatih. Permasalahan muncul karena posisi lahan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber air sehingga membutuhkan pompa berdaya besar. Walaupun petani telah menggunakan pompa, biaya operasional yang tinggi menjadi kendala utama. Tim monev kemudian mengusulkan penggunaan pompa submersible yang lebih hemat biaya operasional. Selain itu, kerusakan jaringan irigasi sepanjang 9 km menyebabkan air tidak dapat mengalir ke lahan. Karena saluran tersebut berada di bawah kewenangan PUPR, diperlukan koordinasi dan sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementan untuk melakukan perbaikan. Tim juga menyarankan agar petani, melalui BPP, mengajukan usulan Oplah Lahan Kering kepada dinas terkait sehingga permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

Gambar 98. Pelaksanaan Monev Kegiatan Pendampingan Program Strategis di BPP Warung Kiara, Sukabumi

Sementara itu, tim kedua melaksanakan monev AWS di Kebun Percobaan Pakuwon, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi. Hasil monev menunjukkan bahwa AWS membutuhkan pemeliharaan secara menyeluruh, tidak hanya pencatatan data dan pengambilan kaset, tetapi juga mencakup pembersihan sensor, pengecekan fungsi sensor, serta penggantian boks sensor yang mengalami korosi akibat penggunaan jangka panjang. Tim monev mengusulkan agar pemeliharaan besar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan bila memungkinkan dengan dukungan anggaran, dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun untuk memastikan AWS berfungsi secara optimal.

Gambar 99. Pelaksanaan Monev Kegiatan Laboratorium (AWS) di KP Pakuwon, BRMPTRI, Sukabumi

Kedua Tim Monev kemudian berkoordinasi di Ruang Rapat Mess Kebun Percobaan Pakuwon, BRMP Tanaman Rempah Industri, Sukabumi Jawa Barat untuk menyampaikan hasil monevnya masing-masing. Kemudian pada kesempatan yang sama dilakukan penyusunan laporan hasil monev serta rencana tindak lanjut atas temuan di lapang.

Gambar 100. Penyampaian dan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi lapang

Secara keseluruhan, kegiatan monev lapang ini memberikan informasi mengenai manfaat program yang dirasakan petani sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi teknologi di lapangan. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas program, memperkuat dukungan infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi pertanian di tingkat lapangan.

5.5.6. Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Online

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tahun Anggaran 2025 di BRMP Agroklimat didukung oleh pemanfaatan berbagai aplikasi pelaporan berbasis sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaporan kinerja dan keuangan secara terintegrasi, serta untuk memastikan konsistensi data yang digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, BRMP Agroklimat memanfaatkan aplikasi yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta aplikasi yang berasal dari internal Kementerian Pertanian. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mencatat dan memantau realisasi anggaran serta capaian kinerja secara berkala. Adapun aplikasi yang digunakan yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (https://monev.kemenkeu.go.id), digunakan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang di update setiap bulan pada setiap rincian output kegiatan (RO) sehingga realisasi dapat dilaporkan capaian kinerjanya secara *realtime.*

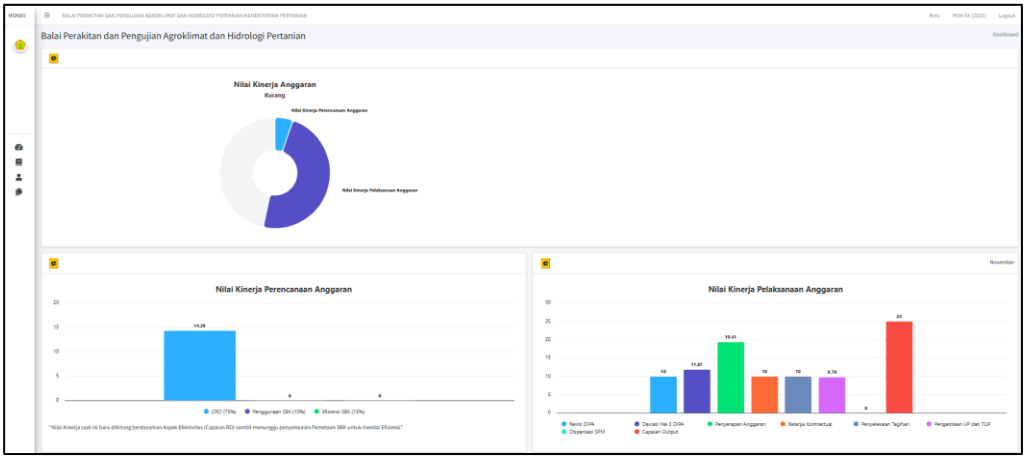

Gambar 101. Tangkapan layar Dashboard MONEV – KEMENKEU

Nilai indikator pelaksanaan anggaran hingga bulan Desember 2025 mencapai 96,12. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	023	018	648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	Nilai	100.00	79.16	97.06	100.00	100.00	98.34	100.00	96.12	100%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.41	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	89.58		98.85				100.00				

Gambar 102. Nilai indikator pelaksanaan anggaran BRMP Agroklimat hingga bulan Desember 2025

2. SPANINT (https://spanint.kemenkeu.go.id/), dipakai untuk menilai dan memantau kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja berdasarkan data keuangan yang ada di sistem Kementerian Keuangan.

Gambar 103. Tangkapan layar Dashboard (OM-SPAN)

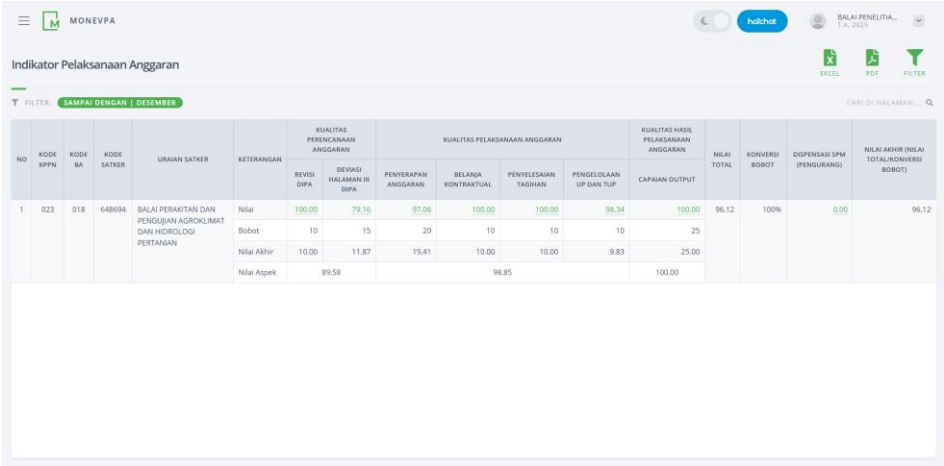

Gambar 104. Tangkapan layar nilai indikator pelaksanaan anggaran pada MONEVPA

3. SatuDJA (https://satudja.kemenkeu.go.id/), digunakan sebagai sarana pengajuan dan pengelolaan anggaran oleh satuan kerja kepada Kementerian Keuangan, yang menjadi dasar dalam penyusunan RKA-KL dan penerbitan DIPA

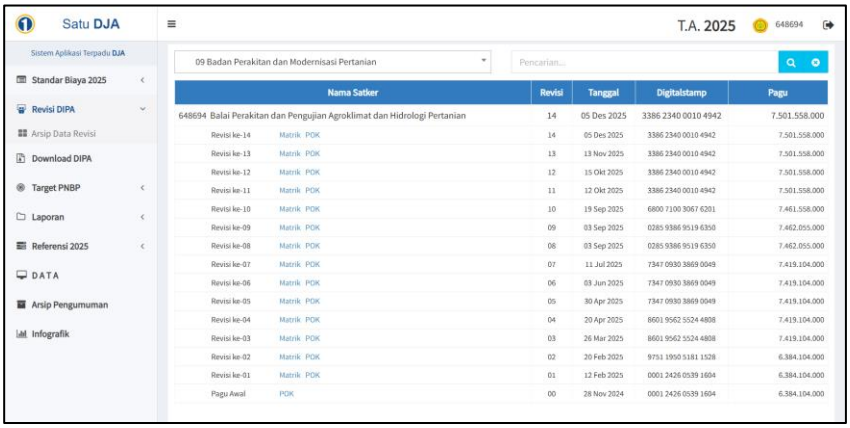

Gambar 105. Tangkapan layar tools revisi DIPA pada SatuDJA

4. E-Monev Bappenas (https://e-monev.bappenas.go.id/), digunakan sebagai sarana pelaporan dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan serta capaian output dan outcome pembangunan oleh Kementerian Pertanian kepada Kementerian PPN/Bappenas.

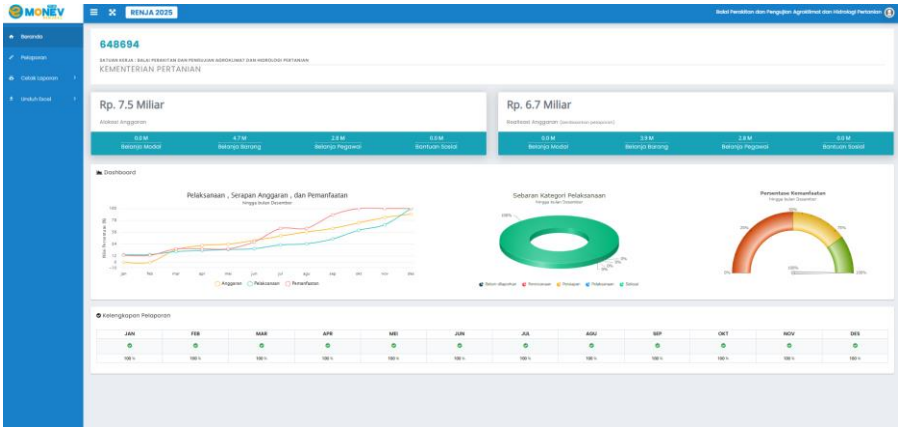

Gambar 106. Tangkapan layar dashboard E-Monev Bappenas

5. E-SAKIP Pertanian (https://iemon.pu.go.id), digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis dan terstruktur.

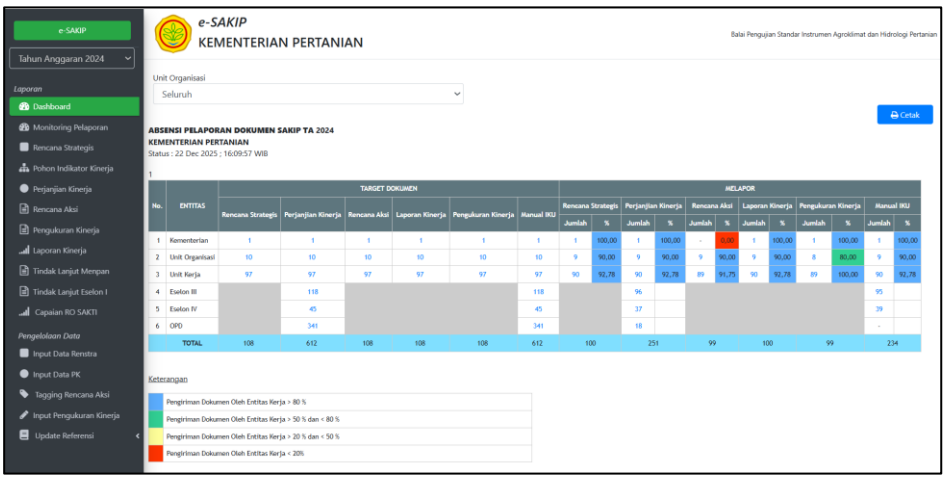

Gambar 107. Tangkapan layar dashboard E-SAKIP Kementerian Pertanian

Meskipun pemanfaatan aplikasi pelaporan online memberikan kemudahan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas data, penggunaan beberapa sistem pelaporan secara bersamaan juga memerlukan koordinasi dan pengelolaan waktu yang baik. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban administrasi, khususnya pada periode pelaporan tertentu, sehingga perlu dilakukan penguatan pengelolaan pelaporan agar penyampaian laporan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Secara keseluruhan, pemanfaatan aplikasi pelaporan online dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah mendukung peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan BRMP Agroklimat.

5.5.7. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada seluruh pemangku kepentingan, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupaya mewujudkan tata kelola organisasi yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya. Langkah ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalamnya termasuk penerapan mekanisme pelaporan yang jelas, pencegahan konflik kepentingan, serta menjadikan pengelolaan gratifikasi sebagai sarana pembelajaran bagi pegawai agar tetap menjaga martabat, profesionalitas, dan citra positif dalam bekerja. Selain itu, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga berkomitmen untuk menghindari kesalahan dalam penanganan gratifikasi, bersikap tegas terhadap setiap indikasi gratifikasi, serta membantu dalam mengkategorikan suatu aktivitas apakah termasuk gratifikasi atau tidak. Pedoman ini diharapkan dapat membantu seluruh pegawai dalam memahami, mencegah, dan menanggulangi gratifikasi, sekaligus menjaga hubungan kerja yang baik dan etis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun 2025 terangkum sebagai berikut:

1. Membuat dan memasang banner, poster, serta spanduk penolakan gratifikasi di lokasi-lokasi strategis yang berhubungan dengan pelayanan tamu, seperti di area front office atau lobby, dengan pesan visual maupun tulisan bertema anti-gratifikasi.
2. Menyelenggarakan sosialisasi anti-korupsi yang mencakup penolakan gratifikasi, kolusi, dan nepotisme kepada seluruh staf BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

3. Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, berupa form pelaporan mandiri mengenai pemberian gratifikasi.
4. Mensosialisasikan tata cara penanganan dan pelaporan gratifikasi kepada seluruh pegawai dan stakeholder BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, termasuk penjelasan mengenai prosedur, mekanisme tindak lanjut, dan bentuk pertanggungjawabannya.
5. Melaksanakan kampanye penolakan gratifikasi secara berkelanjutan dalam berbagai kesempatan, seperti rapat internal, pertemuan koordinasi, maupun kegiatan lainnya, sehingga seluruh pegawai semakin memahami risiko hukum gratifikasi dan tumbuh kesadaran untuk mendukung program anti-gratifikasi.
6. Terus mendorong penguatan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Tabel 83. Rekapitulasi Pelaporan Mandiri Pemberian Gratifikasi Lingkup BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Nama	**Jenis/Bentuk Gratifikasi**	**Nominal Uang yang diterima (Rp)**	**Tanggal Pemberian Gratifikasi**	**Lokasi Pemberian Gratifikasi**	**Pemberi Gratifikasi**
Rima Purnamayani	Honor Narasumber	800.000	14 April 2025	Hotel Mulia Senayan Jakarta	UNDP (United Nations Development Programme)
Heri Wibowo	Biaya pengambilan contoh pupuk untuk ijin edar	1.000.000	25 Juni 2025	Transfer	PT. Millenis Mitra Indonesia
Annisa Noyara Rahmasary	Lumpsum Perjadin yang di biayai oleh Instansi Lain	547.000	7 Agustus 2025	Hotel	Deputi Bidang Pengendalian PI dan Tata Kelola NEK, KLH
Annisa Noyara Rahmasary	Lumpsum Perjadin yang di biayai oleh Instansi Lain	500.000	25 Agustus 2025	Hotel	Deputi Pengendalian PI dan Tata Kelola NEK, KLH
Moch Agustian	Honor Tim Teknis	4.233.000	17 Oktober 2025	Kantor	Staf Dinas Peranian Kabupaten Cianjur
Adrian Munaf	Honor Tim Teknis	4.233.000	17 Oktober 2025	Kantor	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur
Adrian Munaf	Honor Narasumber	2.562.100	31 Desember 2025	Transfer	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
Muchamad Wahyu Trinugroho	Honor Narasumber	2.500.000	31 Desember 2025	transfer	Staf Dinas Pertanian Prov. jawa Barat
Nurwindah Pujilestari	Honor Narasumber	2.562.100	31 Desember 2025	Transfer Bank	Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat

Berikut hasil monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2025, di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian :

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2025, pegawai memberikan laporan manidiri mengenai pemberian gratifikasi berupa honor dan uang saku perjalanan dinas yang diberikan oleh instansi lain.
2. Secara umum, masih diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada seluruh pegawai mengenai gratifikasi, program pengendalian gratifikasi, mekanisme penanganannya, serta konsekuensi hukum yang berlaku. Sosialisasi dan kampanye

antikorupsi juga perlu diperkuat untuk menumbuhkan budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

3. Diperlukan sosialisasi mengenai Standar Prosedur Operasional (SOP) pengendalian gratifikasi, termasuk penjelasan mengenai formulir yang digunakan, alur pelaporan, serta tindak lanjutnya kepada penanggung jawab di setiap unit kerja.
4. Untuk mendukung pengendalian gratifikasi, perlu ditingkatkan kampanye melalui pemasangan poster dan banner bertema penolakan gratifikasi di lokasi-lokasi strategis.
5. Perlu disediakan lebih banyak saluran pengaduan, seperti tautan atau kotak pengaduan melalui website resmi BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian maupun media lain seperti email, WhatsApp, SMS, telepon, dan surat, dengan mencantumkan alamat pengaduan secara jelas.
6. Diperlukan langkah-langkah pengendalian yang bersifat mendasar, menyeluruh, dan sistematis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses reformasi ini perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan dukungan komitmen tinggi dari seluruh pegawai.

5.5.8. Pelaksanaan SPIP

Seluruh tata cara pelaksanaan sistem pengendalian intern Balai Perakitan dan Pengujian (BRMP) Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Pertanian mengacu pada Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Internal yang disusun oleh Satlak SPI BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan SOP Sistem Pengendalian Internal. Pada Tahun 2025, kegiatan pengendalian intern meliputi: 1) pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien; 2) memastikan keandalan pelaporan keuangan; 3) upaya pengamanan aset negara.

Hasil-hasil dokumen pengendalian intern Balai tersebut telah diperiksa oleh Satlak SPI setiap waktu, secara berkala. Kelengkapan dokumen tersebut telah dipersiapkan sebaik-baiknya sebagai bahan evaluasi pengendalian internal Balai. Hasil evaluasi telah menunjukkan kinerja yang berjalan dengan baik dan segala permasalahan/kendala telah ditemukan solusi.

5.5.9. Pengendalian Lingkungan SATKER

Pengendalian lingkungan SATKER, memerlukan monitoring dan ketegasan dari setiap Pimpinan dalam menegakkan kedisiplinan semua pegawainya. Apabila terjadi pelanggaran, harus menerapkan sanksi/tindakan korektif kedisiplinan terhadap jajarannya sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 menjadi PP Nomor 94 tahun 2021 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Bukti kedisiplian Tahun 2025 ini di sampaikan dalam bentuk Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Kesesuaian SDM juga perlu diperhatikan oleh pimpinan, apakah telah sesuai dengan latar belakang pendidikan sebagai salah satu dasar penetapan jabatan pegawai dalam organisasi. Jumlah sumber daya manusia/pegawai apakah telah mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi SATKER. Untuk meningkatkan kapabilitas pegawai, perlu diberikan diklat bagi semua pegawainya. Pengendalian lingkungan mencakup juga rencana anggaran SATKER setiap tahunnya, perlindungan terhadap aset-aset kantor serta evaluasi hasil kegiatan.

Visi, misi, dan tujuan SATKER harus mengacu pada tupoksi dari Unit Kerja/SATKER. Pimpinan SATKER perlu melakukan review terhadap capaian indikator kinerja secara berkala terhadap kegiatan strategis. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi perlu dibentuk dan dibuat SK Tim monev dan Tim SPI oleh Kepala SATKER. Untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan sosialisais SPI secara berkala agar seluruh pegawai dapat memahami tujuan pelaksanaan SPI. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas efektivitas penyelenggaraan SPI telah dilaksanakan

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja program/kegiatan unggulan dan layanan pertanian. Target dalam manajemen SPI yaitu:

a) Perencanaan (*planning*) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Perencanaan memegang peranan penting dan vital dalam fungsi manajemen yang berfungsi sebagai arah dalam merealisasikan tujuan dan sasaran setiap kegiatan. Sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko pelaksanaan kegiatan unit kerja yaitu Kerangka Acuan/ TOR;

b) Dalam pelaksanaan, pimpinan unit kerja harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan identifikasi awal terhadap risiko (titik-titik kritis) yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Titik-titik kritis pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Penetapan titik-titik kritis tersebut merupakan upaya untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengadakan sosialisasi hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) 2025 sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Dalam sosialisasi ini juga disampaikan rencana aksi 2025 yang akan diterapkan secara internal untuk menjaga komitmen dalam memerangi korupsi. Di sisi eksternal, BRMPAgroklimat berkomitmen untuk terus mempertahankan kualitas layanan dengan integritas tinggi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Gambar 108. Sosialisasi Hasil SPI, WBK, WBBM Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pegawai BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

5.5.10. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan guna menilai pencapaian target dan realisasi pelaksanaan suatu kegiatan (capaian kinerja), serta kendala- kendala yang terjadi di lapangan. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan/pengambil kebijakan untuk penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya dan meminimalisir ririko (titik-titik kritis) pelaksanaan kegiatan. Dengan kegiatan tersebut suatu program/ kegiatan dapat diukur dan dievaluasi hasilnya, sehingga diperoleh informasi secara kualitatif dan kuantitatif tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu program/ kegiatan.

Dalam melakukan pemantauan internal, dibuat laporan rutin sebagai bahan monitoring, baik itu berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Badan dan Pengembangan Pertanian. Pemantauan yang dilakukan oleh Kepala SATKER dan atau Tim SPI/Monev terhadap

setiap kegiatan melalui rapat koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan, dan atau evaluasi/presentasi akhir tahun dan akhir tahun. Laporan SPI kegiatan, harus memuat kondisi lapang, kendala yang dihadapi serta tindak lanjut mengatasi masalah yang ada. Laporan hasil pemantauan harus disampaikan tepat waktu dan permasalahan yang ada diatasi/ditindaklanjuti oleh Kepala SATKER dan atau masing-masing penanggungjawab kegiatan.

Gambar 109. Pelaksanaan Monev Kegiatan Semester I TA. 2025

5.5.11. Keandalan Pelaporan Keuangan

Salah satu kegiatan pemantaun yang dilakukan Adalah dengan memastikan keandalan pelaporan keuangan. Pelaksanaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada BRMP Agroklimat dan Hidrologi yang telah ditetapkan dan disahkan, dilaksanakan setelah dilakukanproses perencanaan, penganggaran dan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

a) Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
b) Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
c) Secara Umum tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dan lain-lain).

Titik perhatian kegiatan pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan atau diharapkan dapat dicapai dengan maksimal dan tidak menyimpang dari rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang sudah ada dan masih berlaku secara umum.

Tabel 84. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan Desember 2025 (berdasarkan realisasi pada spanint kemenkeu)

No	UK/UPT/Belanja	Pagu Anggaran (000)	Keuangan		Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
			Realisasi (Rp.000)	Realisasi (%)		
1.	**BRMP Agroklimat dan Hidrologi**	**7.491.484**	**6.706.446**	**89,52**	Terjadi blokir anggaran pada belanja barang	
2.	Belanja Pegawai	2.827.284	2.764.430	97.78	Tidak ada masalah	-
3.	Belanja Barang	4.664.200	3.942.015	84,52	Terjadi blokir anggaran	-
4.	Belanja Modal	10.074	10.023	99.50	Tidak ada masalah	-

Laporan ini memantau pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Sarana Laboratorium SDLP Modern sampai dengan bulan Desember 2025, rekapitulasi kemajuan keuangan per 31 Desember 2025 mencapai 89,52% (pagu total) dengan kemajuan fisik mencapai 100%. Dari capaian ini maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai berdasarkan aplikasi MONEV KEMENKEU adalah 96,12. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja balai berupa Terkelolanya Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan target indeks capaian sebesar 87.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	023	018	648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	Nilai	100.00	79.16	97.06	100.00	100.00	98.34	100.00	96.12	100%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.41	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	89.58		98.85				100.00				

Gambar 110. Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi MONEVPA

Sumber dana DIPA SATKER BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tahun anggaran 2025 diperoleh dari APBN. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja (*unified budget*) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA T.A 2025 SATKER BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dikelompokkan ke dalam :

8. Sarana Laboratorium SDLP Modern sebesar Rp. 10.075.000,-.
9. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1.075.000.000,-
10. Layanan Barang Milik Negara sebesar Rp. 10.000.000,-
11. Layanan Humas dan Informasi sebesar Rp. 35.000.000,- terdiri dari :
    c) Pengelolaan Humas sebesar Rp. 25.000.000,-
    d) Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp. 10.000.000.-
12. Layanan Layanan Umum sebesar Rp. 130.000.000,-, terdiri dari
    e) Penyusunan Program dan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000.-,
    f) Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga sebesar Rp. 51.000.000,-
    g) Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu sebesar Rp. 22.000.000,-
    h) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan sebesar Rp. 22.000.000,-
13. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 6.206.484.000,-; meliputi;
    c) Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.827.284.000,-
    d) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 3.379.200.000,-.
14. Layanan Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 35.000.000,- meliputi :
    c) Monitoring, Evaluasi dan Unit Gratifikasi sebesar Rp. 25.000.000,-
    d) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Indeks sebesar Rp. 10.000.000,-

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sampai dengan bulan Desember 2025 mengalami Revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali. Pada Revisi DIPA ke-14 yang

dikeluarkan pada 05 Desember 2025, terdapat revisi penambahan alokasi uang makan asn, realokasi anggaran operasional perkantoran untuk optimasi realisasi (002), dan realokasi anggaran kegiatan dukman untuk optimasi realisasi.

Realisasi anggaran BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.716.469.411,- atau sebesar 89,53% dari pagu total atau 98,85% dari pagu efektif dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Berdasarkan laporan dari aplikasi SPANINT KEMENKEU Realisasi anggaran BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.716.469.411,- atau sebesar 89,53% dari pagu total atau 98,85% dari pagu efektif dengan realisasi fisik mencapai 100%.

NO.	KODE | NAMA JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	JUMLAH DIBLOK/ DIREVISI	DANA TERSEDIA
1	51 | BELANJA PEGAWAI	2,827,284,000	2,764,430,770	97.78%	0	0	62,853,230
2	52 | BELANJA BARANG	4,664,200,000	3,942,015,943	84.52%	0	707,260,000	14,924,057
3	53 | BELANJA MODAL	10,074,000	10,023,300	99.50%	0	0	50,700
	Jumlah	**7,501,558,000**	**6,716,470,013**	**89.53%**	**0**	**707,260,000**	**77,827,987**

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Gambar 111. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja pada SPANINT KEMENKEU

5.5.12. Keamanan Aset Negara

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah melaksanakan upaya pengamanan aset negara secara menyeluruh, meliputi aspek keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap seluruh barang milik negara (BMN) yang berada di lingkungan satuan kerja. Dari sisi keamanan administrasi, seluruh aset telah tercatat dan terinventarisasi dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penanggung jawab BMN di setiap unit kerja memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti berita acara serah terima, bukti pembelian, dan surat penetapan status penggunaan. Kegiatan rekonsiliasi data BMN juga dilakukan secara rutin antara pengelola barang dan bagian keuangan untuk menjamin kesesuaian data fisik dan administrasi.

Dari aspek keamanan hukum, pengelolaan aset telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara serta pedoman internal Kementerian Pertanian. Aset yang sudah tidak digunakan telah diusulkan untuk penghapusan sesuai mekanisme yang diatur agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu, penggunaan aset negara untuk kepentingan dinas maupun kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan surat tugas dan persetujuan pejabat berwenang.

Sementara dari aspek keamanan fisik, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah menerapkan sistem pengamanan berlapis, antara lain melalui petugas keamanan, pembatasan akses ruang tertentu, pemasangan CCTV di area strategis, serta pengawasan terhadap kendaraan dinas dan peralatan laboratorium. Pemeliharaan aset dilakukan secara berkala guna memastikan kondisi aset tetap optimal dan aman dari kerusakan maupun kehilangan. Secara umum, upaya pengamanan aset negara di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian telah berjalan efektif dan tertib, ditunjukkan dengan tidak adanya kasus kehilangan atau penyalahgunaan aset negara selama periode pelaporan.

5.5.13. Ketaatan terhadap Perundang-undangan

Dalam aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bidang keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan kegiatan teknis.

Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta pedoman pelaksanaan kegiatan perakitan dan standardisasi serta administrasi pemerintahan. Pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme review dokumen oleh pejabat berwenang, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pendampingan dari unit kepatuhan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran administratif maupun hukum.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat temuan ketidakpatuhan yang signifikan di lingkungan BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Selain itu, hingga saat ini tidak terdapat kasus korupsi atau pelanggaran hukum yang melibatkan pegawai satuan kerja. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi serta penerapan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara keseluruhan, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, melalui penerapan sistem pengawasan internal yang efektif dan budaya kerja yang berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5.5.14. Informasi dan Komunikasi

Informasi laporan hasil kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian harus menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing kegiatan di lapangan. Hasil data capaian kinerja kegiatan tersebut direkap dalam bentuk presentasi kemajuan fisik dan keuangan (rekapitulasi bulanan). Rekapitulasi bulanan ini dilaporkan secara berkala (setiap bulan) kepada Kepala SATKER sebagai bahan laporan. Selain rekap bulanan laporan fisik dan keuangan, capaian kinerja kegiatan juga dilaporkan dalam bentuk laporan triwulanan. Laporan tersebut berfungsi untuk melihat kesesuaian antara output dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai sarana komunikasi, Balai Penelitiaan Agroklimat dan Hidrologi mempunyai *website* yang di*update* secara rutin dan dalam pelaksanaannya telah ditunjuk petugas khusus yang memantau dalam perkembangan informasinya. Selain *website*, di BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian juga disediakan papan pengumuman dan kotak saran sebagai media informasi kepada seluruh pegawai.

Gambar 112. Website BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Gambar 113. Portal PPID BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

5.6. Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agrohidromet

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP Agroklimat) memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pertanian Indonesia khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian. Balai pengujian ini dibentuk dalam rangka mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya iklim dan air untuk pembangunan pertanian. Luaran utama BRMP Agroklimat adalah data dan informasi sumberdaya iklim dan air serta teknologi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya iklim dan air mendukung sistem produksi pertanian.

Laboratorium Agrohidromet di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP Agroklimat) berdiri sejak tahun 2004. Sesuai dengan mandatnya, Laboratorium Agrohidromet merupakan bagian sarana dari BPSI Agroklimat yang digunakan untuk membantu institusi dalam memecahkan permasalahan terkait tupoksinya dan juga melayani pelanggan dari luar institusi. Laboratorium Agrohidromet beranggotakan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan teknisi yang terbagi ke dalam tugas sesuai dengan keahliannya.

5.6.1. Bagian Pemantauan dan Pengamatan Iklim dan Hidrologi Pertanian

5.6.1.1. Monitoring dan Penggantian spare part AWS

Ada dua jenis AWS yang dikenal di lingkup BRMP Agroklimat dan Hidrologi, yaitu AWS CIMEL dan AWS TELEMETRI. Kedua tipe AWS tersebut menggunakan sebuah data logger untuk mengumpulkan dan menyimpan data pengukuran dari sensor. AWS CIMEL menggunakan kaset atau cartridge dalam penyimpanan datanya, dan data yang sudah disimpan diakses melalui cartridge tersebut, yang mempunyai masa simpan hingga 43 hari di dalam data logger stasiun AWS. Pengambilan data pada AWS Cimel masih membutuhkan datang ke lokasi AWS dan mengambil data yang terekam di catridge, berikutnya catridge diganti dengan yang kosong. Sementara AWS TELEMETRI lebih mudah pengambilan datanya, karena melalui teknik pengiriman data dari stasiun iklim ke pusat pengelolaan data (server) dan mengandalkan GSM sebagai sarana transfer data ke server tersebut. Sehingga data dapat langsung diakses, tanpa harus mengunjungi lokasi stasiun AWS.

Pada prinsipnya, semua stasiun cuaca di Indonesia mengacu pada standar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta dirancang sesuai dengan

pedoman Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Parameter iklim utama yang diukur untuk kepentingan pertanian adalah kecepatan angin, arah angin, suhu udara, kelembaban udara, radiasi matahari, curah hujan dan tekanan udara. Beberapa stasiun AWS CIMEL sudah dipasang sejak tahun 2000 umumnya tipe Enerco 407 buatan Cimel Perancis, sementara AWS TELEMETRI baru dikembangkan sejak tahun 2012. Apabila melihat waktu pasang, AWS Cimel sudah cukup lama umurnya, sehingga wajar kemudian kalau ada saja sensor yang rusak atau tidak/ kurang berfungsi dengan baik. Untuk sensor yang kondisinya kurang laik tersebut, akan dilakukan penggantian seiring dengan ketersediaan sensor yang dimiliki laboratorium.

Dalam peningkatan database hasil pemantauan dan pengamatan stasiun iklim dan hidrologi pertanian nasional, dilakukan kegiatan pemantauan dan pengamatan stasiun iklim dan hidrologi di lokasi Jawa Barat dan lokasi luar Jawa Barat, dengan fokus pada AWS Cimel dan Telemetri dan AWLR Cimel. Untuk lokasi Jawa Barat ada beberapa stasiun AWS Cimel yaitu; Cimanggu-Bogor, Muara-Bogor, KP Pakuwon-Sukabumi, Pacet-Cianjur, Sukamandi, Kuningan, dan Pusakanagara. Pengambilan data AWS Cimel lingkup Bogor, Sukabumi dan Cianjur dilaksanakan secara bergilir setiap bulan oleh teknisi dan peneliti Balitklimat, sedangkan lingkup Sukamandi, Kuningan, dan Pusakanagara diambil oleh BBPADI. Untuk luar Jawa Barat, data diambil oleh instansi setempat.

Pada bulan Januari s.d Desember dilakukan pengecekan rutin AWS Cimanggu-Bogor, Kp. Muara-Bogor, Pakuwon-Sukabumi, serta Pacet-Cianjur. Untuk KP Pakuwon secara umum keadaan semua sensor dalam kondisi baik. Casing kelembaban dan suhu perlu dibersihkan, serta penghitung hujan dibersihkan dari sarang laba-laba yang mengganggu mekanik, selain itu di dalam box logger terdapat sarang tawon dan sudah dibersihkan. Gembok luar harus ganti. Kondisi lingkungan terawat. Lokasi ketiga di KP Muara. Kondisi pagar kawat luar banyak yang bolong, gembok luar tidak bisa dibuka, kemudian kondisi lingkungan/rumput cukup tinggi. Untuk kondisi sensor secara keseluruhan dalam keadaan baik. Kondisi keempat untuk lokasi Pacet, kondisi sensor baik dan terjaga, Adapun kondisi kelima untuk lokasi Cimanggu sensor baik, dilakukan pembersihan pada penghitung hujan serta mekaniknya, lingkungan rumput terjaga dan terawat.

Selain pengambilan data dan penggantian cartridge dilakukan juga pengecekan dan pemeliharaan stasiun dan lingkungan. Pemeliharaan stasiun dimaksudkan untuk menjaga agar komponen stasiun iklim yang terdiri dari perangkat elektronik dapat tetap bekerja secara kontinyu sehingga kualitas dan kontinuitas data tetap terjaga. Perawatan dilakukan dengan cara membersihkan box shelter, sensor, misalnya kondisi penakar curah hujan tersumbat dedaunan sehingga air tergenang mengakibatkan data sensor curah hujan tidak terbaca, atau box logger dipenuhi sarang semut sehingga perlu sering dibersihkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu perawatan sensor adalah mengamati kerja sensor apakah perlu penggantian sensor, membersihkan sensor, mengganti bagian-bagian sensor, dan memeriksa bagian sensor seperti bearing, koneksi soket dll. Sementara kondisi lingkungan dengan memperhatikan kondisi rerumputan di stasiun, kondisi pagar dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dengan penjaga stasiun AWS/AWLR, yang melakukan pemeliharaan lingkungan dan stasiun, ditingkatkan menjadi lebih sering. Pada Tabel 36 dan 37 disajikan catatan kondisi stasiun AWS Cimel berdasarkan catatan pada pengambilan cartridge bulan Januari sd Desember. Pelaksanaan pengecekan stasiun dan pengambilan catridge AWS Cimel lingkup Bogor, Sukabumi dan Cianjur disajikan pada Gambar.

Tabel 85. Kondisi instrumentasi di stasiun lingkup Bogor-Sukabumi-Cianjur berdasarkan catatan bulan Januari-Desember 2025

Nama Stasiun	Lokasi	Kondisi instrumentasi
AWS KP Pakuwon	Pakuwon Sukabumi	Sensor dalam keadaan baik, lingkungan sekitar terawat.
AWS KP Pacet	Pacet Cianjur	Semua sensor dalam kondisi baik kecuali **sensor curah hujan** perlu diganti, lingkungan sekitar baik dan terawat.
AWS KP Muara	Muara Bogor	Kondisi lingkungan stasiun kurang baik rumput sekitar sudah mulai tinggi, gembok sudah tidak bisa digunakan. Untuk sensor yang lain pembacaan masih baik, baterai logger dilakukan penggantian. Perlu dilakukan setting tahun pada logger
AWS KP Cimanggu	Cimanggu Bogor	Seluruh sensor AWS dalam keadaan baik.

Gambar 114. Pengecekan AWS Cimanggu pada bulan Januari-Desember 2025

Gambar 115. Pengecekan AWS di Pakuwon,Sukabumi bulan Januari-Desember 2025

Gambar 116. Pengecekan AWS Muara, Kab.Bogor bulan Januari-Desember 2025

Gambar 117. Pengecekan AWS Pacet,Cianjur bulan Januari-Desember 2025

5.6.1.2. Pemutakhiran Teknologi Iklim

BRMP Agroklimat memiliki bangunan *greenhouse* yang berfungsi sebagai petak pamer dan diseminasi teknologi iklim dan air skala mikro. Tahun 2025, BRMP Agroklimat memiliki koleksi sarana prasarana untuk pengujian iklim mikro pertanian *smart screenhouse*. Sarana ini dijadikan sebagai tempat untuk uji standar iklim mikro tanaman utamanya parameter iklim dan air.

Di bulan Mei ini dilakukan beberapa perawatan, pemeliharaan, dan penyesuaian kondisi GH, antara lain :

1. Pembersihan dan penyesuaian posisi cooling pad
   Kondisi cooling pad saat ini sedikit merosot dadi pada kondisi sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan menambah ketinggiannya. Pada bagian sirip juga dilakukan pembersihan dan pencucian untuk menghindari timbulnya sumber hama.
2. Penambahan exhaust fan pada bagian atas GH
   Untuk mengurangi kelembaban dan suhu yang masih cukup tinggi didalam GH, maka ditambahkan 4unit kipas exhaust dibagian atas.
3. Pembersihan bak penampung air
   Dilakukan pembersihan dan pencucian bak karena tumbuhnya lumut pada bagian dinding bak. Jika lumut tidak dibersihkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.
4. Pembersihan gulma
   Pada bagian sisi dinding GH dan weed pad ditumbuhi rumput gulma. Hal ini terjadi karena ada bagian bawah atau tanah yang masih terekspos oleh sinar matahari.

5. Pengecekan jalur irigasi
   Pada jalur pipa irigasi dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada jalur yang bocor pada sambungan, maupun ada bagain yang rusak atau berlubang.

Setelah dilakukan perawatan dan peremajaan, pada bulan Juni ini dilakukan beberapa penyemaian untuk tanaman melon. Dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Semai biji tanaman buah Melon.
   Tanaman buah Melon yang akan disemai dipilih dari jenis Madesta F1. Melon rock hibrida "Cukup tahan Gemini virus" untuk dataran rendah-menengah, tanaman sangat vigor, bentuk buah bulat lonjong, net kulit rapat, warna kulit hijau gelap, warna daging orange kemerahan, buah keras, tahan simpan ±9 hari, toleran terhadap embun tepungPenyemaian dilakukan pada tanggal 6 Juni 2025.
2. Pindah tanam
   Pindah tanam dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025. Tanaman dipindah dari persemaian ke media tanam hidroponik setelah tumbuh 1-2 helai daun sejati. Bibit yang pertumbuhannya kurang baik/tidak seragam sebaiknya tidak digunakan sebagai bahan tanam. Penanaman bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari. Pada sore hari bibit akan beradaptasi terlebih dahulu sebelum esok harinya mendapatkan cahaya matahari langsung. Pada saat penanaman media harus dalam keadaan basah.

Gambar 118. Proses pindah tanam

3. Pemasangan tali ajir
   Pemasangan tali ajir bertujuan untuk membantu tanaman agar dapat tumbuh tegak keatas. Perambatan dilakukan secara hati-hati agar batang tanaman tidak mudah patah.

Gambar 119. Pemasangan tali ajir

4. Penambahan nutrisi
   Penambahan larutan nutrisi AB mix dilakukan sejak awal pemindahan tanam. Larutan AB mix mengandung unsur makro dan mikro yang sangat diperlukan untuk fase pertumbuhan tanaman, baik fase vegetative maupun fase generative.

Dalam proses vegetatif dan generatif tanaman melon, dilakukan beberapa perbaikan atap plastik UV, pemeliharaan dan penyemprotan insektisida. Pada tanaman melon mulai muncul gelaja serangan Kutu Aphids (*Aphis gossypii Glover*). Aphid yang menyerang tanaman melon memiliki sayap berwarna hijau pada saat masih muda dan berwarna sedikit kehitaman pada saat dewasa. Aphid menyerang tanaman melon dengan cara menghisap cairan tumbuhan atau hasil fotsintesis sehingga tanaman menjadi lemah.

Gambar 120. Kutu Aphids (*Aphis gossypii Glover*)

Buah melon dapat dipanen setelah 68 – 72 hari setelah tanam. Setiap jenis melon mempunyai ciri panen yang berbeda-beda. Pemanenan dilakukan pada buah yang yang telah mempunyai ciri siap panen yaitu:

- Muncul keretakan pada pangkal tangkai buah sehingga terbentuk garis pemisah yang berbentuk melingkar.
- Terjadi perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi krem, putih, atau kuning.
- Muncul aroma khas melon, aroma tersebut berasal dari gas etilen yang menandakan tingkat kematangan.
- Apabila buah melon ditepuk akan terdengar suara yang nyaring.
- Permukaan kulit melon reticulatus akan tertutup jaring dengan intensitas yang besar (Huda et. al., 2018).

Gambar 121. Panen Melon pada bulan September 2025

Melon dipanen sejumlah 4 kali yaitu, 26 Agustus, 30 September, 2 dan 6 Oktober, yang dikonsumsi beberapa pegawai BRMP Agroklimat. Total panen melon dalam perioede tersebut adalah 41 dengan berat rata-rata melon berkisar 1 – 2 kg/buah. Dari hasil ini performa rumah kasa sebagai wadah edukasi dan penerapan pengetahuan sekaligus teknologi sudah berjalan sesuai fungsinya. Pada pelaksanaan ke depan diharapkan dapat ditingkatkan lagi dalam hal pengetahuan, teknologi dan kemampuan pembudidaya di rumah kasa, melalui otomasi, dan modernisasi budidaya.

5.6.2. Bagian Identifikasi Sumberdaya Iklim dan Air

Titik tolak dari optimalisasi dalam kaitannya dengan sumberdaya iklim dan air adalah ketersediaan data dan informasi iklim dan cuaca, serta data hidrologi yang lebih lengkap, akurat, dan cepat (tepat waktu). Untuk itu diperlukan penajaman program pengujian agroklimat dan hidrologi yang didukung oleh sarana dan peralatan lapang dan laboratorium yang handal dan mampu mengembangkan sistem dinamik informasi iklim dan air untuk pertanian.

5.6.2.1. Kalibrasi Alat dan Perbaikan

Bagian ini bertanggungjawab pada pemeliharaan dan operasional peralatan sumberdaya iklim dan air. Salah satu hal yang diperlukan untuk mengetahui kondisi alat serta untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat adalah dengan melakukan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan setiap tahun pada instrumentasi yang sering dipergunakan, seperti pada total station dan theodolit. Kalibrasi yang telah dilakukan adalah kalibrasi peralatan Theodolit, Total Station dan Sprinter. Rencana dan realisasi kalibrasi untuk disajikan pada Tabel 38. Kalibrasi alat dilakukan dalam dua cara, yaitu kalibrasi yang dilakukan sendiri dan kalibrasi yang dilakukan oleh pabrik/lembaga terkait. Dokumentasi seluruh peralatan yang digunakan untuk kegiatan survey dan analisis dilakukan di bagian ini. Balitklimat melayani peminjaman instrumentasi baik untuk kegiatan internal maupun untuk luar Balitklimat. Selain melayani peminjaman instrumentasi, juga melayani permintaan data iklim.

Tabel 86. Rencana dan realisasi kalibrasi tahun 2025

No	Jenis Instrumentasi	Frekuensi Kalibrasi	Tindakan Kalibrasi	Rencana	Realisasi
1.	Theodolite	1 kali setahun	LIPI/Produsen	Juni 2025	Oktober 2025
2	Total station	1 kali setahun	Produsen		discontinyu

Gambar 122. Kalibrasi Instrumentasi Teodolite

Beberapa alat laboratorium telah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan karena beberapa sebab, diantaranya adalah terjadi kerusakan, usia pakai, discontinyu perangkat lunak serta keterbatasan suku cadang. Kondisi demikian perlu dilakukan tindak lanjut yaitu dengan melakukan pemberhentian status alat dari BMN karena hal ini terkait biaya maintenance yang melekat pada alat tersebut. Adapun catatan pengecekan alat yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 87. Daftar alat tidak berfungsi

No	Alat	Kondisi Alat	Tindakan Pemeliharaan	Perbaikan / Catatan
1	GPS RTK	Rusak Berat	Dilakukan ajuan penghapusan aset	Tidak tersedia suku cadang karena alat sudah tidak diproduksi dan saran produsen harus diadakan
2	River Surveyor	Rusak Berat	Dilakukan ajuan penghapusan aset	Tidak tersedia suku cadang karena alat sudah tidak diproduksi dan saran produsen harus diadakan pembelian baru

No	Alat	Kondisi Alat	Tindakan Pemeliharaan	Perbaikan / Catatan
1	GPS Geodetik Leica	Rusak Berat	Dilakukan ajuan penghapusan aset	Tidak tersedia suku cadang karena alat sudah tidak diproduksi dan saran produsen harus diadakan pembelian baru
2	Naniura Resistivity	Rusak Berat	Dilakukan ajuan penghapusan aset	Tidak tersedia suku cadang karena alat sudah tidak diproduksi dan saran produsen harus diadakan pembelian baru

Penghapusan Aset BMN

Penghapusan Aset BMN

Beberapa alat dilakukan peremajaan dan penambahan untuk menunjang kegiatan lapangan. Ada juga penggantian komponen dikarenakan usia baterai yang telah lemah. Berikut disampaikan tabel penambahan komponen lapang alat Laboratorium tahun 2025.

Tabel 88. Komponen Penunjang alat lapang

No	Jenis Barang	Merek	Tipe	Volume	Status
1	Water Quality (Ph, TDS, suhu)			1	Baru
2	Tab Samsung A9	Samsung	9 inc	1	Baru
3	power station	vivan	3000 watt	1	Baru
4	Baterai drone	DJI	Mavic 2 pro	2	Baru
5	Remote drone	DJI	Mavic 2 pro	2	Baru

5.6.3. Bagian Pelayanan Peminjaman Alat Laboratorium

Seiring dengan meningkatnya jumlah peralatan laboratorium serta mobilitas kegiatan pengujian, diperlukan suatu metode pelayanan yang efektif dan efisien serta berbasis IT sehingga dapat dikontrol setiap saat dan waktu. Salah satu bentuk terobosan yang diimplementasikan yakni dengan membuat sistem google form untuk setiap pengajuan peminjaman alat/instrumentasi sehingga baik peminjam ataupun pengelola menjadi mudah telusur tanpa melewati prosedur yang sudah ada.

Gambar 123. Sistem Pengelolaan Alat Laboratorium

Kegiatan penataan ruang laboratorium dan lemari penyimpanan. Dilaksanakan dalam rangka penataan rutin dan menseleksi peralatan instrumen dalam kategori baik, rusak ringan, dan rusak berat, serta dokumen yang sudah tidak terpakai.

Gambar 124. Kegiatan penataan alat-alat laboratorium

Kegiatan penataan ulang lokasi penyimpanan instrumen agroklimat dan hidrologi diharapkan dapat memudahkan para pengelola dan teknisi dalam melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala, serta menjaga kondisi alat tetap optimal ketika dibutuhkan, dan menjaga keamanan.

Dengan sudah berjalannya sistem ini, kini laboratorium memiliki database pelaporan peminjaman dan riwayat pemakaian alat untuk menjadi pedoman keberlanjutan pemeliharaan instrumentasi. Adapun rekapitulasi sebagai berikut:

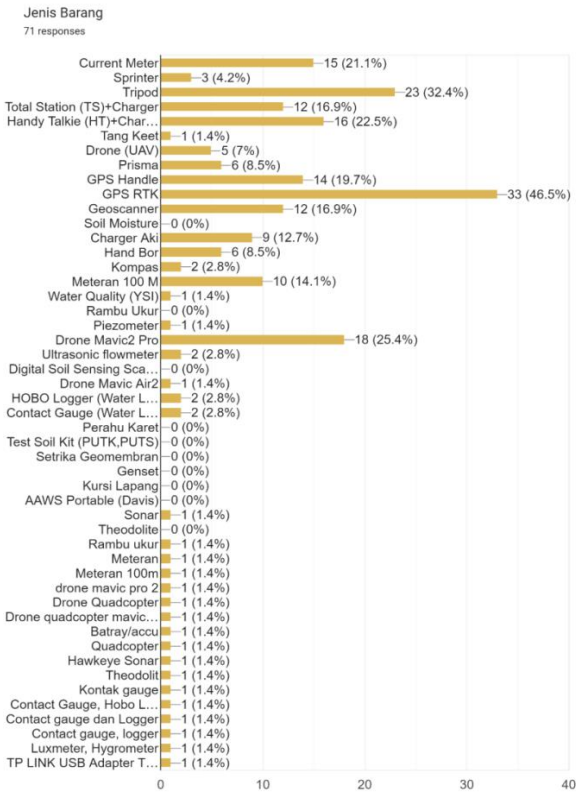

Gambar 125. Rekapitulasi pelaporan peminjaman dan riwayat pemakaian alat

VI. KESIMPULAN

1. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi. Perekayasaan modernisasi untuk agroklimat dan hidrologi pertanian memiliki signifikansi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Dengan menerapan modernisasi, petani dapat mengumpulkan data akurat mengenai kondisi iklim dan sumber daya air di lahan mereka. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai waktu tanam, irigasi, dan perlindungan tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.
2. Evaluasi dan monitoring secara berkala dilakukan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Inventarisasi barang milik negara (BMN) merupakan langkah penting dalam pengelolaan aset satker, termasuk identifikasi barang yang baik, rusak, hilang, atau berlebih.
4. Laporan keuangan yang disajikan mencakup informasi perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan entitas.
5. Laporan ini menyajikan hasil capaian kegiatan Balai Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR PUSTAKA

BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2025. Laporan Akhir Kegiatan BRMP. Laporan Tahunan